

Ekonomi Politik Antara Teori dan Praktek

By: A.Razak, Elyta

As of: Dec 24, 2021 10:31:15 AM
25,292 words - 299 matches - 75 sources

Similarity Index

26%

Mode: Similarity Report ▼

paper text:

Dr. A. Razak, SE, MM,Ak Dr. Elyta , S. Sos,M.Si

30

EKONOMI POLITIK Antara Teori dan Praktek EKONOMI POLITIK Antara Teori dan Praktek

3

All rights reserved @ 2018, Indonesia: Pontianak

Dr.A. Razak, SE, MM,Ak Dr. Elyta , S. Sos,M.Si

30

Layout & Cover: FAHMI ICHWAN Publisher Top Indonesia

Top Indonesia Jalan Purnama Agung VII Pondok Agung Permata Y35 Pontianak Kalimantan Barat

58

Cetakan Pertama, Desember 2018 xii+ 150 page 16 x 24 cm ISBN ; 978-602-5720-18-5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

9

Pasal 2: 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72 1. Barangsiapa dengan sengaja ataau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). KATA PENGANTAR

Prof. Dr. A.B. Tangdililing,

M.A. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

69

Tanjungpura at ini ilmu ekonomi politik

merupakan salah satu cabang ilmu yang berkembang cukup cepat sejalan dengan kebutuhan masyarakat

37

. Ilmu ekonomi politik

merupakan cabang studi yang bersifat multidisiplin dan membutuhkan ilmu lain dalam kenyataan sehari-hari S **kontribusi-kontribusi**

37

. Isu ekonomi politik sering menjadi sorotan kritis terutama dihubungkan dengan negara maupun kehidupan masyarakat. Kepada penulis saya sampaikan penghargaan atas tulisannya yang telah berhasil menulis buku Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek, buku adalah media pembelajaran cetak yang diterbitkan penerbit yang merupakan anggota IKAPI berguna untuk memudahkan dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kompetensinya. Penulis telah mengemas-ulang dengan cara memanfaatkan buku-buku, koran dan informasi lain yang berkaitan dengan ilmu politik. Menurut saya dengan memahami teori, uraian dan metode dari buku ekonomi politik ini, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang holistik. Selanjutnya buku ini menerapkan metode pembelajaran aktif dimana

tidak hanya dosen yang aktif tetapi mahasiswa juga aktif dalam proses

66

pembelajaran, jadi ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa. iii Akhir kata

saya ucapkan selamat kepada mahasiswa untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu bahan bacaan

71

, semoga bermanfaat. Pontianak, Desember 2018 Prof. Dr. A.B. Tangdililing, M.A. iv Pengantar menyelesaikan buku yang sekarang berada ditangan pembaca. Buku P uji

syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran **Allah SWT yang telah memberikan** ridho dan nikmat- **Nya kepada penulis sehingga** penulis bisa **ini**

49

dibuat dengan pertimbangan menyediakan buku bagi mahasiswa yang berkompeten tentang ekonomi politik hal inilah yang memotivasi penulisan buku ini. Penyediaan literatur pokok semacam ini diharapkan mampu menyumbangkan pemahaman tentang dasar- dasar ilmu politik. Buku ini adalah buku yang dimaksudkan untuk menjadi materi pembelajaran bagi para mahasiswa dalam mata kuliah ekonomi politik, tetapi juga diharapkan akan menarik minat para politisi maupun pihak-pihak yang berminat menekuni bidang politik untuk membacanya. Pembahasan dimulai dengan tinjauan mata kuliah, Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari Definisi ekonomi politik dan pendekatan ekonomi politik terhadap hubungan

dengan ilmu pengetahuan lainnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya . Bab II **Hubungan**

59

Ekonomi Politik terdiri dari relasi dan interaksi antara ekonomi dan politik dan unsur ekonomi dalam politik. Bab III Teori Dalam Ekonomi Politik mengenai teori dalam melihat ekonomi politik. v Bab IV Negara Dan Ekonomi Politik terdiri dari implikasi ekonomi politik terhadap negara, perkembangan dan hubungan negara di bidang ekonomi, perubahan struktur dan ekonomi global, dan pemahaman politik dalam ekonomi. Bab V Pembagian Isu Ekonomi Politik terdiri dari isu dan contoh kasus dalam ekonomi politik, isu bisnis dalam ekonomi politik. Bab VI Politik Pemberdayaan Dan Inkubator Bisnis Untuk Meningkatkan Ekonomi Politik Pada Wira Usaha terdiri dari Politik Pemberdayaan dan Inkubator Bisnis. Bab VII Ekonomi Politik dalam Pendekatan Internasional, pemahaman ekonomi politik dari pendekatan internasional dan isu ka- wasan. Kepada semua penulis buku, baik dari buku-buku dan penyaji materi di web internet yang telah penulis jadikan rujukan dalam penyusunan buku ini, diucapkan banyak terima kasih

sehingga buku ini bisa terbit. Semoga buku ini bisa memberi

75

manfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan Khususnya ilmu politik. Pontianak, Desember 2018

Dr.A. Razak, Se, MM,Ak Dr. Elyta S. Sos, M.Si

30

vi TINJAUAN MATA KULIAH 1. Deskripsi

Mata Kuliah Membahas latar belakang, eksistensi, dan konsep-konsep dasar universal ilmu ekonomi **politik serta amplikasi teoritisnya dalam memahami menganalisis** ekonomi **politik**

16

. 2. Tujuan Instruksional Umum Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis proses dan perkembangan ekonomi politik,

memiliki sikap dan perilaku kritis, konstruktif, dan partisipatif demokratis dalam kehidupan politik baik dalam kehidupan politik nasional maupun lokal

16

. 3.

Garis Besar Isi Mata Kuliah Membahas latar belakang, eksistensi, dan konsep-konsep dasar ekonomi politik serta Implikasi teoritisnya dalam memahami menganalisis ekonomi politik

16

. 4.

Kegiatan Mahasiswa 1. Tatap muka 1X150 menit setiap minggu 2. Mengerjakan setiap tugas terstruktur yang pada prinsipnya diberikan setiap tatap muka 3. Mengikuti dan berperfan aktif dalam setiap tanya jawab dan diskusi kelas 4. Mengikuti ujian tengah semester dan ujian semester

16

. vii 5. Materi Kegiatan Perkuliahan 1. BAB I PENDAHULUAN 2. BAB II HUBUNGAN EKONOMI POLITIK 3. BAB III TEORI DALAM EKONOMI POLITIK 4. BAB IV NEGARA DAN EKONOMI POLITIK 5. BAB V ISU EKONOMI POLITIK 6. BAB VI POLITIK PEMBERDAYAAN DAN INKUBA- TOR BISNIS UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI POLITIK PADA WIRA USAHA 7. BAB VII EKONOMI POLITIK DALAM PENDEKATAN INTERNASIONAL viii Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PRAKATA DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 . Deinisi 1.2 . Pendekatan Ekonomi Politik 1

35

.2.1. Pendekatan Ekonomi 1.2.2. Pendekatan Politik Rangkuman Pertanyaan Kunci/Tugas Formulir Nomor 1 Formulir Nomor 2 Daftar Pustaka BAB II HUBUNGAN EKONOMI POLITIK 2.1. Relasi dan Interaksi antara Ekonomi dan Politik 2.2. Unsur Ekonommi dalam Politik Rangkuman Pertanyaan Kunci/Tugas Formulir Nomor 1 Formulir Nomor 2 Daftar Pustaka iii v ix 1 2 7 7 9 13 14 15 16 18 19 20 24 28 29 30 31 33 (ix) Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek BAB III TEORI DALAM EKONOMI POLITIK 3.1. Teori-Teori Dalam Ekonomi Politik 3.1.1. Unsur Politik 3.1.2. Studi Komparatif dengan Sistem Politik 3.2. Teori Dependencia Rangkuman Pertanyaan Kunci/Tugas Formulir Nomor 1 Formulir Nomor 2 Daftar Pustaka 35 36 36 37 38 45 46 47 48 50 BAB IV NEGARA DAN EKONOMI POLITIK 4.1. Implikasi Ekonomi Politik Terhadap Negara 51 52 4.2. Perkembangan hubungan Negara dengan Masyarakat di Bidang Perekonomian 4.3. Perubahan Struktur Ekonomi Global dan Nasional 58 Rangkuman Pertanyaan Kunci/Tugas Formulir Nomor 1 Formulir Nomor 2 Daftar Pustaka BAB V ISU EKONOMI POLITIK 5.1. Isu Ekonomi Politik 5.1.1. Kelemahan Implementasi 5.1.2.

Tantangan Tata Kelola Timah 5.2. Isu Bisnis Dalam Ekonomi Politik 5.2.1. Pergulatan Bisnis Politik Indonesia
 Rangkuman Pertanyaan Kunci/Tugas Formulir Nomor 1 Formulir Nomor 2 Daftar Pustaka 58 68 70 71 72 74 77 78 82
 83 85 90 99 100 101 103 105 (x) BAB VI POLITIK PEMBERDAYAAN DAN INKUBATOR BISNIS UNTUK MENINGKATKAN
 EKONOMI POLITIK PADA WIRA USAHA 107 6.1. Politik Pemberdayaan 108 6.2. Inkubator Bisnis 114 Rangkuman 119
 Pertanyaan Kunci/Tugas 120 Formulir Nomor 1 120 Formulir Nomor 2 121 Daftar Pustaka 122 BAB VII EKONOMI
 POLITIK DALAM PENDEKATAN INTERNASIONAL 125 7.1. Ekonomi Dalam Politik Internasional 126 7.2. Ekonomi Polirik
 dalam Isu Kawasan 132 Rangkuman 135 Pertanyaan Kunci/Tugas 137 Formulir Nomor 1 138 Formulir Nomor 2 140
 Daftar Pustaka 142 GLOSARIUM INDEKS 145 149 (xi) (xii) BAB I PENDAHULUAN

Tujuan Instruksional Khusus Setelah mengikuti **pokok bahasan** pada bab **ini mahasiswa**
dapat: 1

23

. Memperoleh gambaran tentang deinsi ekonomi politik 2. Memperoleh gambaran tentang pendekatan ekonomi politik
 Deskripsi Singkat Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh gambaran tentang deinisi ekonomi politik dan
 pendekatan dalam ekonomi politik. Tugas Mahasiswa harus membaca isi bab I dan tulislah dengan menggunakan
 pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai.
 1.1. Deinisi Ekonomi Politik Negara-negara maju sudah sejak lama mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat,
 faktanya pada masa perang dunia kedua ada beberapa negara bagian yang tergolong miskin hingga dikatakan sebagai
 negara berkembang serta menimbulkan berbagai pertanyaan fundamental (Sukirno, 2001). Pertanyaan-pertanyaan
 tersebut menggambarkan bagaimana bisa hanya beberapa negara yang dapat menyejahteraan masyarakatnya dan
 bagaimana kondisi perekonomian pada masa itu, pada masa perang tersebutlah dunia seolah disadarkan bahwa alat
 untu meraih kesuksesan ialah menjamin kehidupan masyarakatnya dengan memajukan sektor perekonomian yang
 dengan begitu akan mempermudah memperoleh kendali politik. Ekonomi Politik berasal dari bahasa Yunani dan
 memiliki arti Kota atau unit politik dan merujuk ke policy (Kebijakan) dan dijelaskan sebagai manajemen dalam rumah
 tangga atau dikenal dengan oikonomike (Lane, 1994:XI). Searah dengan pendapat tersebut, Adam Smith (1729-1790)
 seorang ahli ekonomi politik yang berasal dari Inggris memahami dari berbagai pemahaman tentang ekonomi terdahulu
 yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Smith dan mendeinisikan mengenai ekonomi Klasik dalam buku
 "The Wealth of Nations" pada tahun 1779 memuat teori dari suatu pemikiran bebas serta keterkaitannya dengan
 neoliberal. Dalam buku tersebut menjelaskan terkait pembangunan dan kebijakan sebagai penggerak yang
 menyebabkan tumbuhnya sektor ekonomi dan salah satu cara mencapainya juga didapat dari adanya perdagangan
 bebas. Tulisan mengenai pemikiran ekonomi dari perspektif dikeluarkan dalam tulisan berjudul "The Outline of a Critique
 of Political Economy" tahun 1843 oleh Engels yang menggambarkan dukungan terhadap persaingan global serta pasar
 bebas seperti yang dicetus oleh Adam Smith. Artinya, hal tersebut dianggap sebuah kemajuan dalam ekonomi politik
 yang akhirnya tidak memperlakukan aset pribadi adalah anggapan salah. Anggapan tersebut karena menutupi fakta
 bahwa pemikiran Kapitalisme yang ada didalam pemikiran tersebut berpotensi menjadi kejahatan sosial maupun
 ekonomi di era 3,5 dekade nantinya. Kritik terhadap pemikiran ekonomi baru tersebut juga telah ditulis oleh Marx dalam
 "Contribution to a Critique of Political Economy" (Lane, 1994:11-12). Perkembangan ekonomi baru ditengah- tengah
 perekonomian dunia dapat mengarah pada terbentuknya kapitalisma yang berujung persaingan sosial maupun ekonomi
 dengan cara-cara yang tidak sehat. Ekonomi Politik yang dicetus oleh Adam Smith beserta tokoh ekonomi klasik yang

lain. Istilah tersebut penggunaannya tidak menyalahi pelaksanaan yang seharusnya atau umum di masanya oleh Marx namun hanya menimbulkan adanya perubahan makna. Kemudian menurut Marx maupun Engels mempercayai bahwa ekonomi politik merupakan sebuah ilmu yang hadir seiring dengan orang-orang yang memiliki modal sendiri, sebab sifat pemberdayaan dari sistem – sistem sebelum adanya kaum kapitalis adalah terbuka. Mereka tidak memerlukan suatu ilmu untuk menjabarkan mereka sendiri. Melegetimasi mereka hanya memerlukan ideologi tetapi cara berpikir pemerdayaan kapitalis tidak terbuka, ia hanya memerlukan ilmu ekonomi untuk mengungkapkannya (Lane, 1994:12) Berdasarkan pendapat tersebut diidentifikasi keterlibatan aspek produksi, keuangan, hingga perdagangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada kasus-kasus keuangan, pendapatan negara, dan seputar perdagangan. Semua faktor tersebut menunjukkan peran utama manusia dalam ekonomi politik sebagai masyarakat dalam suatu negara yang menjalankan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Masyarakat suatu negara merupakan totalitas interaksi antar manusia. Robert M McIver menyatakan :” warga negara adalah pola interaksi yang teratur (society means a system of ordered relations) (Budiardjo, Miriam, 2008:46). Pendapat lain juga mengemukakan bahwa berkembangnya perekonomian dalam Negara yang banyak melibatkan lembaga keuangan dari luar negeri dan dalam negeri seperti perusahaan yang dipengaruhi pemahaman neoliberalisme (Deliarnov, 2006:2). Turut sertanya negara juga berperan penting dalam asal usul munculnya ekonomi politik, negara tersebut memuat unsur ekonomi dan politik didalamnya sehingga apa yang disebut ekonomi politik terus melekat dan berkembang seiring kemajuan peradaban dunia dan berkembangnya suatu negara. Kaitan mengenai ekonomi dan politik juga dapat diartikan kedalam sebuah susunan yang terdiri dari unsur analisis dalam politik dan ekonomi, dimana unsur-unsur tersebut saling memberikan pengaruhnya. Pemahaman mengenai Ekonomi Politik sendiri sudah lama di Indonesia. Munculnya ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu bahwa ilmu politik dan ekonomi erat kaitannya dengan kontribusi suatu karya dari teori-teori ekonomi politik baru. Apabila di tinjau dari bentuk ekonomi politik baru bahwa perpisahan antara ekonomi politik karena para pakar sebelumnya terlalu berfokus pada transaksi dan penataan nonpasar. Sedangkan konsep bukan pasar digunakan untuk menganalisis kebijakan umum. Dari definisi tersebut penggerak yang sesungguhnya ialah manusia didalam sejarah kemunculan ekonomi politik tersebut, berbagai pandangan yang mengaitkan peran manusia dengan kemunculan ekonomi politik. Karena itu, ekonomi tidak terlepas dari perilaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam merumuskan dan menjalankan suatu sistem ekonomi politik membutuhkan adanya kerjasama dan sosialisasi yakni dengan melakukan konteks sosial mencakup masyarakat tanpa dominasi yang mengarah pada perilaku monopoli. Dengan begitu, maka dapat dicapainya keselarasan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dengan menerapkan ekonomi politik. Bentuk kemajuan dalam kehidupan masyarakat dilihat berdasarkan perilaku ekonomi dalam hal produksi, pemikiran yang biasa saja akan menghasilkan penerapan yang biasa saja (Khalidun dan Rahman, 2008). Hal ini menyebabkan munculnya suatu dekadensi moral terhadap penduduk kota dan penduduk desa yang memiliki pola pemikiran berbeda, masyarakat kota cenderung memiliki standar hidup lebih tinggi sementara penduduk desa cenderung lebih sederhana sehingga memunculkan ruang antara masyarakat kota dan desa. Konflik antar kelas manusia diawali dengan pertikaian akibat perilaku ekonomi, yakni kelas sosial yang berasal dari kekuasaan alat dalam berbisnis (Marx, 1994:66-68). Struktur tingkatan maupun kekuasaan harus lebih politis, selain itu pemikirannya mengenai sistem ekonomi politik lebih luas libanding dengan sosialis. Dalam tulisannya, Marx (2004) mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu dalam deterministik yang sulit dihindari masyarakat dunia. Tingkatan sosial yang dimaksud pada masyarakat kota, karakter kritis dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi merupakan ciri masyarakatnya. Tingkatan

ekonomi dibentuk secara sengaja yang **didasarkan pada** tingkatan **pendidikan yang**
didasarkan pada **kepemilikan harta benda**

43

. Perbedaan masyarakat kedalam kelas- kelas

juga dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kerja dalam bidang ekonomi

43

. Adaan kelas yang dimaksud dibedakan berdasarkan ekonomi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu kelas Atasbagi pelaku usaha, pejabat. Kelas menengah untuk para pegawai biasa, dan terakhir kelas bawah ditunjukkan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai supir becak, buruh, dll. . Oleh karena itulah Marx (1986) menjadikan ekonomi sebagai struktur yang mendasari perbandingan dalam masyarakat atau penduduk (Marx dalam Giddens, 1986). Manusia sulit di pisahkan dari sisi material, artinya perilaku yang setidaknya radikal dalam diri manusia tersebut berasal dari kebutuhan ekonomi mencakup sandang, pangan , papan. Kebutuhan ini memicu manusia untuk membuat karya dan produksi ekonomi, produk dan fasilitas memiliki implikasi nyata dalam pengembangan ekonomi politik. Hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok tertentu mendukung terbentuknya sistem pemerintahan dan kebijakan negara dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan politik. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai kemajuan aktivitas ekonomi yang menyebabkan aktifnya produktivitas barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2001:423). Ekonomi yang maju, kesejahteraan masyarakat terjamin adalah dukungan besar terhadap politik di suatu negara. Negara dapat menjalankan ekonomi politik terhadap pemerintahan dan masyarakatnya dan mengambil serta menerapkan kebijakan- kebijakan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Jika dilihat dari perkembangan ekonomi politik dalam sejarah peradaban dunia sendiri menunjukkan bahwa manusia menggambarkan suatu sejarah berlawanan dalam tingkatan yang didorong oleh persaingan ekonomi, adanya pembagian tata ruang dan aksesibilitas ekonomi dan unit-unit produksi yang menyebabkan adanya tingkat persaingan pada saat perang dunia I dan II serta berjalannya imperialisme perdagangan bebas. Pada era penjajahan oleh bangsa Eropa di abad 16 – 20 M, hal ini merupakan suatu pencarian sumber daya yang belum diklaim untuk memperbanyak bahan produktivitas dalam pengembangan ekonomi. Dengan adanya kelas, dan rasa ketidakpuasan untuk menemukan yang baru dan mengklaim sebagai aset ekonomi tersebut maka perilaku yang mengaitkan ekonomi politik mulai bermunculan.

1.2. Pendekatan Ekonomi Politik Pendekatan dalam ekonomi politik yang paling menonjol ialah digambarkan sebagai Suatu hubungan yang bersifat timbal balik antara sektor ekonomi dan politik (Heriyono, 2013:105). Dalam studi ekonomi politik ada banyak pendekatan yang berlabel "ekonomi modern". Salah satunya pendekatan Karl Marx, Pendekatan dari teori sistem, pendekatan institusional maupun tradisional serta pendekatan publik. Ekonomi modern merupakan penerapan metode model ekonomi tentang sebuah prefensi. Pendekatan ekonomi politik meliputi 2 (dua) aspek penting didalamnya, yaitu ekonomi perekonomian (the economy) dan bidang politik (polity) (Heriyono, 2013:108). Dijelaskan sebagai berikut :

1.2.1. Pendekatan Ekonomi Ekonomi tidak hanya memiliki 1 (satu) makna melainkan keterkaitan antara Perilaku yang memuat tindakan ekonomis oleh individu atau kelompok. Hal ini merujuk pada tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan mengarah pada barang dan jasa terhadap institusi pasar. Sementara pasar ialah wujud dalam mencapai efisiensi perilaku yang ditujukan untuk barang dan jasa dan seluruh hal tersebut berkaitan dengan

Bisnis, bagian vital dalam dimensi ekonomi, ini merupakan perilaku nyata yang mewakili berbagai aspek dalam perekonomian (Heriyono, 2013:106). Dalam makna ekonomi yang dinyatakan Smith (1979) tujuan ekonomi ialah mengumpulkan kekayaan, hal tersebut merupakan pembenaran bagi pasar dalam mengambil keuntungan (Heriyono, 2013:108). Mengacu pada aspek dan pendapat tersebut, artinya ekonomi mengarah pada bisnis dan berbagai tindakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Dalam pandangan ekonomi, ada hal yang disebut kalkulasi yakni suatu pendekatan dalam memanfaatkan apa yang tersedia meski bersifat terbatas guna memenuhi kebutuhan tanpa ada batasan. Pendekatan ini 'rasionalitas instrumental' yaitu berdasarkan nalar dalam mencapai tujuan, Kalkulasi ekonomi juga adalah ciri khusus yang dimiliki ekonomi modern(Heriyono, 2013:107-108). Manusia pada era modern dapat melihat lingkungan melalui sudut pandang kalkulasi, artinya pemikiran manusia akan berorientasi pada cara pemanfaatan sesuatu yang lebih kecil untuk mendapat keuntungan yang besar. Sehingga dalam

menggunakan pendekatan kalkulasi ekonomi maka ialah meyakini ekonomi akan lebih unggul 6
dari pada politik

(Heriyono, 2013:109). Konteks orientasi tersebut dilakukan dengan cara bisnis, upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui sedikit pengorbanan kecil yang dihadapkan pada tuntutan lain dari masyarakat. Pengorbanan dan upaya tersebut dicapai berdasarkan sejauh mana biaya yang harus dikeluarkan menjadi pertimbangan bisnis agar

berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan, di sisi lain ialah sejauh mana pula 6
kebijaksanaan publik dalam suatu negara yang demokrasi dapat memberikan ruang

untuk dapat mengambil keuntungan keberlangsungan bisnis yang dikembangkan. 1.2.2. Pendekatan Politik

Caporaso dan Levine serta Ahmad Erani Yustika memandang pendekatan ekonomi politik 2
secara pasti maksudnya sebagai

hubungan timbal balik anatar

aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan 2
perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya

). Mengarah kepada makna itu, konsep

ekonomi politik menghubungkan **seluruh** pengelolaan **politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang** dikerjakan **oleh masyarakat maupun pemerintah**

2

(Ruslin, 2012:116). Kekuasaan,

kewenangan, kehidupan politik, pemerintahan , konflik **dan resolusi politik semuanya** adalah **bagian dari dimensi politik dan ilmu politik**

6

. (Heriyono, 2013:105).Ada

banyak pandangan yang dikemukakan **para ahli** terkait **konsep ilmu politik** . Belum **ada** satupun yang memiliki **satu pandangan mutlak** untuk **diterima secara umum** karena semua pandangan **memiliki**

6

kekurangan dan kelebihan yang teoritis didalamnya. lebih lanjut berbagai definisi politik dijelaskan sebagai berikut : a. Politik adalah segala hal tentang penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. b. Politik mengandung

kekuatan yang mengarah **untuk mencari** serta **mempertahankan** kekuasaan **dalam** negara. c. **Politik** perwujudan **kegiatan yang**

6

merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. d. Politik juga adalah konflik pencarian dan pertahanan sumber-sumber penting tertentu. Istilah ekonomi politik pertama kali adalah beberapa ahli ekonomi klasik di abad 18 dan 19 M. Oleh karena itulah pertama kali konsep ekonomi politik yang lahir pada abad ke-18 untuk membentuk pandangan dari berbagai macam hal dan perkembangan sosial yang tidak dapat dianalisa dengan hanya menggunakan pandangan dari konsep ekonomi maupun hanya dari konsep politik saja. Jika berpandangan dari satu konsep dalam menganalisa ekonomi politik maka tidak akan menyeluruh. Misalnya, Ekonomi yang dipandang sebagai bagian bidang sosial serta tidak hanya berkaitan dengan hubungan pada aktivitas ekonomis serta produksi atau kalkulasi individu atas pertimbangan keuntungan dan rugi saja (Heriyono, 2013:109). Ekonomi dalam sektor perekonomian yang hanya menekankan bahwa ekonomi memiliki teritori tersendiri dari yang lain serta memfokuskan pada hubungan-hubungan sosial yakni khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan pemanfaatan pasar atau segala hal untuk mencapai nilai ekonomis. Pasar ekonomis sebagai wujud atau media mendapatkan tujuan dari ekonomi sendiri, yaitu keuntungan. Namun, semakin lajunya pasar modern dikembangkan memberikan dampak terhadap eksistensi pasar lokal sebagai andalan masyarakat dari berbagai kelas khususnya masyarakat menengah dan bawah. Oleh karena itu, Damayanti (2009:96) mengungkapkan analisisnya bahwa Pasar lokal dianggap sebagai jantung ekonomi masyarakat

(Damayanti,2009:96). Pasar lokal menjadi bagian dari faktor yang mendefinisikan ekonomi dan menggambarkan perananan penting menjadi satu dalam jalannya aktivitas sehari-hari masyarakat. Kebutuhan akan pasar lokal disinyalir sampai kepada tahap bergantung baik sebagai sumber pendapatan maupun keberlangsungan jalannya aktivitas ekonomi pasar yaitu perdagangan. Adapula pandangan ekonomi politik klasik yang juga lahir sebagai awal yang penting dan berkembang hingga sekarang. Tujuan kehidupan masyarakat dunia dan tujuan eksistensi pasar bisnis dinilai sama dalam pandangan dari pemikiran ekonomi klasik. Hal ini berdasarkan pemikiran individu terhadap perekonomian, dan nantinya akan diketahui pula mengenai bagaimana cara memahami dan ideologi dalam sebuah negara untuk menjalin relasi antara ekonomi dengan politik. Dalam definisi ini, Ekonomi Politik termasuk dalam ilmu sosial yang berorientasi dalam cakupan ekonomi, dalam hal ini mencakup peningkatan pendapatan dalam suatu negara dan peningkatan sumber daya alam atau manusia dalam suatu negara. Kata ekonomi politik mulai diterapkan umum pada abad 18

yang digunakan pemerintah dalam mengatur perdagangan, pertukaran uang dan pajak

27

dan ekonomi politik ini diterapkan juga dalam hal kajian masalah dan persoalan ekonomi. Ekonomi politik menjadi salah satu bagian ilmu yang dijadikan kajian ilmiah di beberapa institut pendidikan kemudian berkembang seiring adanya pemecahan bidang ilmu keduanya yang memuat isu-isu ekonomi politik (Lane, 1994:12). Ekonomi Politik yang ilmiah ialah dimana dapat dilakukannya pengelolaan segala sesuatu yang belum disentuh atau di benahi dan kemudian juga mempelajari cara berpikir dari menghasilkan suatu karya/barang, juga tenaga yang bekerja di perusahaan tersebut. Ilmu ekonomi vulgar juga menutupi pendaayagunaan orang-orang yang memiliki modal sendiri dengan memperlakukan semua kerjasama sebagai pertukaran. Paparan tersebut merupakan sebuah ideologi bukan sains. Ada

perbedaan antara ekonomi politik (ilmiah) dan ilmu ekonomi pada saat ini adalah karena **telah menjadi kesamaan dalam suatu pemikiran ekonomi yang**

50

lebih baik dan membangun khususnya pemikiran oleh Marx, pada akhir tahun 1950 adalah puncak analisis Marx di Eropa Barat dan Amerika Serikat sehingga akhirnya muncullah

istilah ekonomi politik sebagai sebuah symbol. Hal ini menggambarkan kemauan **untuk** membangkitkan **kembali perbedaan – perbedaan** metode logis **dengan ilmu ekonomi yang semakin** marak berkembang **dan juga kebutuhan nama sandi di tempat – tempat berbeda, seperti di Amerika Serikat**. Perubahan **ekonomi politik ini mengungkapkan** tujuan yang di perbaharui **dalam** masalah – masalah **dan** cara atau **metode Marx**

27

(Lane,1994:12). RANGKUMAN Ekonomi dan Politik, dua konsep yang memiliki arti dan definisi masing-masing. Dua pemikiran dan pandangan yang juga memiliki orientasi tersendiri, lebih luas dari pada sekedar definisi masing-masing memiliki keterkaitan dalam pendekatannya. Baik dari bidang-bidang didalamnya hingga aktor-aktor yang terlibat. Perekonomian suatu negara dapat dipengaruhi oleh eksistensi politik, begitupula sebaliknya jalannya politik dalam

sebuah negara juga dapat dipengaruhi oleh eksistensi ekonominya. Hal tersebut disebabkan oleh keterlibatan aktor didalamnya dan cara pencapaian ekonomi politik itu sendiri, baik pemerintahan maupun masyarakat menjadi hal vital dalam ekonomi politik karena menyangkut pada kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan negara. Pertumbuhan ekonomi negara yang tidak stabil memberikan dampak buruk bagi eksistensi negara tersebut, ketidak terjaminan hidup masyarakat mengakibatkan pada runtuhnya kekuatan- kekuatan politik pemerintahan dalam suatu negara yang kehilangan kepercayaan masyarakatnya sehingga meningkatnya tingkat kemiskinan masyarakat dan berujung pada runtuhnya kekuatan negara secara menyeluruh yang menyimbolkan gagalnya kepemimpinan suatu negara. Jalannya politik ditengah-tengah masyarakat, berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan tidak dapat berjalan optimal ketika suatu negara telah mengalami kelemahan pada aspek kekuatan politik dalam negeri atau luar negeri. Dampaknya ialah menumpuknya hutang negara yang berakhir pada ketergantungan dengan pinjaman luar negeri ataupun berujung pada peralihan control terhadap negara yang ditanggung oleh negara lain untuk memperoleh kekuatan politik demi membangun ulang ekonomi politik dalam suatu negara. Segala tindakan dan aktivitas dalam ekonomi politik secara garis besar meliputi aktivitas perdagangan, bisnis, dan pengambilan serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintahan suatu negara. Jika keduanya tidak berjalan beriringan atau berat sebelah, artinya belum ada keseimbangan suatu negara. **Pertanyaan Kunci/Tugas Petunjuk:** Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai. 1. Coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan deinisi ekonomi politik menurut Marx dan Engels ? berikan contohnya. 2. Jelaskan pendekatan ekonomi politik menurut Heriyono, dan berikan contoh ! Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi Bab :..... **Nama**

NIM Program studi :..... :..... :.....

Tuliskan Pemahaman

Saudara

Paraf Dosen Catatan 1 . Kumpulkan formulir ini kepada dosen sebelum **perkuliahan 2 . Formulir**
ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda **dianggap tidak hadir** dalam **perkuliahan. Formulir**

No 2 Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas Bab :..... Nama NIM Program studi :..... :..... Jawablah pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir **2.**
Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda dianggap **tidak**

mengumpulkan tugas.

DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, miriam.2008."Dasar-dasar ilmu politik, jakarta : PT Gramedia

13

Damayanti,Christy .2009." Dimensi Kekuasaan Dalam Ekonomi". Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.9 No.1

24

Deliarnov. 2006. "Ekonomi Politik, Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Kom-prehensif". Jakarta : Erlangga.

Giddens, Anthony .1986." Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, suatu analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber". Jakarta : UI Press, 1986

28

. Heriyono.2013."

Ekonomi Politik Dalam Bisnis".Jurnal Ekonomi Vol.1 No.2

24

Khaldun, danRahman.2008."Muqaddimah Ibn Khaldun". Jakarta : Pustaka Firdaus Lane, Jan Erik. 1994. "Ekonomi politik Komparatif". Jakarta: PT. RajaGraindo Persada Marx, Karl. 1994. "Kapital, Sebuah Kritik Ekonomi Politik". Jakarta: Hasta Mitra Nurcahyo, Hendra.2006."Filsafat Demokrasi".Jakarta:Bumi Aksara Ruslin.2012."Relasi Ekonomi POLitik dalam Perspektif Dependencia". SulesanaVol.7 No.2 Sukirno,Sadono.2001."Ilmu Ekonomi Pembangunan". Jakarta, Bumi aksara. BAB II HUBUNGAN EKONOMI POLITIK

Tujuan Instruksional Khusus Setelah mengikuti **pokok bahasan** pada bab **ini mahasiswa**
dapat: 1

23

. Memperoleh gambaran tentang relasi dan interaksi antara ekonomi dan politik 2. Memperoleh unsur ekonomi dalam politik Deskripsi Singkat Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh gambaran tentang relasi dan interaksi antara ekonomi dan politik serta memperoleh unsur ekonomi yang ada dalam politik. Tugas Mahasiswa harus membaca isi bab II dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai. 1.1. Relasi dan Interaksi antara Ekonomi dan Politik Studi ekonomi politik hadir ketika abad ke delapan belas di Inggris dimana pada saat itu pola pikir serta analisis platform yang akan dipakai dalam memakmurkan perekonomian negara Inggris Raya yang berhadapan dengan negara pesaing lainnya dan negara jajahan seperti negara Portugis, negara Spanyol, dan negara Perancis. Keberadaan 2 aspek ilmu ini bisa dimengerti sebab studi ekonomi pada mulanya diperuntukan supaya meningkatkan derajat kemashalatan rakyat di sebuah kawasan atau negara. Dalam meraih peningkatan perekonomian, peran serta suatu negara sangatlah penting dimana negara nantinya

akan mengatur sistem perekonomiannya. Ilmu ekonomi bisa dipandang mewakili usaha dalam hubungannya bersama studi politik akan terlaksana dalam ilmu ekonomi politik. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1994:5) sebagai pemenang nobel mengemukakan bahwa ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu mengenai reaksi individu dan bagaimana masyarakat menetapkan cara untuk memanfaatkan sarana yang minim serta mempunyai beberapa pilihan pemakaian, dalam hal menghasilkan berbagai dagangan, untuk disalurkan – baik sekarang atau masa yang akan datang – kepada semua golongan yang berada di sebuah masyarakat (Samuelson dan Nordhaus,1994:5) Samuelson dan Nordhaus menjelaskan lagi bahwa dalam ilmu ekonomi terdapat

dua bagian yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro . Dimana menurutnya **ekonomi makro** akan **membahas tentang** berbagai keseluruhan aktivitas **ekonomi**

60

yang berkaitan dengan permasalahan -permasalahan ekonomi seperti kenaikan harga, banyaknya orang yang tidak bekerja serta kebijakan ekonomi nasional yang berkenaan dengan masalah tersebut. (Samuelson dan Nordhaus,1994:5) Terdapat mikro ekonomi diartikan sebagai ilmu mengenai cara bagaimana keperluan sehari-hari dan juga produsen dalam menentukan sesuatu yang sulit didapatkan dalam sebuah perdagangan. disini akan mengatur bagaimana keputusan produsen untuk menentukan harga barang dan bagaimana keadaan barang di pasar akan tetap ada. untuk proses ini hukum penawaran dan permintaan akan berlaku (Samuelson dan Nordhaus,1994:5). Berdasarkan pengertian bisnis yang telah dipaparkan, maka untuk menganalisis bagaimana suatu perusahaan bisa berpengaruh pada suatu negara di perlukan untuk mempelajari ekonomi makros. Suatu perusahaan dituntut untuk memproduksi apa yang diperlukan masyarakat sampai terciptanya kesesuaian antara persediaan dan permintaan. Keuntungan yang didapatkan produsen tidak sepenuhnya untuk produsen, dimana nantinya akan ada kewajiban dari produsen untuk membayar pajak dan dari pajak inilah dipakai untuk biaya pengeluaran negara. Saat ini terdapat ahli ilmu ekonomi yang mengelompokkan ekonomi politik dengan penerapan makro ekonomi disejajarkan dengan beberapa penerapan ekonomi lainnya, seperti keuangan masyarakat banyak, ekonomi buruh dan ekonomi kesehatan. ekonomi politi sering disebut proses makro ekonomi karena hal ini bersipat pada tahap pengujian sebelum membuat sebuah keputusan oleh lembaga politik seperti anggota DPR dan pihak pemerintah yang mempunyai wewenang. dalam kebijakan yang dibuat acap kali bersifat menguntungkan pihaknya sendiri daripada memikirkan kepentingan ekonomi itu sendiri. Saat ini usaha merupakan pembelajaran ilmu khusus dimana diwajibkan mempunyai keterkaitan

dengan ilmu lainnya seperti ilmu hukum, politik , sosial **dan lainnya**

10

. dalam hal ini politik digunakan sebagai cara untuk menata sebuah negara, sedangkan bisnis sebagai cara untuk menunjang kemashalatan hidup warga negaranya. Perlu dicuplik ujaran juara nobel Gunnar Myrdal yang menyebutkan politik merupakan seni yang dicakupi perkara-perkara yang nyata dan mungkin, dan sebab dalih inilah ia meminta kontribusi ilmu ekonomi. Para elit pembuat kebijakan dapat berharap pada ekonom bahwa mereka semestinya menjelaskan kondisi sebenarnya dan menetapkan konsekuensi dari sebagian

tindakan yang mungkin dalam hubungan dengan keadaan awal yang sama. (Mubyarto, 1993:17).
 Ekonomi **politik**

10

merupakan kajian ilmu ekonomi yang lebih luas mencakup keterlibatan aspek sosial dan aspek kenegaraan (Todaro, 1985:352). Dikenal khalayak luas

bahwa ekonomi-politik ialah bagian **dari ilmu ekonomi** . Tetapi, **ekonomi-politik pada**
 hakikatnya **lebih luas dari ekonomi tradisional. Obyek kajiannya** melingkupi prosedur **sosial dan**

17

instutisional, kira-kira jika kita amati seperti apa

kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik berusaha membuat **keputusan** guna
mengalokasikan sumber-sumber produktif langka untuk sekarang maupun unruk **masa** yang
 akan datang, **baik untuk kepentingan kelompok** maupun kepentingan **masyarakat luas** . Istilah
ekonomi politik baru populer **dan** sangat terkenal **pada**

39

abad ke 1, dipopuleran oleh beberapa penulis yang mencantumkan kata-kata tersebut dalam buku yang mereka tulis. Istilah tersebut dipakai agar memperlihatkan tata-

cara pemerintah dalam mengatur perdagangan, pertukaran uang, dan pajak

2

(kebijakan ekonomi) (Suryadi,2006:2). Searah dengan hal tersebut, selanjutnya wajib dihayati jika metode ini menitik
 beratkan

bidang politik subordinat terhadap ekonomi . Maknanya, perangkat-perangkat **ekonomi**
 sebagai **mekanisme pasar (market mechanism), harga, dan investasi dianalisis** menggunakan
setting sistem politik dimana **kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi** . Maksudnya metode
ini memandang **ekonomi**

15

seperti tahap guna melaksanakan

tindakan (a way of acting), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan terebut (**a**
place to act) (Ruslin, 2012

48

:116). Meskipun

aliran ekonomi politik cukup banyak, dan **dilihat dari** segi **context teori ekonomi-politik** 2
secara kasar dapat dikelompokkan menjadi **dua** bagian **saja**. Yang **pertama disebut**
liberal, sedangkan bagian yang **kedua adalah** yang mengkritik **kelompok liberal (marxisme)**. Lebih
fokusnya pemahaman **pertama terdiri** dari: **mazhab liberalis (mencakup ekonomi politik liberal klasik,**
ekonomi politik neo-klasik, ekonomi politik baru, dan neoliberalisme). Golongan **ini** lebih
menekankan alasan-alasan logika ekonomi yang masuk akal **dan proses** kerja **pasar**. Yang
kedua

adalah penggabungan

pemikiran marxisme yang banyak menggunakan analisis masalah **dan** kekuasaan **dalam** 2
mengkaji sebuah **keputusan ekonomi yang merupakan hasil dari proses politik**. Biasanya golongan
kedua ini termasuk kedalam **kelompok ekonomi politik** yang **radikal**. Walaupun sebenarnya
ekonomi politik radikal sebenarnya sangat beragam, **tetapi secara sederhana dibedakan atas kelompok**
yang tersusun secara **dependensia**

. Ada dua golongan yang menganalisa ketergantungan tersebut(Ruslin, 2012:117).

Pertama, dalam analisisnya memanfaatkan perjuangan kelas internasional antara pemilik modal 2
(Kapitalis) dan

kaum (proletariat) juga harus **mengambil** pemikiran **untuk mengembangkan kekuasaan** 2
suatu kelompok **kelas pemerintah yang hanya menjadi alat dari metropolitan**

. Kemudian golongan kedua mengkaji ketergantungan dari sudut pandang

nasional dan regional dengan melihat keadaan di dalam dan di luar wilayah, dimana susunan **dan** 2
kondisi intern **dilihat sebagai faktor**

yang bersumber dari dalam, meskipun intern

ini, baik dimasa lalu maupun masa sekarang, dipengaruhi oleh keadaan **eksternal. Pendekatan kedua**
ini menurut Thee Kian Wie diadopsi oleh pakar dari berbagai **wilayah yang relatif terbelakang**
dalam pembangunan sosial ekonominya, khususnya yang ada **di Amerika Latin dengan munculnya teori**
ketergantungan (Dependencia

). 1.2. Unsur Ekonomi dalam Politik Untuk tetap eksis sebuah perusahaan harus masuk kedalam mengetahui seluk beluk politik. seluk beluk politik suatu negara merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. suasana politik yang aman akan lebih menjanjikan perkembangan perusahaan. maka dari itu seorang yang dikatakan manager yang handal tidak cuma dilihat dari aspek bagaimana sisi ekonominya saja tapi bagaimana juga seluk beluk yang ada dalam politik. sebagai contoh ketika terjadi kerusuhan pada tahun 1998 di jakarta menyebabkan banyak investor memikir ulang kembali untuk berinvestasi di jakarta lagi. hal ini untuk mengantisipasi kalau suatu saat kejadian seperti ini terulang kembali. Pada sisi politik, suatu negara biasanya menganut sebuah ideologi, sama halnya dengan Indonesia dimana ideologi yang dianut oleh negara Indonesia adalah pancasila. pancasila disini sebagai sendi-sendi yang masuk kedalam kehidupan masyarakat. jika ideologi Indonesia adalah pancasila apakah hal ini sama dengan sistem ekonomi indonesia yang sesuai dengan pancasila? ciri dari sistem ekonomi pancasila itu sendiri mempunyai ciri-ciri bahwa koperasi merupakan hal yang terdepan dan mengutamakan yang namanya

kerja sama hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh

72

Mubyarto (1993). namun pada kenyataannya para pakar ekonomi memaparkan bahwa indonesia cenderung kearah kapitalisme. hal ini di jelaskan dalam poin-poin oleh (Mubyarto, 1993:39) sebagai berikut : 1. Berbagai bisnis yang ada dinegara Indonesia menganut sistem bebas di semua sisi. semua bisa berbuat sesuka hati dalam berbisnis. namun walaupun begiti ada beberapa yang tidak dapat di bisniskan yaitu listrik dan kereta api karena masih dimiliki oleh negara. 2. Masih ada hartawan atau orang memonopoli bisnis di Indonesia. dimana hal ini sudah ada sejak pada era Suharto. Ada banyak nama yang mempunyai bisnis besar di Indonesia pada era Suharto seperti Liem Sioe Liong, Eka Tjipta Widjaja, Bob Hasan dan yang lainnya. dan hal ini masih berlaku sampai sekarang. Amerika Serikat sendiri sebagai negara dengan penganut sistem Kapitalis murni sangat menentang hal ini. Sesungguhnya Sistem di Indonesia memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada warganya untuk melakukan bisnis. pemerintah cuma berperan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan untuk membuat suasana iklim bisnis tetap tentram. sebagai contohnya pada tahun 1999 dibuatkanlah UU tentang anti monopoli untuk membuat keadilan dalam berbisnis dimana pemerintah membuat komisi pengawasan persaingan usaha atau disingkat menjadi KPPU. tugas dari KPPU ini adalah mengawasi bagaimana implikasi dari UU tentang anti monopoli. namun tujuan yang mau di capai tidak sesuai rencana. sebagai contohnya perusahaan pesawat terbang yang

menjual tiket dengan harga yang murah dan pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk
mencegah hal itu

10

. dari kejadian ini tentu akan sangat membahayakan konsumen dari pengguna pesawat terbang dimana harga yang murah akan membuat pelayanan yang buruk juga. Bukan suatu hal yang asing yang pernah kita dengar bahwa politik dan ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat dan tidak dapat dipilah satu sama lain, baik dalam suatu kebiasaan politik ataupun ketetapan pemerintah didalam suatu perkembangan ekonomi. Ketetapan komunitas pemerintah dibidang pabrik paling banyak dampak terhadap peruntukan dalam kemajuan yang sering disebut Rostow, bagian lampau tumpuan, rakitan asumsi Olson mengemukakan bahwa kepemimpinan dalam negeri (institusional sclerosis) didalam suatu wilayah mengakibatkan menyeluruhnya perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut (Heriyono, 2013:102). Menasionalisasi mempribumikan industri tiada berupaya untuk membuat suatu Negara yang bisa berdiri sendiri, sangat minim sekali suatu perusahaan dalam Negara Indonesia yang mampu beroperasi lama, salah satu faktornya bisa jadi karna keterbatasan alat yang canggih, pengetahuan yang luas dan masyarakat kurang memiliki kesadaran diri untuk melakukan perubahan, hal ini bisa menyebabkan bangkrutnya suatu perusahaan, dan hal ini memiliki dampak yang sangat besar terlebih pada pedagang pasar, contoh lain ketika seseorang menjadi agen pulsa yang menjual dengan untung yang sedikit karna harga telah ditentukan oleh swasta, hal ini membuat lemahnya suatu Negara dan sulit untuk melakukan tindakan. (Heriyono, 2013:102). Mengapa hal tersebut bisa berlaku? Hal tersebut dapat terjadi akibat para pakar politik seperti halnya legislatif sudah pernah memindahtangankan wilayah Indonesia kenegara asing, sewaktu kedudukan wilayah dibatasi, setidaknya ulasan seorang penulis dalam hal analisis ekonomi dan kekuasaan. Negara cina bisa kita jadikan sebagai contoh dan motifasi karna Negara cina adalah merupakan salah satu Negara berkembang, alat transportasi di Negara cina masih terbilang murah, dan dikelola dengan semana mestinya, yang menjadi pertanyaan mengapa Negara Indonesia yang kaya dengan hasil alam tetapi masih sulit untuk berkembang?.

RANGKUMAN Relasi dan Interaksi antara Ekonomi dan Politik dalam Studi ekonomi politik sejarahnya diterapkan dalam memakmurkan perekonomian negara Inggris Raya yang berhadapan dengan negara pesaing lainnya dan negara jajahan seperti negara Portugis, negara Spanyol, dan negara Perancis. Keberadaan 2 aspek ilmu ini bisa dimengerti sebab studi ekonomi pada mulanya diperuntukan supaya meningkatkan derajat kemashalatan rakyat di sebuah kawasan atau negara. Dalam meraih peningkatan perekonomian, peran serta suatu negara sangatlah penting dimana negara nantinya akan mengatur sistem perekonomiannya. Relasi kedua hubungan Ekonomi dan Politik ini saling ketergantungan satu sama lain, yakni bagaimana aspek ekonomi menjadi kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan politik. Adanya interaksi antara ekonomi dan politik juga menunjukkan ketergantungan keduanya, bahwa kedua aspek ini saling memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangannya. Unsur Ekonomi dalam Politik salah satunya keberadaan perusahaan komersil, untuk tetap eksis sebuah perusahaan harus masuk kedalam mengetahui seluk beluk politik. Pada sisi politik, suatu negara biasanya menganut sebuah ideologi, misalnya yang dianut Indonesia dimana ideologi yang dianut oleh negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Jadi ekonomi sangat berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia.

Pertanyaan Kunci/Tugas Petunjuk: Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai.

1. Jelaskan relasi dan interaksi antara ekonomi dan politik yang dimaksud Samuelson dan Nordhaus? Berikan contohnya.
2. Jelaskan faktor ekonomi dalam politik Indonesia yang dimaksud Mubyarto? Berikan contohnya!

Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi Bab : **Nama** 5

NIM Program studi : :

Tuliskan Pemahaman

Saudara

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir **2.**
Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda dianggap **tidak**

mengumpulkan tugas. Formulir No 2 Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas Bab :.....

Nama NIM Program studi :..... :..... :..... Jawablah pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir **2.**
Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda dianggap **tidak**

mengumpulkan tugas. DAFTAR PUSTAKA Heriyono.2013.

Ekonomi Politik Dalam Bisnis. Jurnal Ekonomi Vol.1 No.2

Mubyarto.1993.Ekonomi Pancasila. Jakarta :LP3ES Ruslin.2012."Relasi Ekonomi POLitik dalam Perspektif Dependencia".

SulesanaVol.7 No.2 Staniland, Martin1985. What

is Political Economy?.Yale University Press : New Heaven **Suryadi, Budi** .2006. **Ekonomi**
Politik Modern.Yogyakarta: IRCiSoD

Samuelson dan Nordhaus . 1994 . Ekonomi . (terjemahan) Wasana, Jaka . Jakarta : Erlangga

Todaro, Michael, P.1985. Economic Development In The Third World. New York; Logman Inc

BAB III TEORI DALAM EKONOMI POLITIK

Tujuan Instruksional Khusus Setelah mengikuti **pokok bahasan** pada bab **ini mahasiswa**
dapat: 1 .Memahami **teori**

dalam ekonomi politik 2. Memahamni teori defedencia Deskripsi Singkat Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh gambaran tentang teori dalam memandang ekonomi politik. Tugas Mahasiswa harus membaca isi bab III dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai. 1.1. Teori – Teori Dalam Ekonomi Politik Ilmu politik terdiri dari dua disipli ilmu, yaitu dimana ini masuk dari bagian ilmu sosial. Rachbini, Didick mengungkapkan bahwa pembelajaran ilmu ekonomi politik berarti mempelajari dua gabungan disiplin ilmu atau yang biasa disebut interdisiplin yang mana nantinya bisa untuk mengkaji sesuatu yang relevan bersifat ekonomi yang disertai sosial. ketika hal ini digabungkan maka akan membuat satu analisa yaitu ekonomi politik. Tujuan dari ilmu ekonomi politik secara umum adalah bagaimana melihat adanya timbal balik dari keduanya, baik dari politik maupun sebaliknya. namun dalam perkembangan yang terjadi ada perubahan dimana kata dari ekonomi politik bertujuan untuk menjelaskan hubungan timbal balik dari segi ekonomi dan politik, dalam hal ini ada kekurangan dimana dari kekurangan ini menyebabkan ada dua golongan yang melakukan upaya mencari benang merah dari permasalahan ini sampai pada akhirnya bisa memaksimalkan lagi analisisnya dengan menggunakan teori ekonomi politik. untuk memaksimalkan hasil dari studi ini dilihat lagi bagaimana sistem ekonomi dinegara tersebut (Heriyono, 2013:100- 101). 1.1.1. Unsur Politik Muktar Mas'oeed mengemukakan bahwa pada ilmu politik komperatif mulai mendapat banyak perhatian dalam pembangunan politik, namun hal ini akan menimbulkan konlik karena ilmu politik tidak mempunyai kerangka dalam pembangunan politik sementara pada sisi ekonomi bisa dijelaskan dengan angka dan ada tolak ukurnya untuk mengetahui perkembangannya. 1.1.2. Studi Komparatif dengan Sistem Politik Pada tahun 1959 dalam sebuah artikel Seymour martin lipset seorang sosiolog menjelaskan lebih jauh dalam politics and markets(1997). Kesimpulannya Lipset mempersoalkan kehadiran dan badan demokratis dalam satu cara pemerintahan,atas ekonomi kelompok,akan terdapat satu yang dapat melebihi suatu cara ekonomi pasar pada mulanya produksi distribusi sampai konsumsi merupakan sebuah permulaan dari kegiatan ekonomi yang nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, hal ini sesuai dengan

buku yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nation

35

dibuat oleh Adam Smith, dengan cara ekonomi yang beraneka ragam dan terencana yang merupakan

sistem ekonomi yang mengatur investasi dan alokasi modal sesuai dengan rencana-rencana ekonomi dan produksi yang dicananngkan, **ekonomi terencana sering** kali **dikaitkan dengan sosialisme dan dalam sejarah didukung** dan **diimplementasikan oleh** neraga **sosialis Marx**

32

-Lenisis. Dan yang memeranakan persoalan selanjutnya adalah,akan susah untuk masalah daerah yang memakai cara ekonomi campuran yang menghubungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya kapitalisme dan sosialisme didalam masuk dalam ekonomi campuran, maksudnya yaitu adanya suatu kerjasama antara pasar dan pemerintah yang mengatur peekonomian nasional.Bubarnya komunisme di salahsatu Negara pecahan Uni Soviet pada tahun 1989 ikut membubarkan antara sosialisme dan kapitalisme. Alternatif masyarakat merupakan pandangan oleh setiap orang untuk memastikan suatu pilihan sebagai hal yang masuk akal.terlebih dalam ekonomi politik,penyelidikan yang dilakukan teararah atas seorang yang menjadi pemeran.Pemeran dianggap sebagai pemeran dalam suatu aktivitas ekonomi dan

politik yang berdasarkan atas anggapan utama yang menunjukkan keputusan yang masuk akal secara perorangan di dalam suatu lembaga non-pasar. Akan tetapi, lantaran keistimewaan yang longitudinal, hingga produk yang dihasilkan dari bentuk-bentuk pilihan masyarakat yang berlainan antara satu wilayah ke wilayah lain. 1.2. Teori Dependencia Amatan Dependencia hadir

pada era tahun 60-an di Amerika Latin , atas wujud **perlawanan Dunia Ketiga** . pada pola **modernis Eropasentris**

2

(Hettne,2001:146). Searah dengan pendapat tersebut, pendapat lain juga mengungkapkan bahwa teori yang saling ketergantungan pada hakekatnya ingin menjelaskan masalah

kemunduran negara-negara bekas jajahan dunia ketiga dengan melihatnya dalam konteks universal. (**Mas'ood**

56

,1990:204). Ancangan ini makin mengarah dan merata memfokuskan atas bagian-bagian makro dalam bentuk ekonomi dan politik, bukan hanya itu didalam teori menyebutkan dependensi contohnya, ada yang menyebutkan bahwa bentuk ekonomi politik neo-marxis sangat sukar untuk dibuktikan kebenarannya, pabila hal itu benar bahwa neo-marxis sudah bisa mempercepat pertumbuhan agen dalam bagian analisis ekonomi dan politik dengan melakukan ancangan komperatif dalam kontraks bagian ekonomi dan politik. ancangan tersebut juga mengamati dan membedakan beraneka macam perbedaan antara suatu wilayah dalam aspek ketentraman masyarakat, perkembangan ekonomi dan dependensi bagian yang ada dalam masyarakat. Kondisi ketergantungan merupakan kondisi dimana perekonomian beberapa negara hanya menjadi penerima dari aksi negara di atasnya. Masalah dari ketergantungan atau dependensi terjadi ketika ekonomi dari suatu negara yang memiliki power untuk membuat sesuatu untuk negaranya sendiri, sementara disisi lain negara yang tidak mempunyai power maka akan tetap tergantung kepada negara yang mempunyai power, namun akan tetap ada sisi positif maupun negatif dari hal ini (Theotonio, 1970:231)) Teori dependensi tidak hanya berisikan kritikan yang keras terhadap perkembangan teknologi dan sumber daya dari Eropasentris, tetapi

juga memberikan perspesktif **intelektual alternatif yang** berlandaskan **di dunia ketiga** (hettne, 2001:146). **Teori ini awalnya menjelaskan** masalah **keterbelakangan negara-negara bekas jajahan di dunia ketiga dan melihatnya dalam konteks global melalui** teori **struktural yang** didasarkan **pada** pemikiran dasar tentang **marxis yang** berpatokan **pada materialisme** . Kemudian **teori ini merupakan**

17

hasil dari

keterpurukan pembangunan di dunia ketiga dan **disebabkan oleh faktor internal negara** terkait. 2
Jadi bisa disimpulkan **bahwa teori ini lahir dari dua** pusat, **yang pertama adalah teori marxis**
tentang imperialisme, yang kedua adalah studi tentang pembangunan di negara-negara marginal **yang**
digambarkan melalui pemikiran para

tokoh politik (Budiman, 1995 :46). Pendapat lain dari

Raul Prebisch , mengkaji **ketergantungan berdampak negatif bagi negara** yang terpinggirkan, 2
adanya spesialisasi produksi yang didasarkan pada hal komperatif **bagi negara** yang sudah
maju dengan produksi

pertanian yang semula diharapkan mampu membuat saling ketergantungan pada sebuah negara. Karena barang-barang industri akan lebih mahal dibanding produk pertanian dan dapat mengakibatkan naik secara drastis neraca perdagangan negara-negara agraris. (Ruslin, 2012:117).

Paul Baran pemikir Neo-Marxis berpendapat lain dengan **Marx** mengenai **pembangunan di** 2
negara dunia ketiga, Marx berkata **negara-negara**

dengan metode perdagangan bebas akan memberikan pengaruh sistem kapitalismenya pada negara menengah kebawah yang sedang berkembang dan bertujuan untuk membuat negara itu lebih baik lagi. namun Baran memiliki pendapat lain dan mengatakan kapitalisme dapat menyebabkan negara-negara pra-kapitalis akan menghalang kemajuan

dan akan terus hidup dalam keterbelakangan . Dalam **sistem kapitalis di negara** yang 17
berlandaskan **kapitalis berbeda dengan sistem kapitalis**

yang ada dinegara terpinggirkan. pada negara pinggiran sistem kapitalisme seperti terkena dampak gejala penyakit keterbelakangan dan kelainan dalam pertumbuhan atau biasanya di sebut kretinisme, orang yang di serang dampak ini tetap kerdil dan tidak bisa berkembang. Ini juga

merupakan kerjasama kaum borjuis **di negara kapitalis dengan pejabat di negara pinggiran yang** 2
menghasilkan kebijakan yang menguntungkan modal asing dan borjuis asal **dengan**
mengorbankan kepentingan rakyat dinegara terpinggirkan. Dan **sementara itu dalam deliarnov, andre G**

Frank mewakili pemikir dependencia mengajukan tiga hipotesis dengan mengkaji **pola hubungan metropolis** dan **negara**

satelit. dimana mencoba menggambarkan bagaimana hubungan negara maju dan negara berkembang, negara maju akan tetap maju sedangkan negara berkembang akan tetap seperti itu. sampai pada suatu saat negara berkembang bisa berjalan sendiri untuk memajukan negaranya sendiri tanpa negara maju. namun sebuah situasi akan tetap menghubungkan keduanya karena di masa lampau, dimana ada daerah yang mempunyai kepentingan pribadi/golongan dari para kaum borjuis. Frank bahkan tidak menyetujui pandangan Marxis tentang tahapan revolusi, yakni jika dalam masyarakat feodal diperlukan ada perubahan buruh dahulu yang akan menciptakan rakyat feodal, pra menjalankan perubahan sosialis. Frank mengungkapkan

perubahan yang diperlukan adalah langsung menuju pada sosialisme . Walaupun **berusaha menghilangkan eksploitasi**

2

, namun tetap saja hal tersebut hanya akan mengubah bentuk dari eksploitasi dan

tujuan pada susunan **kapitalis yang terus** berkembang pesat **dan mengeksploitasi sektor pertanian yang** sama **melalui monopoli komersial. (Abraham**

17

,1991:169) Banyak pemikiran Franks yang menjadi tolak ukur tentang

Dependencia yang terkenal radikal mengemukakan satu jalan untuk kemajuan negara-negara marginal untuk maju dan menghilangkan **ketergantungan terhadap negara maju**

2

. (Ruslin, 2012:118). Namun disisi lain, faktanya banyak negara dunia yang mengalami terobosa yang dalam dan sangat bergantung pada negara industri maju terutama ekonomi dunia. Ketika terobosan itu dilakukan terjadi ketidakeisengan ekonomi yang

juga berkaitan dengan hal **lain dalam sistem sosial dan politik negara** marginal, **seperti yang digambarkan Raymond Duvall**

2

. (Mas'ood,1990:206). Gambar 1

**Pola sederhana Teori dependencia I Penetrasi Asing II Distorsi Sektor III Distorsi Ekonomi Internal
IV Distorsi Sosio Politik V Konflik Sosiopolitik V Konflik Sosial**

11

Politik Sumber : Ruslin, 2012:119 Dari skema diatas, terlihat jelas penetrasi luar dan dependensi dari luar mengakibatkan adanya bias dalam jumlah banyak dalam kerangka ekonomi negara miskin yang pada kesempatannya mengakibatkan konflik sesama yang lumayan parah sehingga mendorong terbentuknya otoriter pemerintah di masyarakat yang masih bergantung pada negara.

Penetrasi ini bisa terjadi karena adanya **berbagai cara** yakni **ekonomi, politik, dan kultural** Disaat terjadinya pengempuram **pemikiran pesimistis kalangan dependencia akan dampak yang** diakibatkan **dari pola** hubungan **ekonomi-politik terhadap negara pinggiran** , timbullah pemikiran **dependencia lainnya yang** agak **berbeda dengan pandangan** “prototipe dependencia” **sebelumnya, salah satunya Theotonio Dos Santos, yang lebih** “halus” **dibandingkan pemikiran** “kasar, dogmatif” **ala Frank**

2

.(Siregar, 1999:240) . Theotonio (1970)

justru lebih percaya **pada** berkembangnya **negara pinggiran, menurutnya negara-negara pinggiran** usai **mengadakan hubungan dengan negara-negara pusat masih ada** kesempatan **untuk berkembang. Meskipun** masih berada **dalam konteks ketergantungan** . Theotonio (1970) sebetulnya **menyadari bahwa negara pinggiran** hanyalah khayal **dari negara pusat, justru itu** sebaliknya **yang**

2

membuat keyakinan pada dirinya saat negara kaya

yang menjadi negara **berkembang dan maju maka negara** khayalnya pun **dipastikan akan ikut berkembang dan akan maju juga** , walaupun **dalam** perkembangannya **yang tergantung atau perkembangan**

29

yang selaras. (Frank,1967:167) Menurut ilosois, teori dependensi akan melihat lagi pengertian pembangunan ekonomi, dimana pembangunan bukan harus dideinisikan hanya semata-mata cara menjalankan industrialisasi, pengeluaran (output), serta kenaikan produktivitas, tapi cara menjalankan pembangunan sesuai dengan yang diungkapkan Soemitro pada Deliarnov(Deliarnov,2005:89). sama halnya membentuk pembebasan, yakni kemerdekaan dari kekangan elit- elit ekonomi serta kemerdekaan negara berkembang dari kekangan susunan perekonomi dunia.(Ruslin, 2012:114).

Penggolongan beserta barometer peningkatan ekonomi bermula berdasarkan konsep pembagian kerja Internasional

atas beberapa abad silam yang percayai oleh pakar ekonomi klasik, termasuk orang yang memiliki kedudukan bermamfaat dalam mengambil keputusan perdagangan internasional suatu negara. Konsep ini diatur pada rancangan

keunggulan komparatif (comparative advantages) yang dikuasai **oleh setiap negara** ,sampai **2**
berdampak terbentuknya **spesialisasi produksi** akan **tiap negara** menurut **keuntungan komparatif yang**

dimiliki tiap negara. Oleh sebab adanya spesialisasi tersebut, hingga terbentuklah kegiatan jual beli dalam skala Internasional, dengan anggapan kegiatan jual beli ini diinginkan dapat memberi keuntungan untuk kedua belah pihak. Kedua negara yang telah di kelompokkan tadi dapat bekerja sama dalam kelangsungan kehidupan suatu negara, barang-barang hasil produksi dijual dengan harga murah ke Negara yang menekuni bidang pertanian, begitu juga sebaliknya, hal inilah yang dinamakan keuntungan komparatif Todaro mengemukakan bahwa negara yang mengisolasi dirinya sendiri akan memiliki perkembangan secara ekonomi yang kurang baik jika dibandingkan dengan negara yang membebaskan dirinya dan ikut serta dalam perdagangan bebas (Todaro,1985:383). Akan tetapi faktanya, yang diinginkan semakin didepan, yang terjadi malah jarak yang signifikan dari kedua negara tersebut. Negara yang melakukan produksi industri akan semakin maju atau kaya, namun negara yang melakukan produksi hasil pertanian akan semakin terbelakang atau miskin (Budiman,1995:18). Dengan demikian pembangunan ekonomi yang baik bagi suatu negara adalah pembangunan yang menyatu bersama kegiatan ekonomi, karena memang hakikatnya semua negara akan saling bergantung atau membutuhkan negara lain, dan akan saling menguntungkan jika bisa saling menutupi kekurangan tiap negara. RANGKUMAN Unsur Politik dalam ekonomi maupun sebaliknya banyak mengalami perkembangan dalam Studi Komparatif dengan Sistem Politik kehadiran dan badan demokratis mulai dipermasalahkan dalam satu cara pemerintahan, atas ekonomi kelompok, akan terdapat satu yang dapat melebihi suatu cara ekonomi pasar pada mulanya produksi distribusi sampai konsumsi merupakan sebuah permulaan dari kegiatan ekonomi yang nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melihat adanya berbagai pro dan kontra dalam pengaruh atau perkembangan ekonomi politik. Ada beberapa teori dalam melihat ekonomi politik secara lebih spesifik. Teori Dependencia muncul sejak

era tahun 60-an di Amerika Latin , atas wujud **perlawanan Dunia Ketiga** **2**

. Teori ini mengarah pada sektor ekonomi terfokus makro dalam bentuk ekonomi dan politik, bukan hanya itu didalam teori menyebutkan dependensi contohnya, ada yang menyebutkan bahwa bentuk ekonomi politik neo-marxis sangat sukar untuk dibuktikan kebenarannya, apabila hal itu benar bahwa neo-marxis sudah bisa mempercepat pertumbuhan agen dalam bagian analisis ekonomi dan politik dengan melakukan ancaman komparatif dalam kontrak bagian ekonomi dan politik. Teori ini melihat bagaimana politik bergantung dengan kekuatan ekonomi yang dibangun. Pertanyaan Kunci/Tugas Petunjuk: Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai. 1. Jelaskan teori ketergantungan dalam ekonomi politik menurut Theotonio ? berikan contohnya ! Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi Bab :..... **Nama NIM Program** 5
studi :..... :..... :..... **Tuliskan**
Pemahaman

Saudara

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sebelum **perkuliahan 2. Formulir** 5
ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda **dianggap tidak hadir** dalam **perkuliahan. Formulir**

No 2 Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas Bab :..... Nama NIM Program studi
 :..... :..... :..... Jawablah pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhi **2.** 8
Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda dianggap **tidak**

mengumpulkan tugas.

DAFTAR PUSTAKA Abraham, Francis .1991." **Modernisasi di Dunia Ketiga : Suatu Teori Umum** 2
Pembangunan". Yogyakarta ; Tiara Wacana Budiman,Arief .1995." **Teori Pembangunan Dunia**
Ketiga".Jakarta ;PT **Gramedia**

Hettne,Bjorn.2001."

Teori Pembangunan Dan **Dunia Ketiga".Jakarta** ;Gramedia **Deliarnov** .2005." **Ekonomi** 73
Politik.Jakarta; Erlangga

Heriyono.2013."

Ekonomi Politik Dalam Bisnis".Jurnal Ekonomi Vol.1 No.2 24

Mas'oeed, Mohtar.1990."Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi".Jakarta; LP3ES 57
Ruslin.2012."Relasi **Ekonomi**

POLitik dalam Perspektif Dependencia". SulesanaVol.7 No.2 Theotonio,

Santos.1970."The Sctructure of Dependence". American Economic Review, Vol 60 (2

17

)

Todaro, Michael, P.1985. Economic Development In The Third World. New York; Logman Inc

36

Siregar,A Effendi.1999."Arus Pemikiran Ekonomi Politik". Yogyakarta; Tiara Wacana;1999

Frank,A Gunder. 1967."Capitalism and Development in Latin America".New York; Monthly Review Press

54

BAB IV NEGARA DAN EKONOMI POLITIK

Tujuan Instruksional Khusus Setelah mengikuti **pokok bahasan** pada bab **ini mahasiswa**
dapat: 1

23

. Memperoleh pemahaman implikasi ekonomi politik terhadap negara 2. Memperoleh perkembangan dan hubungan negara di bidang ekonomi 3. Memperoleh perubahan struktur dan ekonomi global 4. Memperoleh pemahaman politik dalam ekonomi Deskripsi Singkat Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh pemahaman tentang adanya implikasi ekonomi politik terhadap negara, perkembangan dan hubungan negara di bidang ekonomi, munculnya perubahan struktur dan ekonomi global serta posisi politik dalam ekonomi. Tugas Mahasiswa harus membaca isi bab IV dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai. 1.1. Implikasi Ekonomi Politik Terhadap Negara Adanya pendapat dari aliran sosial yang berpikiran tentang masalah mengatur dan mengadili adalah urusan pemerintah (Rahayu,2010:14). Semua orang mempunyai cita – cita mengenai adanya peningkatan di dalam kelayakan hidup. Yaitu bertambahnya pencapaian berupa angka dari yang terkecil ke terbesar.Yang paling utama untuk mewujudkan harapan rakyat dalam kelayakan hidup di bidang ekonomi adalah Negara. Kumpulan yang sangat utama adalah keluarga, akan tetapi ada banyak koalisi lain yang mencukupi berbagai keinginan manusia, contohnya saja demi menggapai hajatnya di bagian ekonomi di bangunnya koalisi ekonomi seperti koperasi, kelompok dagang, kelompok nelayan dan sebagainya(Budiardjo, 2008:46-47).Untuk mencukupi keperluan, keinginan maka akan melakukan interaksi dengan manusia lain dengan arah berorganisasi dari berbagai kumpulan anggaran koalisi. Pada aktivitas perkumpulanya dan dalam interaksinya dengan warga masyarakat sisi seberang, pada umumnya sebab manusia membutuhkan beberapa nilai. Dalam mencermati

kelompok warga di sekitarnya, yaitu orang barat, Laswell memberikan delapan nilai, yaitu (Budiardjo, 2008:47) : • Kekuasaan • Kekayaan • Penghormatan • Kesehatan • Kejujuran • Keterampilan • Pendidikan/penerangan • Kasih sayang

Dari hadirnya bermacam mutu dan keinginan yang mesti melakukan itu, berarti manusia menjadi komponen dari bermacam- macam kumpulan sekaligus. pengertian kuasa menurut pemikiran Harold Laswell dan Abraham Kaplan adalah bahwa kuasa adalah suatu interaksi yang mana satu orang atau kumpulan manusia dapat memastikan aktivitas seseorang atau kumpulan lain ke tujuan dari kelompok utama. Pada suatu interaksi kedaulatan pasti ada salah 1 golongan yang lebih mampu dari pihak lain. Jadi, selalu ada interaksi tidak pas. Ketidak pas ini selalu memicu dependensi (dependency); dan lebih tidak seimbang pada interaksi ini, bertambah banyak pula kelakuan ketagihan. Hal ini oleh angkatan ilosof decade 20-an selalu dikatakan sebagai kekuasaan, hegemoni, atau penguasaan . Melihat kearifan dan kehidupan ekonomi melalui strategi kedaulatan bermakna memakai strategi ekonomi politik. Menurut sudut pandang ekonomi klasik, kegiatan aktivitas barter

barang dan jasa untuk semata-mata diarahkan demi **kemakmuran** kebendaan **dan** 14

menekan **pada** kemampuan penerapan **yang didasarkan pada ketersediaan tenaga kerja dan sumberdaya alam. Tenaga kerja bernilai sama dengan kapital dan material dasar produksi, sehingga disebut sumberdaya manusia. Menurut** strategi **ini pasar adalah** badan **sosial** yang pertama, **dan para** pengambil aktiva **yang terlibat di pasarlah yang dapat menentukan apa yang akan** di terapkan. Kegiatan **pasar ini** dikuasai oleh **peran individualisme yang bebas dari** campur tangan **negara, karena** campur tangan **negara dianggap tidak akan membawa** manfaat yang banyak. **Negara**

mempunyai peran untuk menjaga peninggalan kekayaan dan menjaga lingkungan untuk diwarisi ke generasi selanjutnya untuk kenyamanan generasinya dalam urusan ekonomi. Sedang pada sisi konsumsi rumah tangga mereka menikmati hasil yang sudah dibuat dan bagaimana menghasilkan yang maksimal dari hal itu. Tujuan dari peningkatan ekonomi ini bukan hanya dibuat untuk kenyamanan saja namun diperlukan strategi yang lain. Untuk menentukan sebuah staregi yang baik maka diperlukan sebuah susunan yang menyeluruh dalam ekonomi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Negara mempunyai peran yang saling berkaitan, yang mengutamakan beberapa pendekatan yang bisa di jadikan alat untuk membuat kemakmuran (Gondwe, dalam Mas'oe, 2003: 26). Tentu saat masa mengarah ke perkembangan yang lebih maju, membuat ada nya suatu pendekatan antara dan kerjasama yang akan membuat suatu keuntungan yang membuat individual mendapat keuntungan, dan juga menjalan kan jaringan yang seadanya atau terbuka pada saat tertentu harus di ubah dalam transaksi yang berdasarkan hubungan kekuatan. Ekonomi melihat keuntungan berskala individu atau otoriter dan apa yang dilakukan dengan senang hati atau suka sama suka. oleh sebab itu politik menghendaki ada nya transsaksi. (power to coerce) negara mempunyai sumber daya utama yang di miliki perorangan lain nya, ialah power legalitas dan hak untuk membuat harus melakukannya. Sebuah negara mempunyai kekuatan mengatur dan menerapkan berbagai hal yang digunakan untuk kebaikan ekonomi negaranya (Rachbini, 2004: 13 – 16). Dengan demikian situasi ekonomi dapat dilakukan individu ataupun substansi negara, pada masa sebelum rovormasi dimana harta benda nasional dominan berapa padaa orang kaya yang mempunyai relasi dengan elit politik. Misalnya,

Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat BUMN

12

dibentuk serta dikelola oleh Negara di bidang bisnis dan industrial yang bertujuan untuk membantu perekonomian serta membantu mengatasi jumlah pengangguran. Proses konsolidasi BUMN yang dibawah pengawasan dari Kementerian BUMN yaitu dengan gabungan antara dua cabang perusahaan menjadi satu ke kantor utama BUMN ke perusahaan satu ke lainnya agar menjadi lebih mudah. Di BUMN juga diharuskan adanya kesetaraan agar tidak terjadi kesalahan atau kerugian dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam pelaksanaan berbisnis (Akadun,2007:71). Ajaran-ajaran BUMN pada bidang ekonomi mementingkan kemakmuran masyarakatnya maka sebab itu diciptakannya BUMN karna alasannya untuk melayani serta untuk kemakmuran masyarakat. (Suriatmadja,1946:2). Artinya, prinsip-prinsip pengelolaan BUMN yaitu agar tidak hanya untuk mencari keuntungan dan mengutamakan sifat social karna BUMN salah satu penghasilan Negara dan mengatur kebijakan teknisnya selama BUMN terus menerus berjalan, serta usaha yang bersifat tetap seperti Perjan,Perum,dan Persero. Adapun prinsip-prinsip dari badan usaha swasta yaitu mempunyai tujuan mencari keuntungan agar mendapatkan usaha yang bertkembang karena bentuk badan usaha selalu disesuaikan dengan besarnya pengeluaran modal, dan modal usaha itu diatur oleh swasta sendiri agar menjamin kontinuitas perusahaannya serta kerja sama dengan pihak asing berjalan dengan lancar. Dapat diambil kesimpulan bahwa BUMN memiliki Lima prinsip yaitu menyiapkan lapangan kerja untuk masyarakat agar tingkat pengangguran tidak bertambah,memberikan bantuan untuk masyarakat yang mempunyai usaha yang lemah, memberikan sumbangan yang belum dilaksanakan oleh koperasi dalam melayani masyarakat dengan maksimal serta ,menjadikan sumber pendapatan dari non pajak untuk mengisi kas Negara. Kemudian, adanya Privatisasi yang bertujuan dari sisi ekonomi juga memiliki nilai positif, memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan ini memiliki tujuan agar setiap industri memiliki laba yang maksimal, dari sisi ekonomi juga memiliki nilai positif, memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan ini memiliki tujuan agar setiap industri memiliki laba yang maksimal. Metode negara dalam privatisasi khususnya pada BUMN dengan cara sebagian dari keseluruhannya atau seluruhnya, tujuan dari penawaran ini adalah agar BUMN terus bekerja dan berlanjut. Jika pemerintah hanya menjual sebagian saja maka perusahaannya akan menjadi perusahaan patungan antar pemerintah dan swasta, langkah pemerintah membuat perusahaan swasta ini agar BUMN masih bisa diawasi atau dikontrol kinerjanya sebelum diserahkan secara keseluruhan perusahaan ini. Penjualan dengan cara ini adalah penjualan dalam bentuk strategi sedangkan pembelinya disebut investor strategi. Penjualan ini dilakukan dengan cara pemerintah menjual saham kepada seseorang (individu) atau kelompok. Hal tersebut dilakukan agar kinerja perusahaan semakin baik tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Metode privatisasi tersebut di ambil dengan keputusan yang terbaik dari pemerintah pemerintah lebih memilih metode yang mana, tentunya pemerintah sudah mempertimbangkan baik buruknya hasil yang akan didapat (Labib, 2005: 22-25). Adapun yang mendukung adanya privatisasi ialah, Masyarakat menilai kinerja dari BUMN sebagai perusahaan yang tidak mementingkan publik, kinerja serta pelayanannya yang tidak maksimal itu yang membuat masyarakat memberi pandangan negatif terhadap BUMN , penyebabnya karena BUMN menganggap dirinya tidak memiliki pesaing dipasar produk sehingga anggapan mereka seburuk apapun pelayanan mereka masyarakat akan tetap datang karena membutuhkannya. Hal tersebut yang membuat pandangan buruk oleh masyarakat kepada BUMN. Cara pandang masyarakat tersebut akan berubah jika BUMN meningkatkan kinerja serta pelayanannya menjadi lebih baik atau maksimal. Oleh karena itu pemerintah harus meberikan langkah privatisasi kepada BUMN agar lepas kendali dari pemerintah, dengan cara seperti itu mungkin BUMN

dapat memberikan yang terbaik baik di barang maupun jasa (Labib, 2005: 44). Dengan kata lain, Privatisasi artinya menjual saham atau perusahaannya kepada pihak swasta dengan tujuan agar pelayanan serta kinerja BUMN itu sendiri menjadi lebih maksimal karena tidak adanya campur tangan dari pemerintah lagi, sehingga diharapkan BUMN dapat mengatasi kekurangan anggaran belanja negara, diharapkan juga BUMN bisa memberi kemajuan dalam penggunaan (eisien) sumber daya (Labib,2005: 46). Isu-isu pasar modal sangat sensitif terhadap perkembangan di sektor ekonomi terutama pada sektor ekonomi, politik, dan keamanan baik domestik maupun global. Disini dimaksudkan adalah pasar modal yang berkembang di sektor ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Tidak hanya pada sektor ekonomi saja tetapi pasar modal juga mempengaruhi sektor politik dan keamanan sebuah negara. Beberapa isu tersebut adalah kebijakan Federal Reserve yang menaikkan suku bunga, brexit hingga kebijakan pemerintah. Setelah saham pada pasar modal tumbuh signifikan akibat sentimen tax amnesty, IHSG turun karena terpengaruh sentimen dari Amerika Serikat, kondisi ini menunjukkan pasar modal sangat sensitif terhadap isu-isu tersebut. (hartono,2000:99). 1.2. Perkembangan hubungan Negara dengan masyarakat di bidang perekonomian. Pada zaman dahulu,

ilmu politik dan ekonomi adalah ilmu yang tersendiri yang lebih di kenal sebagai ekonomi politik , yaitu pemikiran ide dan

31

gagasan untuk di gunakan memajukan dan meningkat kan kesejahteraan negara inggris dalam menghadapi negara portugis dan negara-negara lain pada abad ke 18 dan 19. Dengan bertumbuh dan berkembang ilmu pengetahuannya pada umumnya, ilmu saling mengkhususkan diri nya masing-masing yaitu ilmu politik dan ilmu ekonomi. (Budiardjo, 2008:32). Negara adalah suatu wilayah atau organisasi yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi yang riil sah dan di turuti dan di taati oleh semua rakyat.(Budiardjo2008:17).Pengenalan politik dimaksudkan

ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu Negara dan

70

apa yang ada pada Negara tersebut baik itu sejarah, tanda dari Negara tersebut maupun tujuan dari Negara tersebut. Menurut Adam Smith ada tiga hubungan negara dengan perekonomian adalah intinya saling menjaga atau mempertahankan segala hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan menjaga barang-barang milik halayak ramai dan agar tetap dalam situasi masyarakat. 1.3. Perubahan struktur ekonomi global dan nasional. Perubahan struktur ekonomi disetiap negara dalam proses pembangunan mempengaruhi ekonomi negara tersebut. Jika semakin tinggi pendapat perkapita

suatu negara maka peranan sektor pertanian akan semakin mengecil sementara itu peranan sektor industri maupun jasa meningkat

7

. Sebenarnya sektor pertanian bisa memajukan negara tersebut dengan mengekspor hasil pertanian yang ada.

Secara garis besar, tahap-tahap yang biasa dilewati **dalam perkembangan suatu negara** atau **daerah dimulai dari tahap** yang kecil **sebelum** menuju ketahap **pembangunan** yang **seimbang**

7

. Disini

kuznetz tidak hanya meneliti **tentang perubahan** kinerja masyarakat **yang** berkerja **diberbagai sektor, tetapi dia juga meneliti perubahan** bantuan dari **berbagai sektor terhadap pendapatan nasional** negara tersebut. **Kuznetz juga** melakukan penyelidikan terhadap **perubahan peranan berbagai sektor industri dalam menyediakan**

38

lapangan pekerjaan.

Perubahan struktur ekonomi ditandai dengan menurunnya **kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja sedangkan sektor industri** menunjukkan **hal sebaliknya yaitu** dengan **adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga**

7

kerja yang ada. Disini Chenery mengatakan untuk melihat

tingkat pertumbuhan ekonomi dan peran **suatu** usaha **dalam menciptakan produksi nasional** bergantung **pada tingkat pendapatan dan jumlah penduduk** yang ada didalam **negara tersebut** .
Semakin **besar pertumbuhan pendapatan suatu daerah dibanding pertumbuhan penduduknya** maka bisa **dikatakan pertumbuhan ekonomi meningkat. Terjadinya perubahan struktur ekonomi juga** bisa **dilihat dari perubahan** kontribusi **setiap sektor terhadap PDB**

7

(produk domestik bruto) dan PDRB(produk domestik regional bruto) nya, dimana sektor ini bisa dibagi menjadi sembilan sektor dan dalam pelajarannya sektor ini

dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier

74

. Terjadinya perubahan struktur ekonomi yang tidak baik berdampak besar pada perekonomian yaitu semakin banyaknya pengangguran yang terjadi dan disebabkan karena perubahan kebutuhan ekonomi tersebut. Banyaknya gangguan disebabkan karena tiidak sesuainya kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Masa peralihan pada

perubahan struktur ekonomi yang kurang baik pada **umumnya memang sering dialami oleh** **negara berkembang**

7

salah satunya Indonesia.

Pertambahan penduduk yang cepat **sekali menyebabkan negara** berkembang **mengalami** **masalah** dalam hal **ketenagakerjaan**

7

. Masalah sulit lainnya yaitu modal yang sedikit dengan banyaknya kesempatan kerja buruh menyebabkan masalah ini sulit diatas (Jhinghan, 1999:519).

Sejak tahun 1993 rudolf straihm telah menelaah **kondisi** dimana **kita hidup dalam sebuah** **dunia** (Strahm,1993:3), **dimana 26% penduduknya (di negara-negara industri blok barat dan** **blok timur**) yang dikuasai **lebih dari 78% produksi, 81% penggunaan energi, 70% pupuk, dan 87 %** **persenjataan dunia. Sementara itu, 74 % penduduk dunia di negara berkembang (di Afrika, Asia, dan Amerika latin) hanya mendapat jatah sekitar seperlima produksi dan kekayaan dunia**

2

. (Strahm, 1993:61). Ketertinggalan

negara-negara berkembang juga terlihat **dari pilar lingkungan hidup yang berada** diantara **ambang kehancuran. Sebesar 42% dari jumlah total hutan tropis di dunia sebelum masa** penjajahan belanda **telah** dirusak **tanpa** adanya perbaikan. **Di afrika barat dan afrika timur** ada **sekitar 72%, di afrika tengah 45%, di Amerika** **tengan dan amerika selatan 37%. Di daerah padat penduduk seperti asia selatan** , hutann **yang telah** punah **sekitar 63 %** , di **asia tenggara (indonesia, malaysia, philipina) sekitar 38 %** (Strahm,1993:63), **disusul**

18

kebakaran hutan kalimantan mengakibatkan kerusakan hutan tropis berjalan terus tanpa dapat **dibendung**

18

(Ruslin, 2012:120). Ketertinggalan dunia ketiga semakin menjadi-jadi karena

dipengaruhi krisis hutang **luar negeri. Di negara dunia ketiga** tidak **ada** pengaruh **lain** **yang lebih besar pengaruhnya dalam perubahan ekonomi politik selain** hutang **luar negerinya**

2

. Hal itu disebabkan karna faktor utama hutang

negara dunia ketiga adalah politik negara-negara industri yang menjual produk yang di ekspornya dengan kredit

2

. Hutang

luar negeri terus berkembang seiring pesatnya gagasan globalisasi. Globalisasi sebagai pemikiran tentu saja tidak

2

datang secara langsung namun melewati fase yang teramat panjang dan sulit. Sekurangnya, gagasan globalisasi yng bertumpu pada pasar bebastelah diuraikan

sejak tahun 1947 ketika GATT (General Agreement Tariff on Trade) dimulai. Dalam aspek sejarah, periode tersebut diawali dan ditandai dengan semakin suksesnya ekonomi negara-negara maju, seperti amerika serikat dan eropa barat, sehingga mereka mulai berikir bahwa untuk melakukan perluasan wilayah kenegara berkembang . Perluasan tersebut jelas saja sulit dilakukan apabila setiap negara masih diberi kekuasaan sendiri melakukan perlindungan terhadap barang dan jasa yang diproduksinya, khas warisan rezim merkantilis. Dengan dasar pemikiran itulah globalisasi dimajukan sebagai bentuk perdagangan dunia, dimana kekuasaan pengaturan negara atas perekonomian domestik sama dipersempit dan dibatasi. Dengan kata lain negara hanya mengurus persoalan non-ekonomi, sedangkan masalah ekonomi (perdagangan internasional) diambil penuh oleh lembaga internasional, antara lain WTO dan IMF. Sehingga tidak diherankan lagi jika pinjaman luar negeri atau hutang luar negeri adalah salah satu "hantu" bagi pembangunan ekonomi negara dunia ketiga saat ini. Beberapa sumber yang mengkaji mengenai pembangunan di negara-negara berkembang melihat persoalan pinjaman luar negeri sebagai pusat penyebab ketertinggalan negara negara dunia ketiga

2

. Utang luar negeri menimbulkan beberapa persoalan diantaranya

memperlebar jurang antara negara miskin dibagian selatan dan negara kaya dibagian utara , pemiskinan penduduk di negara -negara dunia ketiga dan sebagai sebuah bentuk penjajahan baru. Pada tahun

42

tahun 2006 IMF mengatakan bahwa hutang luar negeri negara bagian selatan mencapai 2.207 M USD dan mereka harus membayar sebanyak 495,3 M USD. Dengan jumlah yang cukup besar ini IMF meragukan kemampuan untuk membayar hutang Negara selatan jika dilihat lagi lebih jelas bahwa keseluruhan impor barang sekitar 80% sama dengan hutang mereka. Negara yang paling miskin hanya mampu membayar 34 M USD kepada Negara pemberi pinjaman.

Tidak hanya negara-negara Amerika Latin yang menggantungkan nasibnya terhadap negara maju, beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia juga bernasib sama . Efek **secara politik juga** dikemas **kalangan dependencia dalam Mohtar Mas'ood** (1990), **bahwa** adanya **penetrasi asing ke dalam** perkembangan **ekonomi negara pinggir akan** memperlambat **munculnya demokrasi liberal** , keberadaannya **justu akan semakin memicu menguatnya** pemerintahan yang **kediktatoran. Dimana birokrasi negara dalam mengendalikan pemerintahan dan perusahaan negara yang menguasai berbagai sektor usaha sebagai aktor yang sangat aktif bersama-sama mengkonsolidasi kekuasaan**

. (Ruslin, 2012:121). Akan tetapi

dalam perkembangannya keeksistensian **teori ketergantungan mulai mendapat** perhatian **dan kritik, terutama dari kalangan sosial liberal dan** kalangan **yang beraliran marxis** , begitu pula **penganut teori ketergantungan sendiri. Salah satu kritikan bagi teori ketergantungan dan keterbelakangan**

solah olah tidak dapat

mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejumlah negara dunia ketiga, khususnya NewIndustrializing **Countries (NICs**

) (Browet,1986:43).

Keberhasilan negara- negara industri baru Taiwan,Korea Selatan, Singapura, Hongkong memperkuat kritik terhadap Dependencia . Dijelaskan dalam bukunya **Bill Warren** berjudul **imperialism: a pioneer of Capitalism** bahwa ia **mengkritik** dengan **keras**

Dependencia yaitu faktanya, Negara dependensi memperlihatkan kemajuannya dari segi perkembangan perekonomiannya serta perkembangan industrinya, bahkan sedang menuju kepada arah pembangunan mandiri, Selain itu beliau juga mendukung Marxis dengan alasan

kapitalisme tidak lagi **dapat dicegah dan** telah menginvasi **di seluruh dunia, baru**

kemudian telah sampai pada akhirnya perubahan sosialisme digunakan (Budiman,1995:102). Ketergantungan muncul lebih mengkhawatirkan

karena juga telah berdampak kepada **perubahan nilai** saat **unsur – unsur** pandangan, **gaya hidup, pola konsumsi dan sebagainya telah** menggantikan “kemandirian” **suatu bangsa** **dengan** lihat **pola kultur negara maju** . Sebagian **negara berkembang mengalami** upaya masuk secara **mendalam dan bergantung pada negara maju**

.Upaya masuk secara mendalam

itu terjadi lewat **berbagai cara selain ekonomi, politik, dan** budaya **kini menjadi** kebiasaan **yang** dapat merubah **nilai**

, upaya masuk secara mendalam lewat

politik dan budaya **datang melalui** berbagai **hal** , banyaknya **arus informasi dan** canggihnya **telekomunikasi, melalui** beberapa **paket** bersifat kebendaan **atau** simbol, **seperti buku, program televisi, internet, majalah** dan sebagainya **yang membawa unsur** kebudayaan **industri** dari **barat sehingga mempengaruhi pola**

berikir, tindakan, pandangan,dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman beberapa

negara pinggiran, kesempatan untuk dicampuri budaya **barat ini membuat banyak** masyarakat **mengalami** penurunan **nilai** kebudayaannya sendiri. . **Yang paling** tampak **adalah munculnya pola konsumerisme dikalangan elit dan**

kelas menengah.

Pengusaha lokal lebih banyak menghasilkan barang konsumsi mewah yang memerlukan teknologi **dari impor** contohnya **AC dan** handphone. **Pasar** yang ditujukan **untuk konsumen kelas atas** agak **sempit, karena golongan mereka jumlahnya lebih sedikit** , namun **mempunyai daya beli yang tinggi. Karena** itu **para** pengusaha **lokal sangat berkepentingan untuk memperbesar** peluang di **pasar** kalangan atas **dan tidak tertarik untuk memperluas pasar**

kalangan menengah ataupun bawah. Kondisi ini mengakibatkan adanya ketidakadilan sosial. Versi baru ketergantungan muncul yang tidak hanya berimbas pada bidang ekonomi tetapi juga perubahan nilai kultural dan pola konsumerisme yang dicampuri oleh budaya barat. Secara bertahap melunturkan "kemandirian" bangsa dalam menentukan solusi selanjutnya. (Ruslin, 2012:122). Ketidakseimbangan akan penyaluran penghasilan sangat rentan memicu adanya konflik, dikarenakan sebagian kelompok akan berikiran kelompok lain mendapat bagian lebih

besar sedangkan mereka sendiri memperoleh sedikit penghasilan. **Kondisi ini** dapat **juga** **menjadi** penyebab **besarnya** angka **kejahatan akibat** kemiskinan **yang** terjadi. Dan **ini** **memungkinkan** meningkatnya **tingkat** kesejahteraan **sosial politik**

2

. Akhir – akhir ini

banyak kalangan , juga **termasuk ahli ekonomi Barat mulai** tertarik **sistem ekonomi yang** **ditawarkan oleh Islam sebagai** pondasi dasar aturan ekonomi **baru dunia** . Menurut **Ibnu** **Mariam menegaskan** aturan **baru yang diperlukan harus** berkaca dari **keadilan, pandangan yang** sama **terhadap manusia** serta **moralitas, hal ini sejalan dengan** aturan **ekonomi yang ditawarkan** **Islam** berlandaskan fondasi **yang kuat, terdiri**

2

dari ketauhidan, khilafah, dan keadilan. 1.4. Politik dalam Ekonomi Ada beberapa faktor yang mendorong pendekatan dalam ekonomi, yaitu yang pertama adalah Nilai dari Lingkungan. Sampai pada saat ini tidak ada kejelasan mengenai kerusakan lingkungan dari hasil mendapatkan ekonomi. Sebenarnya akan sangat penting untuk diketahui untuk menimbang untung rugi dari hasil kerusakan hutan tersebut. Sebenarnya ada angka yang membahas akan hal ini namun hanya berupa jumlah hasil produksi dan berapa banyak nilai yang di hasilkan untuk memperbaiki kerusakannya. Hal ini tentu membuat banyak pertanyaan seberapa banyak nilai ekonomi yang dimanfaatkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan? Dan apa mamfaat kalau lingkungan itu di jaga? (Damayanti,2009:96). Penegertian

nilai yang diterima sebagai skema **yang diinginkan dalam literatur ilmu sosial adalah hasil** **pengaruh perilaku. Batasan nilai yang sempit adalah adanya penyusunan yang berbeda antara apa** **yang dibutuhkan dengan apa yang diinginkan, dandengan aapa yang seharusnya dibutuhkan. Nilai-nilai** **tersusun secara hirarki dan mengatur rangsangan kepuasan hati dalam mencapai tujuan kepribadiannya,** **kepribadian sosial dari suatu sistem sosial budaya merupakan syarat dalam susunan kebutuhan, rasa** **hormat terhadap keinginan yang lain , terhadap sekelompok manusia sebagai suatu kehidupan sosial yang** **besar**

21

(Damayanti,2009:98). Ada sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dimana jika dia memiliki posisi diatas maka dia akan memiliki apapun yang diatas. Keberhasilan penggunaan posisi ini cenderung membuat orang tersebut membuat sebuah struktur kekuasaan dan peran dari yang dibawah akan sangat penting dan akan patuh dengan yang

memiliki kekuasaan diatas.namun sistem ini aka nada hanya ketika seseorang masuk dalam sebuah organisasi (Mas'ood, 2003: 30 - 36). Kedua, Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Negara dengan mengandalkan kekuasaan cenderung dengan pemerintahan seorang yang dictator yeang miliki sikap otoriter sehingga mendapat hasil hukum yang mementngkan pihaknya dan mebuat orang hilang kebebasan (Damayanti,2009:97). Kebijakan yang dibuat oleh elit politik akan sangat berpengaruh dengan hasil yangkana didapatkan. Oleh karena itu segala sesuatu harus di perhitungkan dengan sangat matang. Sebuah kebijakan yang baik lahir dari penerapan dan perhitungan. Sebab biasanya pembuatan kebijakan biasanya berpikir bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang terstruktur dan beri petunjuk yang baik. (Damayanti,2009:98). Anthony, Dearden dan Grovindarajanj mempunyai pandangan bahwa

strategi, pengendalian manajemen, pengendalian tugas merupakan tiga elemen terpisah proses perencanaan, pengendalian, namun masing-masing saling berhubungan erat. Menurut mereka, pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan oleh para manajer untuk mempengaruhi para anggota organisasinya agar mengimplementasikan strategi-strategi organisasi. Dalam pandangannya, bidang yang tepat untuk sistem pengendalian manajemen adalah keberhasilan implementasi strategi. Maciariello dan Kirby berpendapat bahwa pandangan Anthony dan koleganya tersebut tidak memperlakukan adaptasi dan inovasi sebagai bagian dari integral proses pengendalian manajemen

22

ekonomi (Andrain, 1992:230–232). menurut Damayanti pada bidang ekonomi pemerintah memiliki peran utnuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang berlangsung. Di tambah lagi pada sector pasar dan pemerintah memiliki hubungan yang kompementer diaman pemerintah sebagai hal yang melakukan tindakan ekonomi yang menjaga agar semuanya terkendali dan menjadi teratur.tidak hanya disisi sector ekonomi pemerintah juga dituntut dengan hal yang lain diantaranya pembangunan sarana dan prasarana (Damayanti,2009:99). RANGKUMAN Politik dalam Ekonomi, Ada beberapa faktor yang mendorong pendekatan dalam ekonomi, yaitu yang pertama adalah Nilai dari Lingkungan. Sampai pada saat ini tidak ada kejelasan mengenai kerusakan lingkungan dari hasil mendapatkan ekonomi. Sebenarnya akan sangat penting untk diketahui untuk menimbang untung rugi dari hasil kerusakan hutan tersebut. Implikasi Ekonomi Politik Terhadap Negara, tidak dapat dilepaskan pengaruhnya dengan jalannya suatu negara yang memiliki kedaulatan. Kedaulatan merupakan kapasitas dalam suatu interaksi sosial, melihat kearifan dan kehidupan ekonomi melalui strategi kedaulatan bermakna memakai strategi ekonomi politik. Negara mempunyai peran untuk menjaga peninggalan kekayaan dan menjaga lingkungan untuk diwarisi ke generasi selanjutnya untuk kenyamanan generasinya dalam urusan ekonomi. Sedang pada sisi konsumsi rumah tangga mereka menikmati hasil yang sudah dibuat dan bagaimana menghasilkan yang maksimal dari hal itu. Misalnya,

Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat BUMN

12

dibentuk serta dikelola oleh Negara di bidang bisnis dan industrial yang bertujuan untuk membantu perekonomian serta membantu mengatasi jumlah pengangguran. Sementara Perkembangan hubungan Negara dengan masyarakat di bidang perekonomian sendiri antara

ilmu politik dan ekonomi adalah **ilmu** yang **tersendiri yang** lebih **di kenal sebagai**
ekonomi politik , yaitu pemikiran ide dan

31

gagasan untuk di gunakan memajukan dan meningkat kan kesejahteraan negara inggris dalam menghadapi negara portugis dan negara-negara lain pada abad ke 18 dan 19. Jalannya suatu negara dapat dikatakan bahwa ekonomi politik juga berjalan. Perubahan struktur ekonomi global dan nasional, Perubahan struktur ekonomi disetiap negara dalam proses pembangunan mempengaruhi ekonomi negara tersebut. Jika semakin tinggi pendapat perkapita

suatu negara maka **peranan sektor pertanian akan semakin mengecil sementara itu peranan**
sektor industri maupun jasa meningkat

7

. Sebenarnya sektor pertanian bisa memajukan negara tersebut dengan mengekspor hasil pertanian yang ada.

Secara garis besar, tahap-tahap yang biasa dilewati **dalam perkembangan suatu negara** atau
daerah dimulai dari tahap yang kecil **sebelum** menuju ketahap **pembangunan** yang
seimbang

7

. Pertanyaan Kunci/Tugas Petunjuk: Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai. 1. Jelaskan implikasi ekonomi politik terhadap negara menurut Labib ? berikan contohnya ! 2. Jelaskan bagaimana peran ekonomi politik dalam negara ? 3. Jelaskan hubungan negara dengan masyarakat menurut budiardjo ? berikan contohnya ! 4. Jelaskan perubahan struktur dan ekonomi global menurut Jhinghan ? berikan contohnya ! 5. Jelaskan posisi politik dalam ekonomi menurut penjelasan Damayanti ? Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi Bab :..... **Nama NIM Program**
studi :..... :..... :..... **Tuliskan**
Pemahaman

5

Saudara

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sebelum **perkuliahan 2. Formulir**
ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda **dianggap tidak hadir** dalam **perkuliahan. Formulir**

5

No 2 Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas Bab : Nama NIM Program studi
: : Jawablah pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir 2. 8
Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi, anda dianggap tidak

mengumpulkan tugas.

DAFTAR PUSTAKA Andrain, Charles F.1992."Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial", Yogyakarta : 51
Tiara Wacana Akadun. M. Pd, 2007

. Administrasi Perusahaan Negara, Alfabeta : Bandung Budiman,Arief.1995."Teori Pembangunan Dunia Ketiga".

Jakarta; PT Gramedia Budiardjo, miriam, 2008, dasar-dasar ilmu politik, jakarta : PT Gramedia 52
Pustaka Utama

. Browet, John, " The Newly Industrializing Countries and Radical Theories of Damayanti,Christy.2009."

Dimensi Kekuasaan Dalam Ekonomi". Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.9 No.1 24

Development", World Development 13, No. 7, 1986

Hartono, Sri redjeki, 2000. Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Mandar Maju : Bandung 67

Jhingan ,M.L.1999, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Terjemahan, Jakarta:PT Raja 7
Graindo Persada

. Labib, Rahmat S, 2005. Privatisasi Dalam Pandangan Islam, Wadi Press : Jakarta

Mas'ood, Muhtar, 2003, Ekonomi Politik, Gajah Mada University Press, Jogjakarta Rachbini, Didik 14
J.2004."Ekonomi Politik ".Jakarta : Granit

Ruslin.2012."Relasi Ekonomi Politik dalam Perspektif Dependencia". SulesanaVol.7

No.2 Rahayu, Siti Kurnia, 2010. Perpajakan Indonesia, graha ilmu : Yogyakarta

19

Strahm, Rudolf H .1999." Kemiskinan Dunia Ketiga". Jakarta; Pustaka Cidesindo

2

Suriatmadja,Ariin, 1986. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan, PT. Gramedia : Jakarta BAB V ISU EKONOMI POLITIK

Tujuan Instruksional Khusus Setelah mengikuti **pokok bahasan** pada bab **ini mahasiswa**
dapat: 1

23

. Memperoleh isu ekonomi politik 2. Memperoleh isu bisnis dalam ekonomi politik Deskripsi Singkat Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh pemahaman tentang isu dalam ekonomi politik beserta contohnya yang memuat kelemahan implementasi dan tantangan pengelolaan dan memperoleh isu bisnis dalam ekonomi politik. Tugas Mahasiswa harus membaca isi bab V dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai. 1.1. Isu Ekonomi Politik Eskalasi perselisihan

pada masa pasca Orde Baru cenderung berkisar **mengenai dampak positif dan negatif akibat tata**
kelola yang bercorak sangat liberal. Dampak positif berupa adanya **akses masyarakat lokal untuk**
ikut melakukan penambangan dan perdagangan, sehingga secara langsung menumbuhkan kemakmuran dan
efek domino perekonomian yang tinggi pasca krisis dan terpuruknya harga lada sebagai komoditas dikenal
lainnya

1

(Erman, 2010 : 72). Pembeneran

atas kerusakan ini menurut kajian membutuhkan waktu yang panjang dan modal isik **maupun**
non isik **yang sangat besar, bahkan** diperkirakan **lebih besar dari valuasi keuntungan yang**
didapat dari tata niaga timah, dengan tingkat keberhasilan yang rendah

1

Mereka yang mengandalkan wilayah pesisir yang berjarak di bawah 4 mil dari garis pantai untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya dengan alat dan metode sederhana, sangat tergantung pada kelestarian ekosistem laut

1

di Bangka kumpulam nelayan yang ikut serta dalam Forum Nelayan Bangka (For Nebak) mengkonsolidasikan rekan-rekan nelayan di seluruh Bangka Belitung bersatu untuk menyuarakan aspirasi peng-hentian segala aktivitas pertambangan di laut yang mengganggu kepentingan mereka

1

keluarnya Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi , No 540 / 40 / DPE /2016 tgl 18

1

/01/2016 terkait arahan pemberhentian sejenak mendapat aksi penolakan dari masyarakat pesisir di sana,

masyarakat meminta kepada gubernur untuk membatalkan segala bentuk tambang laut, mencabut IUP tam-bang laut, menetapkan tata ruang, melakukan renovasi lahan eks tambang laut, dan karakteristik barang publik, sebab sulit untuk membagi atau membatasi keuntungan dan kerugian yang diasosiasikan dengan koalisi pemenang

1

. (Sandy, 2016 : 41-42).

Erwiza Erman kemudian menyim-pulkan bahwa sistem pengelolaan timah baru dibawah rezim Bupati telah memunculkan sebuah 'Negara Bayangan' sejak reformasi digulirkan. Negara bayangan lokal ditandai dengan keterlibatan aktor-aktor dari institusi negara di tingkat lokal dalam ekonomi informal

1

.(Sandy, 2016:42).

Kedua belah pihak mengklaim sama-sama memiliki kewenangan besar dalam mengelola sumber daya pertimahan, PT Timah sebagai alat ekonomi negara di satu sisi, pemegang status quo kuasa pertambangan yang besar berdasar kebijakan lama

1

, (Sandy, 2016:42) Meski sama-sama bermuara pada tujuan terciptanya persamaan hak dalam hal terkait politik, akuntabilitas setempat, dan hak untuk dapat di dengar,

namun kedua pendekatan ini memiliki **dampak implementasi otonomi daerah** yang berbeda. 1

Pilihan pertama lebih membesarkan kewenangan dan partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat lokal, sedang pendekatan kedua lebih kepada upaya efektifitas **dan** efisiensi **penyelenggaraan pemerintahan**

disorientasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam tataran kebijakan. Resistensi terhadap sentralisasi pengelolaan sumber daya timah berhulu dari kegagalan pemerintah pusat pada sebelumnya mengem-balikan kekayaan alam tersebut dalam bentuk transfer kemakmuran kepada Bangka Belitung 1

.(Ibrahim, 2013: 123- 126).

Tujuan utama dari desentralisasi pada kasus tersebut **adalah upaya mendekatkan antara negara dengan rakyat atau masyarakatnya. Maka penting dibangun persepsi bahwa desentralisasi hanyalah sebuah cara atau alat bagi interaksi yang dinamis antara keduanya, baik dalam pengambilan maupun implementasi kebijakan, dan kemashlahatan masyarakat di daerah lah yang menjadi tujuannya** 1

. Kelompok tersebut

adalah perusahaan mitra yang kalah bersaing antar sesamanya untuk memenangkan hak konsesi penambangan KIP di KP laut PT Timah maupun pihak swasta yang tidak bermitra dengan PT Timah, namun sedang dan berupaya mendapatkan IUP pertambangan laut dari Pemerintah Provinsi di luar KP PT Timah, atau bisa jadi swasta yang berciri keduanya 1

Pertimbangan dari Dinas Pertambangan dan Energi lebih utama pada alasan faktor keadaan gahar dan gejala yang berpotensi mengganggu aktivitas pertambangan, menghindari konflik horizontal yang terbuka dan anarkis, bukan pada isu utama kerusakan lingkungan sebagaimana yang disuarakan dalam tuntutan nelayan, karena isu tersebut memang bukan menjadi tupoksi sektor ini, melainkan ada pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung . Hal ini 1

pula yang menjadi penyebab SPS ini menjadi kerdil dan inefektif dalam tataran implementasi. Pemprov Bangka Belitung menunjukkan superiorinya berlandaskan kewenangan otonomi daerah, PT Timah menunjukkan kekuasaannya sebagai sebuah korporasi negara

1

Studi ekonomi politik neoklasik kemudian menemukan bahwa ternyata perilaku aktor negara dan aktor masyarakat adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan keter-belakangan di negara-negara tersebut

1

.(Sandy, 2016:44).

Asumsinya adalah bahwa siapapun yang dapat menjadi patron mengontrol per-timahan maka dia atau mereka lah yang menjadi pengatur dan berkuasa atas aliran keuntungan dan tata kelola, mengatur distribusi keuntungan melalui penguasaan atas kebijakan- kebijakan tata kelola, maupun memegang kuasa pengorganisasian akses dan kontrol atas pertimahan

1

Ancaman aksi saling dukung-mendukung pun tak ayal ramai di media massa. Belum lagi perdebatan antar elit terkait SK ini juga ikut mewarnai polemik penghentian sementara ini. Gubernur dianggap kurang bijaksana dan emosional dalam meng-hentikan operasional tambang laut tersebut

1

Dimana pemerintah dan masyarakat di daerah agresif menuntut hak mereka untuk dapat ikut menikmati eksploitasi timah, pertanyaan yang dapat diajukan dalam kasus ini adalah bagaimana dinamika proses penerbitan SK Gubernur tentang Penghentian Sementara Operasional KIP PT Timah di tiga wilayah pertambangan yang bergejolak

1

? Yakni

sebagai penggambaran atas kaburnya deinisi legal dan ilegal dalam kultur pertambangan dan perdagangan timah di Bangka Belitung . Informaleconomy yang berselaras dalam pengaturan eksploitasi pemanfaatan sumber daya timah, yang kemudian juga memberi pengaruh besar pada pembentukan konfigurasi perpolitikan di tingkat

1

loca.

Karenanya setiap preferensi yang muncul harus diukur dan dipetakan oleh para aktor demi tujuan di atas, hingga di akhir dapat menjadi tolak ukur seberapa besar kadar kepentingan aktor yang menjadi motivasi utama di balik pengambilan sebuah alternatif keputusan atau kebijakan publik

1

. Asumsi

bahwa individu-individu, walau memegang berbagai peran politik yang berbeda, tanpa pengecualian, diasumsikan termotivasi oleh kepentingan pribadi dan siap melakukan pertukaran untuk mengejar kepentingan diri masing-masing

1

Aksi demonstrasi tertib dan kondusif yang dilakukan oleh nelayan di Bangka yang berlangsung selama 5 jam berhasil mencuri perhatian elit politik dan masyarakat di Babel

1

respon tersebut dimanifestasikan dengan terbitnya kebijakan penghentian semen-tara izin operasional pertambangan timah menggunakan Kapal keruk dan KIP (Kapal Isap Produksi) di Wilayah Teluk Kelabat Kabupaten Bangka, Laut Matras Kabupaten Bangka dan Laut Tempilang Kabupaten Bangka Barat

1

. 1.1.1. Kelemahan Implementasi

Kondisi inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan kehidupan nelayan sesungguhnya. Sebab kedua sektor ini (pariwisata pantai dan kelautan yang juga sedang menggeliat

1

pada dasarnya) berlangsung di tempat yang sama, namun kontra produktif, tambang tak dapat bersanding damai selaras dengan kegiatan kelautan dan perikanan

sedangkan lemahnya komitmen dan inkonsistensi adalah penyakit akut yang sering menghinggapi perilaku para aktor ekonomi dan politik di Indonesia

1

namun pilihan mengorbankan kehi-dupan nelayan pesisir yang termarginalisasi oleh eksternalitas negatif pertambangan timah laut, yang meskipun sektor ini juga belum optimal memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah karena berbagai faktor, juga bukan pilihan menyenangkan. Fakta ini jelas kontraproduktif dengan kampanye hijau dan kesadaran ekologis yang digadang-gadang oleh pemerintah daerah saat ini

1

Hasil observasi lapangan menemukan bahwa pertambangan masih berlangsung di Teluk Kelabat dan Laut Tempilang baik oleh PT Timah maupun milik perusahaan mitra yang tetap beroperasi, meskipun jumlahnya tak massif. Ditambah lagi konsekuensi hadirnya TI Apung dan TI tower ilegal yang senantiasa membayang-bayangi di sekitar KIP

1

serta hasil

Wawancara dengan R, pegawai Distamben Babel, anggota tim studi literatur tesis ini menunjukkan saling jegal dan kontra regulasi antara kekuatan Golkar dan PDIP melalui agen- agen dan aktor baik dalam struktur pemerintahan maupun yang terbentuk di masyarakat

1

(Sandy, 2016:47-48). Konigurasi

kelompok yang pro dan kontra pertambangan laut begitu rumit untuk dipetakan. Hal ini disebabkan sikap para aktor pada isu pertambangan ini masih berwajah banyak, tak banyak pihak terutama para pengambil kebijakan yang berani secara tegas mendukung atau menolak pertambangan laut

1

Dalam pertambangan laut oleh pihak swasta atau pengusaha yang menjalankan bisnisnya, tentu bukanlah orang biasa dan sembarangan. Mengingat investasi yang dibutuhkan untuk mengadakan Kapal Keruk dan Kapal Isap Produksi membutuhkan investasi yang sangat besar

1

(Erman, 2007: 242-256).

Penertiban sulit dilakukan karena pengaturan negara bayangan lokal sebagaimana temuan Erwiza Erman masih bercokol dan mengontrol di semua lini stakeholder

1

Fakta ini ditenggarai terjadi akibat semakin terpolarnya para maia bisnis pertimahan ke dalam faksi-faksi yang terpisah-pisah setelah meninggalnya Eko Maulana Ali sebagai patron dan pengatur satu pintu bisnis abu-abu pertimahan

1

1.1.2. Tantangan Tata Kelola Timah

Keuntungan besar bisnis pertimahan baik yang legal apalagi yang ilegal masih lebih menarik untuk dikejar oleh para aktor terkait dibandingkan dengan pengembangan potensi kelautan dan perikanan pesisir yang belum pernah dilakukan kajian valuasi riilnya terhadap perekonomian

1

para politisi dan birokrat yang masih menikmati keuntungan ekonomi politik yang besar dari bisnis timah lebih memilih membiarkan carut marut pertambangan timah yang sedang berada dalam kekosongan hukum tetap berlangsung selama gejolak protes masih dapat diredam dengan regulasi semu pro politik resistensi pertambangan , tekanan dan tuntutan yang

1

disampaikan kepada Pemerintah Daerah berbuah kebijakan pemberhentian sebentar pengoperasian Kapal Keruk dan Kapal Isap Produksi PT Timah dalam cakupan area yang menolak pertambangan laut(Sandy, 2016:50).

Perlu daya yang lebih kuat dan luas serta upaya yang lebih komprehensif untuk menjamin kelestarian ekosistem dan lingkungan laut Bangka Belitung. Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam hal ini harus saling bersinergi mewujudkan visi tata kelola pertambangan timah yang baik, pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang akhirnya secara rasional , agregasi preferensi yang

1

menjadi pilihan rasional dalam keputusan/ kebijakan publik yang dapat dipilih adalah dengan mengakomodir tuntutan kelompok protes dengan menerbitkan regulasi setengah hati memanfaatkan momentum meningkatnya kesadaran ekologis kolektif guna mencari simpati dukungan untuk pencalonan kembali . Politisi secara

1

umum masih sungkan berbicara tentang kesadaran ekologis pada diskursus pertimahan. Namun gubernur adalah salah satu dari yang berani secara gamblang dan frontal berpihak pada tuntutan masyarakat nelayan yang protes dan resisten terhadap pertambangan pesisir

1

ramah lingkungan, memberikan eksternalitas positif bagi masyarakat banyak, berkeadilan serta berkelanjutan

1

Tekanan dan pengawasan pada pemerintah dan pelaku bisnis tambang timah laut harus tetap jadi perhatian utama agar tidak dilindas oleh keserakahan, pengabaian dan ketidakpedulian oleh para politisi pemburu kekuasaan semata, serta dari pihak-pihak yang mendukung melakukan per-tambangan laut secara membabi buta . Disamping itu, aktor kebijakan dalam

1

kasus ini lebih dimotivasi untuk memaksimalkan keuntungan ganda yang hipokrit dan ambivalen agar tetap dapat menguasai akses ekonomi politik pada semua aktor yang terlibat

1

pertukaran akses juga memungkinkan terjadi dalam rangka memaksimalkan tingkat kepuasan dan mem-perkuat kendali atas kuasa. Dalam konflik pertimahan ini, perebutan penguasaan akses terjadi dalam tingkatan dan kepentingan yang lebih kompleks, berwajah banyak, tumpang tindih dan saling memangsa

1

yakni

dalam konteks eksploitasi timah, akses penambangan dan aliran keuntungan masih hanya dinikmati oleh politisi, birokrat, aparat, aktivis, dan aktor-aktor terbatas yang berhimpun dalam lingkaran kekuasaan saja

1

. 1.2. Isu Bisnis Dalam Ekonomi Politik Jika di lihat dari pengertian dari kedua aspek, istilah politics serta business memiliki perbedaan pengertian. Politics bermula dari kata polis yang berarti kota/negara. Oleh karena itu berubah menjadi "politik" yang berkaitan dengan urusan-urusan negara atau kota. Budiardjo menuturkan (1982:8), politik merupakan segala sesuatu aktivitas dalam satu struktur politik (atau negeri) yaitu berkaitan dengan cara penentuan banyak tujuan dari struktur tersebut kemudian menjalankan banyak tujuan itu. sementara pengertian business yaitu suatu badan penyedia barang-barang atau pelayanan yang bermaksud lain untuk mendapatkan keuntungan (griffin dan ebert, 2007: 4). Sehingga di peroleh kesimpulan yaitu sasaran politics adalah sebuah Negara/kawasan sedangkan sasaran suatu business yaitu sebuah perusahaan. (griffin dan ebert, 2007: 4)

Ekonomi politik dapat di ajukan sebagai salah satu bahan dasar perbincangan tentang bisnis dan demokrasi. dalam perdebatannya wacana ekonomi politik sendiri lahir dari asumsi kompromis antara ilmu politik dalam satu perspektif dalam ilmu ekonomi

6

. untuk sampai pada topik actual yang akan di bahas dalam tulisan ini khusus nya bisnis dan demokrasi menggulas singkat pokok pokok ekonomi politik sebagai wacana sekiranya menarik di sampaikan. Studi ekonomi ialah satu dari ilmu/diisiplin social yang mana menelaah kegiatan orang yang mana berkaitan sama pembuatan, perilakunya orang didalam menentukan masalah ekonomi inti yang makmur ada nya ketidak-imbangan dari keperluan manusianya yang tiada terpaku dengan segala yang berkaitan dengan kepuasan keinginan. Dalam keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter. (Heriyono, 2013:97-98). Akan tetapi dalam berbagai aspek, politik dan bisnis justru banyak sekali kaitannya atau hubungannya. Hubungan kesatu, selaku suatu ilmu/studi. Jika business diasumsikan terkait didalam bagian pengkajian ilmu/studiekonomi sehingga di sejarah hingga saat ini di temukan bidang/bagian studi ekonomi yang terkait politik. Suatu bagian studitersebut berusaha menyatukan penganalisaan dari kebijakan dinegara untuk menaikkan tingkat kesejahteraannya masyarakat. Hingga saat ini ilmu/studi politics & ilmu/studi ekonominya berubah jadi bidang/bagian studi yang terpisah meskipun demikian pengkajian studi ekonomi yang terkait

politik terus terdapat hingga saat ini. (Budiardjo, 1982:8). Hubungan yang kedua, suatu perusahaan yang menjadi organisasi suatu bisnis mempunyai beberapa

faktor faktor yang akan mempengaruhi dari luar organisasi yang di maksud lingkungan

10

. Kaitan politics and business (social environment). Ruang lingkup pekerjaan adalah ruang lingkup yang banyak memberi pengaruh pada organisasi/badan dengan cara langsung misalnya, pemilik/yang memilikinya, pemasok/agen, pelanggan/konsumen serta para pekerja. Lain halnya dengan ruang lingkup umum/publik merupakan ruang lingkup yang memberikan efek yang secara tak langsung kepada organisasi/badan. Beberapa ruang lingkup secara tidak langsung (so-cietal environment) memberikan pengaruh terhadap organisasi/badan business yaitu ruang lingkup politics. Interaksi sosial memiliki fungsi dan tujuan berinteraksi secara sosial, hubungan/kaitan sosial yang secara dinamis/aktif melibatkan hubungan antar perorangan, tetapi sebutan ekonomi yang berkaitan dengan politik sebenarnya dasar nya kaitan dari ke-2 bidang/ cakupan ekonomi serta politics, awalnya banyak berfokus pada ajaran tuk mengelola pemerintahan.tapi inti nya didalam ajaran/ aspek ekonominya terdapat pentingnya perpolitikan. Kepentingan/ daya tarik politics memiliki kecendrungan tidak akan melemah pada tarikan ekonomi,dan biasa nya menggunakan data kuantitatif dan kualitatif.Kata-kata yang bermula berdasarkan persamaan sering berkomsumsi,dari satu perbahasaan spesiik mengikuti system golongan semantik dalam hal linguiistik berfungsi semata-mata tuk mempelajari arti kata-kata,untuk manajemen ekspor impor ini semakin di butuh kan hamper seluruh dunia sebagai bisnis yang vital bagi Negara,maka Negara yang di temukan di Negara ideology. Dalam terlaksananya perkawinan/pernikahan sebuah lembaga/badan perkawinan/pernikahan yangmana mengurus hubungan antar suami-istri dalam hal yuridis ataupun religious yang nantinya hubungan itu sah/resmi dalam hal agama,hokum,serta tak terlanggar norma-norma hokum kelaziman setempat yang terdapat dimasyarakat,dalam melakukan aksi ekonomi sangat beragam akibat motof ekonomi yang di hasil kan berlatar belakang berbeda beda. Hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi yang hakekat nya ialah mengetahui hubungan timbale balik diantara kepentingan ekonomi,dan demikian orang kaya atau sudah bosan memiliki harta nya maka dia akan pindah ke arah politik.(Heriyono, 2013:98). Masalah tersebut adalah penyebab terjadi nya turun nya ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap DPR banyak pengusaha yang menjadi legislator perlemen saat ini,untuk menggatahui apa sesungguhnya daya tarik menjadi anggota legislatif,saat calon(yang belum menjadi) kepala daerah itu terpilih(menang) maka memudah kan ekonomi business projek dan pengusaha dan motif/sebab diekonomi dan dipolitik ada 2hal yang tidak sama tapi mudah kalau di pisah kan karna ilmu-ilmu itu sering terjadinya hubungan yang sangat penting.(Heriyono, 2013:98-99). Dalam persoalan

ekonomi politik ini Caporaso dan Levine, Theories of political economy , mengemukakan salah satu hal yang jarang disampaikan ialah bahwa

6

ekonmi politics tersebut pada dasarnya dilandaskan dipemisahan dari ilmu-ilmu politics dan ilmu-ilmu ekonomi. Artinya jika keduanya digabungkan dari segi konsep, sebenarnya ekonmi politics tidka bisa dilihat sesuai penghubungan dari 2 jenis/hal berbeda. Dari pengertian tersebut, sebenarnya politik tidak benar- benar

terpisah dengan ekonomi dan sebaliknya. Dapat dengan mudah ditemui adanya distribusi barang dan jasa dalam jalur politik dan sebaliknya adanya factor- faktor politik dalam mekanisme dan kelembagaan ekonomi. Ilmu -ilmu ekonomi serta ilmu -ilmu politics berbeda dan terpisahkan dengan yang lain dalam hubungan analisa dan pendekatannya yang melekat didalam keduanya .Kontek teoritis diantara keduanya terkadang sudah ada dengan sendiri tergantung pokok permasalahan yang disampaikan. Fleksibilitas seperti ini pada akhirnya justru memberikan kontribusi kepada tiap-tiap perspektif untuk memperkaya diri

didalam pendekatannya.(Heriyono, 2013:99).

Bisnis dan demokrasi ialah contoh topik makro yang bisa dianalisis melewati pendekatan ekonomi dan politik. Demokrasi dalam analisis terkini umumnya memasuki permasalahan-permasalahan ekonomi, bahkan dalam hubungan mikro ekonomi sekalipun, sebagai bahan berperan besar mempengaruhi pertumbuhan suatu masyarakat. Demokrasi yang secara umum dikenal sebagai

terkonsep pemerintahan rakyat/masyarakat oleh rakyat/masyarakat serta untuk rakyat/masyarakat didalam perspektif representasi politik pemerintah

dalam kesadaran terkini menjadikan ekonomi dan bisnis sebagai bagian utama yang berdampak besar. dalam analisis demokrasi, bisnis bahkan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur (dan bahkan pilar) berhasil tidaknya penerapan demokrasi pada suatu Negara. Dalam pandangan demokrasi ,bisnis menjadi ukuran bagaimana penerapan demokrasi yang dilaksanakan melewati kebijakan publik yang ditentukan oleh Negara. Begitu juga dalam pandangan sektor bisnis tiap-tiap mempunyai ciri yang berbeda

beda dalam menempatkan posisi pilar demokrasi walau dapat ditarik kesamaan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan .Dasar ekonomi politik dalam perbincangan tema bisnis

dan demokrasi, menghasilkan proposi-proposisi (hipotesis) dalam menentukan tujuan terakhir melalui proses tukar sumber non- ekonomi (politics social) serta bersifat ekonomi. Jauh lebih penting adalah bagaimana sistem-sistem tersebut bisa diperbaiki dan disempurnakan kinerjanya untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat. (Heriyono, 2013:109-110). Dengan mengakomodasi kajian semacam

ini akan menjauhkan diri dari keterjebakan pengertian **yang parsial. Analisa politik tidak** dilaksanakan **secara membabi-butu dengan** tidak memperdulikan **dimensi-dimensi** lainnya **yang secara nyata memberikan** dampak **besar. begitu** juga **dengan** kajian **ekonomi, tidak** dapat **bekerja dengan** tidak memperdulikan factor- **faktor politik terjadi**

6

. (Heriyono, 2013:100). Hubungan yang keempat, pelaku politik yang berasal dari aktor bisnis. Hal ini sering dijumpai di banyak negara seperti Indonesia. Sesudah Indonesia berada pada masa Orde Baru banyak aktor bisnis yang datang menghampiri. Jalan tersingkat adalah dengan menjabat sebagai keanggotaan Golongan Karya (Golkar) untuk perpolitikan masa Orde-Baru. Sebagai anggota dari Partai perpolitikan maka harapannya bisnis bisa “terlindungi” berhasil serta apabila berbasib baik maka jabatannya dipolitik seperti Menteri akan diperoleh. Seperti yang dialami Bob Hasan, yang mana dilantik oleh Soeharto (mantan presiden) jadi Menteri Perindustrian Perdagangan dikabinet Soeharto th.1998 namun hanya menjabat selama dua bulan(Maret-Mei 1998) akibat lengsernya Soeharto dibulan Mei 1998. 1.2.1. Pergulatan Bisnis Politik Indonesia Masa pelaksanaan Pemilihan presiden 2009 dahulu, SBY- Boediono di tuduh menjadi pengikut neo-liberalisme(neolib) oleh pesaing nya sepasang Mega - Prabowo yang mana pasangan terakhir ini melakukan untuk menarik simpati rakyat dengan mengumumkan pemahaman ekonomi terhadap rakyatnya. Kubu SBY dan Boediono menolak tuduhan tersebut dan mengatakan jika sebenarnya ‘mereka’ melaksanakan ekonomi-pasar namun sesuatu itu juga diterima secara baik oleh masyarakat. Perbisnis profesional mungkin akan mendorong SBY dan Boediono dikarenakan pebisnis umumnya akan suka terhadap ekonomi berbasis persaingan pasar-bebas. Walaupun terdapat pebisnis jadi ‘korban pasar-bebas’ berarti bisnis tersebut tidak berhasil, sehingga menjadikan pebisnis banyak yang sukses. Tentunya juga para-pebisnis mempertanyakan perekonomian rakyat yang mana prabowo katakan, itukah sosialisme?? Tidak salah mengenai prinsip-prinsip persaingan-pasar dan segala pihak-pihak ikut menjalankan berbagai aturan dan peraturan yang berlaku (Mubyarto, 1993:39) Pebisnis menginginkan politikus serta yang lainnya , Perusahaan/industri merupakan organisasi business yang tentunya tidak sendiri saja dijalankan. Masalah ada serta terus tidak lepas sehingga terus bergantung pada berbagai hal. Perusahaan/industri membutuhkan pelanggan agar beli barang- barangnya. Perusahaan/industri butuh pemasokan barang-barang, perusahaan pasti butuh peranan pemerintahan selaku kelembagaan yang memiliki wewenang pembuatan peraturan terkait perbisnis. Contohnya perpajakan diperusahaan di tetapkan pemerintahan wajib memikirkan hal perolehan dari perusahaannya serta pemerintahan. Hal-hal perbisnis ekspor/impor, peraturan dibuatkan pemerintahan semestinya tidak akan memperhambat perusahaannya melaksanakan aktivitas ekspor/impor (Mubyarto, 1993) Didalam suatu hal-hal kepentingannya perbisnis, pebisnis negara indonesia sekaligus akan berrusan ke politikus. Politikus tersebut merupakan seseorang yang mana telah jadi anggota-dewan perwakilan-rakyat. Setelah di era-reformasi, sehingga tugas dan tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat menjadi institusi-politik yaitu lembaga-legislasi yang mengalami peningkatan.

DPR bukan macan omong **seperti pada era soeharto , banyak sekali** pelaksanaan bernegars **yang harus melewati atau bahkan** mendapatkan **izin DPR**

10

. Bagi kepentingann perbisnisan, para pebisnis-pebisnis seringkali melaksanakan usaha yang dapat mempengaruhi pada pihak (anggota) DPR. Seringkali melakukan lobi yang dilakukannya kelewatan batasnya salah satunya dengan cara memberi imbalan pada anggotaan Dewan Perwakilan Rakyat itu kasus-kasus menyeretnya

AL.Amin.Nasution, Sarjan.Tahir, Yusuf.Emir.Faisal, Abdul .Hdi. Djamal .Dn. Bulyan.Royan

10

menuju pengadilan karna di tuduh melakukan KKN. Haal-hal itu bisa ada dikarenakan pebisnis-pebisnis ada kepentingan dengan projeknya pemerintahan berusahnyaa melancarkan perizinan projeknya melalui hal membeli imbalankepada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. Al-Amin di tuduh menerima imbalan oleh sekretaris-daerah(sekda) Kabupaten. Bintang-Azirwan. Tahir dengan Yusuf Faisal diitnah mendapatkan hasil dari masalah pengalihan manfaat hutan mangrove jadi perlabuhan diTanjung.Api-api, Musi-Banyuasin, Sumatera-Selatan. Masalah ini disangkutpautkan oleh seseorang dari dunia bisnis yaitu Chandra Antonio Tan (Chandra Antony), pemimpin PT Chandra Tex, jadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dalam membangun jalan di pelabuhan Tanjung Api-api. Uang untuk memberikan sogokan kepada para bagian DPR berasal dari kantong pribadi Chandra Antony. Sedangkan para bagian DPR Bulyan Royan terperangkap tudingan penggelapan disebabkan oleh penerimaan hasil dari sogokan dari seseorang di dunia bisnis yaitu Dedi Suwarsono, pemimpin PT. Bina Mina Karya Perkasa dari masalah penyediaan dua puluh item Kapal- kapal Patroli untuk Dept.Perhubungan. Masalah Abdul Hadi Djamal pula melibatkan pebisnis-pebisnis Hantjo Kurniawan yangmana di tuding menyogok sebagian kaum DPR untuk memperoleh program dana kebijakan pemerintah didalam membangun dermaga di wilayah Indonesia Timur. Jelas saja bukan semua aktivitas semacam itu bisa memberikan fakta namun masalah-masalah itu memberikan kenyataan kalau DPR tidaklah institute yang baik sampai sesudah masa reformasi. Aktivitas komunikasi politik dalam keperluan bidang usaha bukan hanya dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam melainkan juga oleh pelaku bisnis luar negeri, lebih-lebih yang bersangkutan pada program-program pemerintah. Kepemimpinan Soeharto dahulu sudah melihatkan perusahaan Jepang yang memenangkan penawaran program generator listrik menaklukkan lawannya perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Karena aktivitas komuikasi dari Presiden Biil Clinton terhadap Soeharto, alhasil penawaran dilakukan lagi dan yang didapat dua generator listrik diberi dengan adil satu untuk Jepang dan satu untuk Amerika Serikat. Sama juga masalahnya pada saat mempermasalahkan tentang melanjutkan sewa PT Freeport beberapa masa lalu, hingga bagian dari pemerintah AS melakukan aktivitas komunikasi kepada Pemerintah Indonesia agar selalu melanjutkan sewa PT Freeport di wilayah Irian Jaya pada masa itu. Pelaku politik pun memerlukan fungsi dari pelaku bisnis dalam kegiatan politik yang mereka kerjakan. Partai politik dikawasan mereka berada memerlukan uang untuk melaksanakan program partai politik itu. Keperluan uang yang tinggi bukan hanya dapat ditanggung oleh penyumbang dari dalam partai bahkan untuk menyambut Pileg dan Pilpres. Di dalam masalah ini pemberian yang berasal dari bagian luar amat diperlukan dan kebanyakan yang siap memberikan sumbagan yang besar yaitu para pelaku bisnis yang sangat kaya. Masalah serupa ini emang diperbolehkan sama Undang- Undang serasi dengan peraturan yang resmi dalam UU itu. Pasti saja pemberian dari pelaku bisnis itu mempunyai tujuan supaya kandidat yang mereka dukung berhasil dan kemudian dapat membantu usaha mereka. Pada zaman Orde Baru, Golkar (pada saat itu bukan Partai Golkar namanya) diketahui mempunyai uang yang sangat banyak. Tidak perlu bingung karena pada zaman itu sangat berimpah usahawan yang berada di sekitar partai Golkar. Dapat dikatakan,

Mochtar Ryadi, Sudono Salim, Bob Hasan, Prayogo Pangestu, Probo Sutedjo, Sudwikatmono dll.

10

Yang

mempunyai hubungan politics bersama Golongan karya(golkar). Terkait dengan usaha Pilpres 2009. Tiga pasang kandidat presiden melimpahkan dana yang sangat besar untuk melakukan gerakan. Tiga pasang kandidat memiliki penyumbang tersendiri yang para penyumbang tersebut menginginkan para pasang kandidat itu memenangkan pilpres. pemberian dari instansi serasi dengan peraturan UU Pilpres No. 42/2008 dikasi batas tertinggi 5 milyar setiap instansi. Jadi, dalam hal ini baik itu pebisnis sekaligus politikus dengan mendapatkan keberhasilan dalam prestasi bisnisnya sebagian pembisnis mulai masuk ke dunia politik. hal ini bersifat mendunia dalam aerti telah ada di berbagai Negara. pada mulanya pebisnis yang lalu masuk kedunia politik Indonesia diawali pada jaman kepemimpinan mantan presiden soeharto dengan Golkar sebagai partai politiknya. Keberhasilan Golkar dalam hal tersebut menjadikan banyak pebisnis tertarik untuk menjadi anggota Golkar dan lalu menjadi orang politik dengan tokoh Golkar yaitu dengan aktivitas bisnisnya tetap terlaksana. Dikenal dengan

fahmi idris, aburizal bakrie, jusuf kalla, fadel, mohammad , ariin panigoro, siswono

10

yudhohusodo dan lain lain

. Dapat dikatakan alasan pebisnis lalu memilih dunia politik ialah sebagai berikut: 1. Pebisnis, yang berhasil tentu mempunyai materi yang lebih tapi tidak memiliki kekuatan atau hak didalam negaranya. Maka menjadikan menjabat di negara mendapatkan 2 aspek sekaligus yaitu uang dan kekayaan. 2. Bisnisnya, terus merosot lalu memulai dengan waktu penuh didalam politik dengan keberhasilan selanjutnya. Mungkin saja fadel mohammad dapat masuk dengan kelompok tersebut dikarenakan sebelumnya jadi gubernur digorontalo, keefektivitasan kelompok kerjasama batara, di pegangnya tidak terlalu baik. Sebagian besar pebisnis di Indonesia yang juga orang politik dapat memenuhi keberhasilan dengan dua ruang yang di jalannya. Setelah jaman reformasi sebagian pebisnis masuk ke dunia politik lalu jadi keanggotaan politics tetapi golongan karya (golkar) tidak, juga pasti jadi prioritas pertama dikarenakan kemungkinan pebisnis tersebut beropini jika golongan karya(golkar) merupakan saat yang sudah berlalu. Soetrisno. Biasaya para pebisnis terjun ke parpol disambut sukacita melalui partai politik yang terkait. Alasannya tentu saja soal dana. Partai politik memerlukan dana yang sangat banyak untuk menjalankan partai tersebut dan memiliki anggota yang berhasil menjadi pebisnis dapat diharapkan menjadi penyumbang dalam partai. Ada beberapa tipe pelaku bisnis yang masuk kepolitik lalu mendapat kerja dipolitik yang baik hingga sanggup untuk menjabat sebagai Wakil presiden, Menteri, Ketua Partai Politik, Gubernur, Bupati, dan Ketua Lembaga Tinggi Negara, yaitu : 1. Pelaku bisnis yang masuk ke wilayah perpolitikan sedari awal hingga perpolitikan dan perbisnisannya dikerjakan dengan serentak lalu akhirnya perpolitikannya besar. Jenis tersebut seperti, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Fahmi Idris, Fadel Muhammad, Jusuf Kalla 2. Pelaku bisnis jika masuk kedalam wilayah perpolitikan tuk ikutserta pemilihan kepala daerah pada level prov/kabupaten/ kota. Sebagaimana yang kita ketahui, agar dapat menempati kedudukan sebagai seorang gubernur (Gub), walikota ataupun bupati jadi orang tersebut wajib mendapatkan pendukung yaitu parpol walaupun kini ada peluang tuk jadi calon-calon independent. Maka seseorang pengusaha memiliki kesempatan baik tuk mendapatkan

dukungan-dukungan partai-partai politik sadar bahwa pengusaha itu memiliki modal untuk membiayai pencalonannya dan kampanye. Jelas saja tidak semua pengusaha berhasil menjuarai pilkada namun saat ini tidak sedikit gubernur/bupati/walikota memiliki background pengusaha. Selanjutnya akan ditampilkan biografi beberapa orang pengusaha yang akan masuk ke dalam dunia politik sehingga memperoleh sebutan pebisnis yang politikus atau politikus yang juga pebisnis. Misalnya, Henry Rose Perot, seorang pengusaha Amerika Serikat dari Texas, kota kelahirannya. Karier usahanya diawali saat ia membangun Electronic Data System (EDS) th.1962. Lalu dia menjualkan EDS pada General Motors th.1984 serta membangun Perot System pada th.1988. Hartanya diperkirakan sebanyak USD.5M th.2008 bersumber dari Forbes magazine serta menempatkan posisinya menjadi yang ter-kaya pada peringkat ke-72 di Amerika Serikat. Selama karier perpolitikannya Ross Perot sempat ikut pemilihan-presiden Amerika Serikat th.1992 menjadi calonan independent, kampanye-nya perot memakan biaya sebanyak USD 65,4juta yang mana uang pribadinya. Saat th.1996,Perot membuat parpol Reform Party agendanya nanti dimanfaatkan untuk sarana perpolitikannya di pemilihan presiden Amerika Serikat th.1996. Tetapi faktanya Perot jadi caloon independent serta pollingnya didapatkannya di pemilihan presiden merosot jadi 8% popular vote serta Perot tidak berhasil jadi Presiden Amerika Serikat oleh jaalur independent. Walaupun Perot sangat kaya-raya tapi pada pemilihan presiden Amerika Serikat th.1996 ia mempersilahkan penyumbang untuk menyumbang kampanyenya. Thaksin Sinawarta. Dilahirkan tgl 26/07/1949 di Chiang Mai. Sebenarnya karier pertamanya Thaksin ialah jadi seorangan perwira- polisi. Jabatan terakhir ialah letnan colonel kepolisian saat awal pensiun th.1987. Ia telah menjalankan bisnisnya sedari di kepolisian pada business bioskop. Dibangunnya apartemen serta took sutra. Sejak th.1986, dia mengawali karier usahanya dengan membangun Advance Info Service (AIS) dimulai bisnisnya menjadi perusahaan raental computer. Di th.1989 ia membangun Shinawatra.Data.Com yang beroperasi pada data-data networking-service, dan saat ini disebut Advance Data Network. Usaha Thaksin lalu mengalami kemajuan yang sangat cepat serta menyentuh berbagai bidang-bidang semacam bisnis-bisnis satellite, telpon seluler, permultimediaan serta perbaankan. Lalu ketika berhasil pada bisnisnya kemudain Thaksin masuk dalam perpolitikan. Sejak 1994 dia Palang Dharma Party (PDP). Dia lalu menjabat kepemimpinan PDP serta melewati dipartai tersebut dia menjabat Deputy Perdana Menteri Thailand. Dikarenakan suatu dan lain halnya Thaksin dengn teman- temannya di 1998 membangun parpol lagi yang disebut Thai-Rak memiliki makna Thai-Cinta-Thai. Di 2010 Thaksin menggapai puncak Karier perpolitikannya saat jadi Perdana Menteri Thailand. Posisi tersebut dijabatnya hingga 2006 pada saat militere merebut kekuasaan Thaksin. Tuduhan-tuduhan diberikan ke Thaksin ialah seperti korupsi-korupsi yang sangat banyak serta akibatnya Thaksin pergi keluar negri agar mengelak dari kepengadilan atas dirinya- sendiri. Masa ini Thaksin pilih menetap di inggris serta tak memiliki keberanian untuk kembali ke-Thailand. Di inggris Thaksin pernah jadi bos sebuah klub sepak bolak 'Manchester City' tapi kemudian ia menjualnya ke sebuah kelompok pengusaha-pegusaha asal arab Di Indonesia, H. Muhammad Jusuf Kalla yang memulai usaha sejak NV Hadji Kalla Tranding Company dibangun oleh ayah nya, H. Kalla pada 1965 lalu diturunkan padanya. Pada 1968 JK menduduki jabatan Direktur Utama NV Hadji Kalla. NV Hadji Kalla makin meningkat dibawah kepemimpinannya JK dan berkembang diberbagai sektor-sektor dibisnis, saat

ini bisnis NV Hadji Kalla meliputi bisnis - bisnis perdagangan-mobil, konstruksi - konstruksi bangunan, kapal- perkapalan, real -estate, transport, perternakan udang -udang, iklan- perikanan, kelapa sawit

10

serta dalam hal pertelekomunikasian. JK pula memiliki bisnis-bisnis lain seperti Group Bukaka. Disiplin ilmu sejatinya tentu tidak dapat

berdiri sendiri dan **harus terkait dengan** berbagai **ilmu** lain. Seperti **ilmu politik** yang **10**
berkaitan pula **dengan**

ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, filsafat, hukum, bisnis, ekonomi, dll. Isu tentang perekonomian juga jadi satu isu politik ataupun tidak. Dalam agenda pembicaraan pada

Pertemuan APEC yang notabennya **adalah forum ekonomi** juga beberapa **kali memasukkan** **10**
isu terorisme

-terorisme tersebut. Pada kampanye-kampanye calon-calon presiden, permasalahan perekonomian juga telah jadi permasalahan terpenting didalam kampanye-kampanye perpolitikan dikarenakan masyarakat mengharapkan pemimpinnya kelak sanggup dan memiliki kemampuan peningkatan taraf-taraf hidup dimasyarakat.

Kebijakan ekonomi dari **SBY langsung dirasakan** oleh masyarakat **seperti Bantuan** **10**
Langsung Tunai atau (**BLT**), **penurunan harga BBM, sekolah gratis dan kredit usaha mandiri**

merupakan kekuatan SBY yang mana diakui oleh pesaingnya sangat sulit untuk dikalahkan. Untuk para pebisnis-pebisnis, kestabilan di perpolitikan sangatlah berguna karena banyaknya jumlah intervensi yang ditanamkan. Kestabilan di perpolitikan tentu menjadi jaminan akan adanya kestabilan perekonomian. RANGKUMAN Ekonomi politik yang menarik garis lurus aktivitas perpolitikan dengan perekonomian dalam suatu tatanan sistem kedaulatan dan sebagai salah satu alat menjalankan pemerintahan suatu negara juga untuk mencapai kepentingan-kepentingan dalam dan luar negerinya telah melahirkan isu ekonomi politik. Pada eskalasi perselisihan

pada masa pasca Orde Baru cenderung **berkisar mengenai dampak positif dan negatif akibat tata** **1**
kelola yang bercorak sangat liberal. Dampak positif berupa adanya **akses masyarakat lokal untuk**
ikut melakukan penambangan dan perdagangan

, pembenaran

atas kerusakan ini menurut kajian membutuhkan waktu yang panjang dan modal isik **maupun** **1**
non isik **yang sangat besar, bahkan** diperkirakan **lebih besar dari valuasi keuntungan yang**
didapat dari tata niaga timah, dengan tingkat keberhasilan yang rendah

. Hadirnya isu ekonomi politik pula memunculkan power center yakni bisnis memuat perdagangan dan segala aktivitas komersil yang menguntungkan. Jika di lihat dari pengertian dari kedua aspek, istilah politics serta business memiliki perbedaan pengertian. Politics bermuladaripada suati istilah yaitu "polis" yang di dalam perbahaannegara yunani berartikota/negara. Maka jalannya bisnis dapat digerakkan oleh kekuatan politik dan kuatnya suatu kekuasaan juga dipengaruhi oleh kekuatan bisnis sebagai suatu pondasi dalam mencapai tujuan. Pertanyaan Kunci/Tugas Petunjuk: Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai. 1. Apa penyebab munculnya isu ekonomi politik menurut Erman ? berikan contohnya ! 2. Apa yang dimaksud dengan politik dan bisnis menurut Griffin dan Ebert ? berikan contohnya !

Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi Bab :..... Nama NIM Program 5
studi :..... :..... :..... Tuliskan
Pemahaman

Saudara

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir **2.** 8
Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda dianggap **tidak**

mengumpulkan tugas. Formulir No 2 Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas Bab :.....
 Nama NIM Program studi :..... :..... :..... Jawablah
 pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir **2.** 8
Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda dianggap **tidak**

mengumpulkan tugas.

DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam , 1982, **Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta** 68

Erman, E. 2010. Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. LIPI Press, 1
Jurnal Masyarakat Indonesia Edisi XXXVI/No.2/2010

. Erman, E. 2007. "Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka dalam Politik Lokal di Indonesia"(ed) Nordholt dan Klinken. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV

Giddens, Anthony .1986." Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, suatu analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber". Jakarta : UI Press, 1986 28

Gamble, Andrew, 1995, The New Political Economy, dan Political Studies, XLIII,516

6

. Griffin,

Ricky W. dan Eber, Ronald J . t. 2007.Bisnis (diterjemahkan oleh Sita Wardhani), Penerbit Erlangga, Jakarta Heriyono.2013." Ekonomi

10

Politik Dalam Bisnis".Jurnal Ekonomi Vol.1 No.2 Ibrahim. 2013

24

. Sengkarut Timah dan Gagapnya Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Penerbit ImperiumBudiman, Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga,,(Jakarta; Gramedia;1995 Mubyarto.1993."Ekonomi Pancasila". Jakarta :LP3ES

Mas'ood, Muktar 2002, New Politcal Economy dan Perburuan Rente, Bahan kuliah ekonomi politik. Malang Unibraw

6

Pratama,Sandy.

2018."Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konlik Tata Kelola Pertambangan ".Jurnal Wacana Politik Vol.3 No.1

63

:40-53 BAB VI POLITIK PEMBERDAYAAN DAN INKUBATOR BISNIS UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI POLITIK PADA WIRA USAHA

Tujuan Instruksional Khusus Setelah mengikuti **pokok bahasan** pada bab **ini mahasiswa**
dapat: 1

23

. Memperoleh gambaran tentang politik pemberdayaan 2. Memperoleh gambaran tentang inkubator bisnis Deskripsi Singkat Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh gambaran tentang politik pemberdayaan dan inkubator bisnis Tugas Mahasiswa harus membaca isi bab VI dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai. 6.1. Politik Pemberdayaan Pendapatan produk domestik bruto negara Indonesia mengalami peningkatan dalam perhitungan kurs Dolar sebesar \$ 857 tahun 2000 meningkat sebesar \$ 3,603 tahun 2016 menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pergerakan ekonomi yang cukup lancar khususnya bidang impor dan sebagai anggota organisasi internasional G-20 (Worldbank, 9/04/2018). Namun belum melepaskan masyarakat Indonesia dari garis kemiskinan, hal ini didukung dengan data yang dipublikasi oleh Asian Development Bank masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan tahun 2017 sebesar 10,6% (adb.org; poverty in Indonesia,2018). Sebesar 97,64% ribu masyarakat Indonesia memilih untuk menjadi pekerja di negara Malaysia dan total masyarakat yang bekerja di luar negeri pada tahun 2015 sekitar 275 ribu (Statista.com, 2018). Sedikit dari masyarakat Indonesia yang mengiyakan potensi sumber daya alam disekelilingnya, pemerintah masih seolah-olah bergerak sendiri dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dan tingginya tingkat penduduk di Indonesia belum bersinergi secara lurus, kekayaan sumber daya alam yang ada belum dimanfaatkan dengan serius khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusianya. Sebagai dampak lain adalah mayoritas masyarakat Indonesia menjadi pekerja, sebagian dalam negeri dan sebagian di luar negeri karena orientasi menuju kepada keuntungan yang didapat dan melihat pekerjaan yang bergantung pada suatu perusahaan sebagai satu-satunya pekerjaan jangka panjang yang menjanjikan. Perempuan adalah mayoritas orang miskin di dunia (Smee & Woodroffe, 2013: 10). Sementara, menurut data Perempuan adalah sumber daya yang paling kurang dimanfaatkan dalam ekonomi dunia (thejakartapost.com,04/08/2016). Politik pemberdayaan yang diterapkan sebenarnya dapat memotivasi masyarakat untuk bergerak, memiliki sikap untuk berinisiatif memberdayakan potensi yang ada. Dalam penelitian ini potensi yang dimaksud peneliti ialah potensi untuk berwirausaha memanfaatkan sumber daya yang ada misalnya masyarakat memulai usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah dapat menyokong pertumbuhan sektor ekonomi suatu negara dengan membuka kesempatan kerja (worldbank, 20/06/2016). inilah potensi yang dapat dilihat sebagai alat model politik pemberdayaan dalam penelitian ini, keberadaan usaha kecil menengah menjadi jalan tengah menuju kestabilan politik dan ekonomi Indonesia. Potensi wirausaha merupakan rekombinasi dari sumber daya dan dapat memberikan keuntungan individual (Shane, 2003:18). Namun, wirausahaan lebih luas daripada itu karena tidak hanya memberikan keuntungan individual bagi pelaku usaha namun juga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu masyarakat Indonesia dapat memulai kegiatan wirausaha, untuk memulai suatu wirausaha peneliti searah dengan pendapat bahwa pelaku usaha yang baru memulai usahanyaharus menginterpretasikan seluruh informasi yang berhubungan dalam menyusun rencana kerja (Shane, 2003:41- 42). Lebih lanjut, agar dapat mengambil kesempatan potensi wirausaha tersebut pelaku usaha melakukan tindakan yang berkaitan dengan akuisisi dari sumber daya serta komunitas wirausaha baru (Stevenson & Jarillo, 1990: 23). Untuk menarik inti permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, wirausaha sudah menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu alat penggerak pertumbuhan ekonomi yang sekaligus membangun sumber daya

manusia. Namun pada faktanya usaha kecil menengah kurang produktif dan terintegrasi global dibanding dengan perusahaan - perusahaan besar, sementara hasil Survei bisnis yang dilakukan International Trade Center menunjukkan hanya 17 persen perusahaan Indonesia yang aktivitas ekspornya dimiliki atau dikelola oleh perempuan (thejakartapost.com,04/08/2016). Hal ini disinyalir karena wirausaha yang sudah ada hanya bersifat sementara, belum ada keseriusan baik dalam pengelolaan maupun peningkatan kapabilitasnya. Peneliti menarik fenomena ini untuk menjelaskan model politik pemberdayaan pada wirausaha tenant sehingga keberadaan wirausaha benar-benar dapat direalisasikan sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara. Menganalisa sumber mata pencaharian sama artinya mempelajari akar perekonomian masyarakat (Polanyi, 1977: 20). Suasana maupun iklim yang dapat mempengaruhi perkembangan dari politik pemberdayaan ini dimaksudkan seperti menciptakan suasana usaha atau dalam hal ini motivasi persaingan wirausaha. Pada awalnya memahami dan menguasai suasana wirausaha salah satunya ruang lingkup produksi terkadang setelah laju produksi sangat padat diawal usaha kemudian mengalami hambatan dan penurunan aktivitas misalnya tidak memproduksi lagi dan mengeluhkan berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi. Kebingungan menghadapi tantangan pemasaran atau menargetkan konsumsi juga menjadi suatu hambatan produksi. Desain Pemasaran mengenai bagaimana cara mendesain untuk keperluan pemasaran, usaha atau usaha pemula umumnya dilakukan secara mandiri mulai dari produksi hingga pemasaran, kemudian muncul keragu-raguan akan kualitas dan respon pasar terhadap hasil produksi yang membuat adanya maju mundur dalam mempromosikan suatu desain. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan terhadap desain pemasaran yang telah dibuat seperti Desain dan Delivery Pelaksanaan Program, atau melaksanakan program-program yang akan dipasarkan. Jadi menciptakan suasana yang mendukung potensi usaha adalah dengan membangun komunikasi dalam level marketing dan komunikasi di beberapa wilayah yang memiliki ketua sendiri. Maka dari itu pelaku usaha haruslah bergabung menjadi anggota yang tersebar di 90 kota di Indonesia sehingga produk yang dihasilkan dapat mengkases cakupan pasar yang lebih luas. Komunikasi bagaimana seseorang menjelaskan sesuatu atau menyampaikan informasi dalam kalimat yang menarik dan mudah dimengerti sangat penting dalam memasarkan hasil produksi. Minimnya pengetahuan akan teknologi dan informasi tentu dapat menghambat pemasaran dan mengurangi nilai promosi, akan tetapi strategi komunikasi masih dapat dilaksanakan dengan dukungan kerjasama tim yang baik. Kegiatan pemasaran hasil produksipun menjadi tak terputus atau berkelanjutan yang meskipun akan menimbulkan gesekan atau persaingan di setiap pemasaran. Khususnya pada hasil produksi yang jenisnya sama, ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti keunggulan produk, harga dan kualitas yang akan membedakan setiap produk yang dijual. Meskipun Permasalahan pertama ketika memulai usaha adalah modal awal karena modal usaha itu kecil terlebih usaha jangka pendek ditambah lagi mental yang belum kokoh dan semangat yang masih naik turun menyebabkan adanya kekhawatiran untuk meneruskan usaha, namun membangun kepercayaan diri menjadi sangat penting sebagai pondasi usaha agar terus berjalan, kemudian modal melanjutkan usaha dengan semangat, dan memahami akan adanya untung rugi atau resiko dalam menjalankan usaha sehingga ketika mengalami naik turun, pelaku usaha tidak akan kehilangan konsentrasi dalam manajemen usahanya. Setelah itu, modal dapat ditangani dan pelaku usaha sudah membangun mental dan semangat yang kuat. Masalahnya pun menuju level lain, yaitu SDMnya. Sumber Daya Manusia dibutuhkan dalam menjalankan usaha, pelaku usaha tidak dapat menjalankannya secara individu karena usaha tersebut harus berkembang yang secara otomatis semakin berkembangnya suatu usaha maka semakin luas pasar untuk dijangkau, semakin meningkat produksi dan tenaga ahli yang dibutuhkan pun meningkat. Permasalahan SDM yang dimaksud adalah masalah keuangan/dana sebagai upah/gaji yang diberikan kepada para pekerja. Usaha model seperti apa yang dijalankan dan bagaimana usaha dapat memberikan manfaat kepada konsumennya dalam membuka usaha, kendala

yang dihadapi dari persiapan manajemen dan marketing dalam dunia usaha terhadap kebutuhan terhadap pembeli karena pembeli dapat dikatakan sebagai sumber yang menghidupi keberlangsungan usaha tersebut, dengan pengertian yang ada maka disinyalir

bahwa konsumen tidak hanya membeli sebuah barang tapi juga merupakan pengguna atau orang yang 26

mempergunakan hasil produksi usaha. Sebuah model usaha secara virtual disebut sebagai model usaha karena dapat memberikan manfaat kepada konsumennya, dengan mengandalkan tim pelaku usaha dan menarik investor guna mendukung pendanaan usaha. Model usaha merupakan suatu wujud bagaimana usaha dapat memberikan manfaat kepada konsumennya mulai dari tahap awal merencanakan usaha, pemilihan produksi, alat yang dipergunakan, tim hingga ke bagian akhir pemasaran. Misalnya, usaha

model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual yang terdiri dari 9 elemen yang 47

harus Anda miliki dalam memulai usaha model kanvas ini sebagai berikut: Sembilan point pokok usaha model kanvas (1). Target pasar; (2).Fungsinya; (3).Channels; (4).Customer; (5).Kedisiplinan; (6). Reset/ STEP; (7).Kegiatan/ Structure; (8).Partnership; (9).Metodel pengeluaran. Lebih lanjut, menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target usaha.

Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk, poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pembeli. Hal ini menjadi kesempatan pelaku Wirausaha untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan usahanya dengan usaha yang lain 25

, usaha

model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk 25

semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model usaha 41

. Artinya pelaku usaha dituntut untuk selalu fokus dalam berwirausaha dengan target yang sudah ditetapkan atau fokus dengan produk yang diproduksi apakah memenuhi standar dan kebutuhan serta cocok dengan pembeli. Sembilan point pokok usaha model kanvas yang berisi Target pasar, Fungsinya, Channels, Customer, disiplin , Reset/ STEP, Kegiatan/ Structure, Partnership, Dan Metodel pengeluaran. Artinya, ketika berbicara usaha model kanvas secara otomatis yang terlintas adalah tekanan, mendapatkan kepercayaan pembeli yang juga secara langsung ialah melibatkan diri dalam interaksi langsung pada aktivitas pasar sehingga penyampaian produk langsung tepat sasaran. Selanjutnya adalah jaringan, cara mengkondisikan hasil produksi di era modern ini telah mengusung konsep Online dan offline, konsep offline bisa dilakukan dengan model penitipan di toko-toko tertentu atau menjualnya di toko sendiri, dengan konsep online hasil produksi dapat dipasarkan dengan onlineshop pada intinya produk bisa di jual, cara tersebut berhubungan dengan pembeli melalui media sosial seperti aplikasi live camp chatting Instagram,Whatsapp agar bisa aktif berkomunikasi dengan pembeli (online). Memahami usaha, pelaku usaha dituntut untuk lebih menGenal tentang pasar dan target produk nantinya baik barang, premium, jasa model atau strategi bagaimana produk dapat terjual dengan harga jual tinggi yang secara otomatis maraup keuntungan lain-lain. Yang perlu di perhtikan adalah target pembeli yang di sasar, mulai dari usia, jenis kelamin,apa yang mereka butuhkan, motif pembelian dan sebagainya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya ialah membaginya kedalam sub-sub kelompok kebutuhan pasar untuk menentukan pola produksi dan pelayanan yang sesuai dengan target. Setelah semua tahap dalam inkubator bisnis dilaksanakan, pelaku usaha mengenali medan pasar yang memuat persaingan wirausaha dan produk-produk yang memiliki potensi menjadi saingan barang atau jasa yang dipasarkan.

6.2. Inkubator Bisnis Keseimbangan antara pembentukan kegiatan wirausaha tahap awal dan dukungan perusahaan-perusahaan diperlukan melalui perusahaan yang ada dan struktur pendukung. Pengembangan perusahaan pemula sulit untuk dicapai dan ada banyak tantangan awal yang dihadapi oleh upaya tersebut. Untuk mengatasi kesulitan- kesulitan ini, Inkubator Bisnis dapat memantapkan dirinya sebagai jembatan menuju kesuksesan bagi para pemula dan pengusaha. Dengan demikian, Inkubator dapat berfungsi sebagai penghubung penting untuk kesuksesan berkelanjutan pada startup dan perusahaan kecil pada tahap awal.

Gambar 1 Business Inkubator Bridge Sumber : Park, Hwi Kwang and Kim,Jay.2016:3 Inkubator Bisnis adalah komponen penting dan vital bagi perkembangan ekonomi kota dan negara di seluruh dunia. Mereka tidak hanya mempromosikan pertumbuhan usaha kecil dan perusahaan, mereka juga berfungsi sebagai kontributor bagi kesehatan ekonomi keseluruhan ekonomi. Promosi usaha kecil melalui inkubator bisnis telah terbukti meningkatkan jumlah pekerjaan, meningkatkan jumlah uang yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui perpajakan, menempati lebih banyak real estat, menambah nilai pada infrastruktur ekonomi masyarakat, dan membantu menciptakan lapangan kerja tambahan di negara lain.

Gambar 2 Business Incubator Development Cycle Sumber : Park, Hwi Kwang and Kim,Jay.2016:3 Gambar 3 Strategic Marketing snapshot for Business Incubators. Source: authors Sumber : James and Maria, 2017:36 Adanya manajemen dan staf Inkubator Bisnis untuk mendapatkan persepsi menyeluruh tentang mendorong pemasaran strategis ke depan dalam organisasi mereka.

Tabel. 1 – Pengetahuan tentang Dinamika Industri. Sumber: kompilasi sendiri.

Q • Sebutkan iga alasan yang dikaitkan dengan pertumbuhan / penurunan? • Alasan terkait pasar / pemasaran termasuk kurangnya strategi pemasaran, Pelanggan miskin dasar, kurangnya inisiaif pemasaran, kurangnya akses pasar, Q • Kurangnya dana termasuk kondisi ekonomi yang buruk dan resesi dan kepercayaan investor • Dence. • Kurangnya staf yang terampil termasuk pilihan yang buruk dari inkubasi. Tiga tantangan utama untuk Inkubator Bisnis Anda saat ini? Q • Pendanaan. Kebijakan pemerintah dan birokrasi. • Sumber lebih banyak dana, masalah terkait pemasaran, peninjauan kebijakan pemerintah, lebih banyak Keterlibatan SEDA dan Masalah Internal Sumber : James and Maria, 2017:25 Elemen Kunci Sukses Inkubator Bisnis (1).Pemilihan manajer yang kompeten dan dinamis, hal ini sangat

penting untuk keberhasilan operasi inkubator. Manajer inkubator dalam menarik penyewa yang tepat, membantu penyewa ketika bisnis berkembang, dan menegakkan aturan operasional yang sesuai untuk fasilitas. (2). Kompetensi individu, manajer inkubator perlu menjadi wirausaha dengan hak individu, karena bertanggung jawab atas inkubator itu sendiri. Dan manajer perlu memiliki keahlian bisnis diperlukan untuk memahami masalah yang dihadapi penyewa, bahkan mungkin sebelum penyewa mengidentifikasi masalah. (3). Akses ke layanan bisnis dan bisnis bantuan di situs incubator (Markley and Namara,1994:2-3) :. Manajer inkubator dapat menjadi jejaring mendorong yang berpengaruh di antara para penyewa dan menjalin kontak antara penyewa inkubator dan perusahaan di luar inkubator. RANGKUMAN Adanya pemberdayaan politik dan inkubator bisnis pada wirausaha telah memberikan pengaruh ekonomi politik yaitu kesejahteraan. Melalui politik pemberdayaan untuk menumbuhkan kompetensi kewirausahaan pada wirausaha,

sehingga dapat diperoleh rujukan mengenai best practices inkubator bisnis industri kreatif yang efektif dan 62

eisien. Dengan adanya suatu inkubator bisnis industri kreatif wirausaha, pelaku usaha yang menciptakan atau menjalankan usaha baru dengan keterbatasan kemampuan diawal merintis usaha dalam mencari dan menangkap peluang bisnis bisa termediasi dan difasilitasi para pelaku bisnis melalui proses pendampingan, konsultasi, fasilitas, dan bimbingan dalam kegiatan usahanya. Dengan adanya model inkubator bisnis industri kreatif ini berjalan sinergi dengan politik pemberdayaan yang menjadikan wirausaha lebih kompeten dalam memulai bisnis wirausaha serta meningkatkan prospek perkembangan baik daya tahan maupun daya saing. Secara sistemik dengan adanya inkubator bisnis industri kreatif wirausaha membentuk sumberdaya manusia yang

kreatif dan produktif menjadi sumberdaya manusia yang memiliki motivasi bersaing, inovatif, produktif dan kooperatif sebagai langkah awal dari penciptaan wirausaha dengan mengandalkan keunggulan kompetitif dan komparatif serta memiliki visi dan misi untuk 34

menopang industri kreatif wirausaha. Pertanyaan 1. Sebut dan Jelaskan apa yang dimaksud potensi wirausaha menurut Shane (2003:18) ? 2. Sebut dan Jelaskan apa yang dimaksud Polanyi (1977: 20) mengenai analisa sumber mata pencaharian dengan ekonomi politik masyarakat ? 3. Sebut dan Jelaskan model Inkubator bisnis yang digambarkan oleh Park, Hwi Kwang and Kim,Jay (2016:3) pada gambar 1 dan 2 ? 4. Sebut dan Jelaskan tahapan dinamika industri menurut James and Maria (2017:25) ? Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi Bab :..... Nama 5
NIM Program studi :.....
:..... Tuliskan Pemahaman

Saudara

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sebelum **perkuliahan 2. Formulir** 5
ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda **dianggap tidak hadir** dalam **perkuliahan. Formulir**

No 2 Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas Bab : Nama NIM Program studi

: :

Jawablah pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir **2.** 8
Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda dianggap **tidak**

mengumpulkan tugas. DAFTAR PUSTAKA

Bollen, K.A. 1986. Political Rights and Political Liberties in Nations: An Evaluation of Human Rights 20
Measures, 1950 to 1984. Human Rights Quarterly 8: 567–91

Friedmann, J. (1992) The Politics of Alternative Development, Oxford: Blackwell Publisher Ltd 65

James, D walter and

Maria, P Alexandrina. **2017."Marketing Challenges for south African Public Sector Business** 55
Incubator". Journal of Competitiveness

.Vol.9 Issue.4 : 19-39

Kabeer, N. 1999a. The Conditions and Consequences of Choice : Relections **on the** 20
Measurement of Women's Empowerment, Discussion Paper 108, UNRISD, Geneva. Kabeer, N. 1999b.
Resources, agency, achievements : Relections **on the measurements of women's empowerment.**
Development and Change 30: 435–464

. Markley,M Deborah and Namara, T

Kevin, 1994. A Business Incubator: Operating Environment and Measurement of Economic and Fiscal Impacts

53

Smee, S. & Woodroffe, J. (2013) "Achieving Gender Equality and Women's Empowerment in the Post-2015 Framework". London: GADN. [Online] Available from: <http://www.gadnetwork.org/storage/Achieving%20gender%20equality%20and%20women's%20empowerment%20in%20the%20post%202015%20framework.pdf> [Accessed: 2014-12-03]

Stevenson, H.H. & J.C. Jarillo (1990), A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management, Strategic Management Journal, 11, 17-27 Shane, S.2003. **A**

45

General Theory of Entrepreneurship; The Individual- Opportunity Nexus. Cheltenham: Edward Elgar
Park, Hwi Kwang **and**

64

Kim, Jay. 2016. Manual Of The Korean Business Incubator Model.

Phillips, A. 1998. The Politics of Presence. Oxford; New York: Oxford

20

University Press. Polanyi, K. (1977) The livelihood of man. Edited by Harry W. Pearson. New York: Academic Press

46

News : TheJakartapost.com.2016.Empowering women empowering the national economy diambil dari <http://www.thejakartapost.com/academia/2016/08/04/empowering-women-empowering-the-national-economy.html> pada 12 September 2018 Worldbank.org.2018. Indonesian Overview diambil dari <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview> pada 12 september 2018 Statista.com.2018. Number of Indonesian working abroad by country of destination diambil dari <https://www.statista.com/statistics/702146/number-of-indonesians-working-abroad-by-country-of-destination/> pada 12 September 2018 Adb.org.2018. Indonesian Poverty diambil dari <https://www.adb.org/countries/indonesia/poverty> pada 12 September 2018 Worldbank.org.

2016.Entrepreneurs and small business spur economic growth and create jobs diambil dari <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/20/entrepreneurs-and-small-businesses-spur-economic-growth-and-create-jobs> pada 12 September **2018**

33

. BAB VII EKONOMI POLITIK DALAM PENDEKATAN INTERNASIONAL

Tujuan Instruksional Khusus Setelah mengikuti **pokok bahasan** pada bab **ini mahasiswa** dapat: 1

23

. Memperoleh pemahaman tentang ekonomi politik dalam pendekatan internasional 2. Memperoleh ekonomi politik dalam isu kawasan Deskripsi Singkat Dalam perkuliahan ini anda akan memperoleh pemahaman tentang ekonomi politik dalam ruang lingkup pendekatan yang lebih luas yaitu internasional dan memperoleh ekonomi politik dalam isu kawasan. Tugas Mahasiswa harus membaca isi bab VII dan tulislah dengan menggunakan pulpen pemahaman saudara di form nomor 1, setelah itu form no 1 diserahkan ke dosen sebelum pertemuan di mulai. 7.1. Ekonomi Dalam Politik Internasional Kajian ekonomi politik tidak hanya seputar aspek politik dan ekonomi, namun melibatkan bidang dan ilmu sosial lain dalam interaksi dan relasinya. Karenanya, ekonomi maupun politik memainkan peran besar untuk ukuran nasional bahkan internasional (Yuniarti,2013:2). Perkembangannya dalam Politik Internasional sejak tahun 1990-an menjadi dominasi isu perekonomian. Hubungan antar negara baik dalam bentuk partipasi maupun pertikaian alasannya cenderung aspek ekonomi dibandingkan alasan politik. Pendekatan internasional dalam ekonomi politik ini menggambarkan interaksi saling menguntungkan antar interaksi ekonomi maupun politik yang melibatkan kehidupan masyarakat internasional di berbagai bidang, misalnya budaya, sosial, dan kedaulatan kemana suatu negara lebih cenderung membangun kerjasama. Dilain sisi, politik dapat menentukan suatu susunan kegiatan dan mengarahkannya melayani kepentingan-kepentingan individu kelompok yang berpengaruh, serta kekuasaan yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan menjadi penentu dasar sistem dalam ekonomi. Dari aspek lain, ekonomi dalam prosesnya cenderung menyalurkan kekuatan politik dan aset kepemilikan. Perekonomian tersebut membuat interaksi kekuasaan antar golongan. Pada kesempatan lain akan memperbaiki sistem politik sekaligus menyusunstruktur ekonomi yang baru.,dinamika hubungan internasional di era modern ini berguna untuk hubungan saling menguntungkan segi ekonomi serta segi politik (Jones,1993:223-224). Contohnya, adanya larangan ekonomi yang beralasan politis atau sebaliknya kebijakan di keluarkan karena pertimbangan ekonomi. Yakni apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) terkaitlarangan ekonomi pada negara Libya, kemudian pada negara Iran dan Irak dengan alasan politis dari pada alasan ekonomi, ketika para pemimpin Negara tersebut tidak menyetujui eksistensi dan mendominasi AS sekitar kawasan di Timur Tengah. Sekalipun interaksi saling menguntungkan antara politik serta ekonomi, penyebab ekonomi menunjukkan adanya dominasi yang disebabkan aspek politik. Hubungan – hubungan internasional yang dijalin kawasan barat dan timur, Utara dengan Selatan, Negara maju dengan Negara berkembang – Negara miskin, semuanya atas dasar alasan ekonomi. Ekonomi selaku kunci dari status maupun peringkat pada negara pada sistem global. Tanda pembagian dimunculkanberdasarkan kondisi geografis maupun berdasarkan kapasitas dari ekonomi nasional (Yuniarti,2013:5). Contohnya dapat dilihat dengan apa yang dialami pada Eropanisasi dan Globalisasi yang memuat

tiga pilar utama yang menjadikan EMU sebagai konstrain regional baru terhadap struktur ekonomi politik Jerman. Pertama, dibentuknya Bank Sentral Eropa (European Central Bank,ECB) untuk menggantikan Bundesbank dalam pengelolaan kebijakan ekonomi nasional. Kedua , kekuasaan ECB

4

sebagai bank sentral yang independen dan memiliki otoritas untuk mengatur stabilitas harga dan strategi kebijakan moneter

yang

bersifat nonakomodatif sehingga dapat memaksakan kebijakan iskal dan upah yang membuat model kebijakan kesejahteraan

4

di Uni Eropa. Ketiga, Membentuk

Broad Economic Policy Guidelines yang bertugas sebagai koordinasi ekonomi **dan** mengkaji serta **memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara-negara anggota**

4

di level Uni Eropa sebagai penopang proses-proses regionalisasi (Dyson, 2005: 127-128). Dukungan liberalisme tidak hanya

di Eropa bahkan **di seluruh belahan dunia. Untuk** mempercepat **Pasar Tunggal Eropa**

4

, maka agenda liberalisasi dan aturan/sistem pada tanggal 1 Januari 1993 dijalankan secara serempak baik disektor industri, perbankan sampai sektor jasa. Hal ini memaksa

untuk mengharmonisasi lebih dari 100.000 peraturan nasional Jerman (**Crouzet, 2001: 235**

4

). Perubahan struktur industri pada era globalisasi ini dinakhkodai agar mendorong kemampuan produksi internal serta menambah nilai dari produk tersebut yang bersifat saling berkaitan dan beketergantungan yang menjadi sumber kemakmuran bagi negara-negara di dunia pada system ekonomi global yang memiliki sikap saling bergantung sama lain (Scott, 1985 : 98-99). Dengan metode yang lebih luwes, berbagai macam industri mampu memproduksi barang dengann tepat guna dan dengan relasi yang banyak pelaku industry akan lebih mampu mengatasi berbagai macam dampak yang terjadi di pasar. Mengenai sebaliknya, yang benar disayangkan pada hubungan internasional. Ini merupakan kepincangan jarak Utara dan Selatan. Wilayah-wilayah fakir yang menurut geograis berpengaruh pada bagian bumi selatan memiliki kecanduan yang banyak terhadap wilayah-wilayah modern yang berpengaruh di bagian bumi utara. Saat praktik kapitalisme yang diciptakan wilayah-wilayah Utara, wilayah-wilayah Selatan terhadap wilayah-wilayah Selatan kerap kali berlangsung. Sedangkan di era 1990-an, rumor perdagangan kerap memerankan rumor perekat ikatan antar Negara, bukan terbatas pula sebagai asal perpecahan. Regionalism yang berkepribadian melindungi dalam bentuk melindungi perdagangan didalamnya terhadap pasar global biasanya mudarat wilayah yang memerankan mitra

bisnisnya. Sementara pasar satu-satunya Eropa berdiri 1993, Amerika Serikat dan Jepang banyak menderita akibat ada kelebihan Kendala bagi mengekspor perlengkapannya menuju pasar perekonomian Eropa. Makin berlebihnya suatu trade diversion(pemindahan wilayah impor) bagi Uni Eropa pun mudarat wilayah- wilayah ASEAN. Besarnya pepecahan bisnisnya yang berlangsung mendampingi wilayah menekankan dibuatnya alat mendunia yang sanggup memenuhi serta mengatasi kesulitan dalam perniagaan internasional (Yuniarti,2013:7). Pada awal periode 2000-an, sektor ekonomi menjadi salah satu pemicu terjadinya hubungan kerjasama ekonomi perdagangan untuk mengatasi masalah yang terjadi antara negara-negara di dunia seperti kesenjangan ekonomi yang dipengaruhi oleh globalisasi yang memicu masalah kemiskinan yang global. Di sisi lain, bergabungnya

Cina dan Rusia sebagai **anggota** dari **WTO pada Desember** tahun 2001 **dan Agustus**

40

tahun 2012 menjadi salah satu moment sejarah dalam dunia politik internasional dan tata dunia kontemporer. Selain Cina, Rusia juga sedang membangun dan melakukan perubahan sistem pada sektor perekonomian dari sistem sosialis menjadi sistem kapitalis (Mansbach and Rafferty, 2008:568). Dalam beberapa negara, dilihat dari sisi belum kuatnya ekonomi negara tersebut dan dipengaruhi oleh ekonomi dunia, Kemiskinan terjadi di wilayah yang tidak bisa berkompetisi dalam ekonomi perdagangan internasional yang bebas. Walaupun negara- negara telah memberikan bantuan dari segi hubungan bilateral antar negara maupun hubungan hubungan yang multilateral atau melalui forum seperti IBRD, IMF, dan organisasi lain yang ada di PPB untuk membuat forum dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan percepatan negara-negara berkembang untuk menjadi negara maju seperti di negara berkembang dan tingkat ekonomi rendah yang terdapat di kawasan negara-negara Asia bagian Selatan, kawasan Amerika Latin, dan kawasan bagian Selatan Afrika serta kawasan Eropa Timur. Dengan masuknya negara-negara tersebut dalam sistem ekonomi global akan berpengaruh terhadap kemakmuran ekonomi yang dapat menyebabkan masalah kemiskinan yang tiada ada solusi dan dapat menjadi masalah baru bagi perkenomian dunia di negara-negara berkembang. Proses pendekatan ekonomi yang sudah menetapkan gambaran saling berhubungan dalam kerjasama ataupun perselisihan. Bahkan perselisihan yang timbul bukan dari pola persaingan untuk berlomba merebut sumber-sumber ekonomi yang utama, melainkan juga terdapat perselisihan akibat dari ketidakseimbangan dalam proses pembangunan ekonomi secara menyeluruh

antara `negara maju dengan negara berkembang dan miskin yang dapat menjadikan **bukti nyata**
sebuah **dampak negatif dari globalisasi ekonomi Ekonomi**

40

secara dunia menegaskan supaya negara-negara lainnya untuk menggambarkan kembali kondisi ekonomi dan politik pada tahun 1990-an dan melakukan peningkatan terhadap persaingan industri. Kondisi ini terjadi secara bersama, dengan adanya pembukaan pusat perbelanjaan dan produksi berbasis baru di kawasan negara berkembang seperti yang berada di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sedangkan negara maju terus berusaha membangun sistem jaringan pusat perbelanjaan dan produksi di beberapa kawasan yang baru. Persaingan mengalami perubahan namun tidak bisa diamati dari peningkatan penanaman modal oleh negara lain secara

langsung (Foreign Direct Investment, FDI) terutama di negara berkembang dan beberapa kawasan **di**

4

Asia. Tahun 1989 – 1994, penanaman modal oleh negara lain ke negara di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 13.973 juta dollar dan mengalami peningkatan hingga mencapai 30.973 juta dollar pada tahun 1996. Jumlah modal yang ditanam oleh negara lain ke China pada tahun 1989-1994 mencapai 13.951 juta dollar dan mengalami peningkatan mencapai

35.849 juta dollar pada tahun 1995 serta **40.180 juta dollar pada tahun 1996 (Felker, 2003: 258**

4

). Polemik selanjutnya, yaitu mengenai apa yang harus dilakukan serta bagaimana menjalankan kebijakan ekonomi (Dyson, 2005: 118). Dyson menyebut pendekatan ini dengan nama 'pendekatan koalisional'. Menurut dyson, persaingan 3 kelompok besar menghasilkan semangat ekonomi politik jerman. Adapun 3 kelompok besar itu, yaitu: 1. Kelompok ordo-liberal, keterlibatan negara dalam mengembangkan acuan bagi stabilitas ekonomi dan menciptakan pasar yang kompetitif menjadi hal utama dalam kelompok ini 2. Kelompok kapitalisme terkelola, perlindungan dan kesejahteraan sosial menjadi hal penting dalam kelompok ini. 3. Kelompok neo-keynesian, keterlibatan negara dalam mengelola permintaan untuk meningkatkan perekonomian serta menyediakan lapangan pekerjaan melalui alat-alat iskal pajak dan mengelola dana belanja publik menjadi hal yang difokuskan di kelompok ini. Persaingan antara 3 kelompok ini semakin terlihat sejak lemahnya pertumbuhan

ekonomi Jerman di **pertengahan tahun 1980-an** serta terjadinya **perubahan politik global** di **awal** tahun **1990-an**

4

. Pada masa tersebut, perselisihan mengenai kebijakan ekonomi politik hingga urusan perubahan

fungsi dan struktur negara Jerman yang sangat tepat (**Dyson, 2005: 118-120**

4

). Terjadinya perselisihan 3 kelompok besar mengenai perubahan struktur ekonomi politik Jerman ini paling tidak menghasilkan 3 momentum besar. Pertama, terjadinya proses penyatuan kembali

Jerman Barat dan Jerman Timur dengan melibatkan isu **ekonomi dan** sosial. **Kedua**

4

, adaptasi struktur ekonomi politik akibat desakan eksternal dalam proses regionalisasi Eropa. Ketiga, reformasi industrial Jerman akibat tekanan globalisasi dan liberalisasi ekonomi. 7.2. Ekonomi Politik dalam isu kawasan Dalam

era regionalisme ekonomi perlu memperhatikan industrialisasi negara-negara ASEAN yang semakin meningkatkan interdependensi. Yang dimana persaingan dunia akan memenuhi kebutuhan negaranya sudah sangat berlangsung sangat signifikan karena masing-masing negara khususnya ASEAN berlomba-lomba ingin menjadi negara maju yang memiliki industri yang baik sehingga bersaing dengan negara luar yang memiliki industri yang lebih baik. Seiring semakin terhubung dan saling ketergantungan, perubahan industri dan investasi Jerman dan beberapa negara maju secara keseluruhan terjadi bersamaan dengan lahirnya aspek baru wilayah ekonomi

di negara –negara Asia. Uni Eropa dan ASEAN adalah kawasan organisasi yang paling 4
menyatakan dengan tegas **dan gencar**

untuk mengintegrasikan ekonomi agar negara2 yang berada di

dalam satu region dimana setiap negara yang berada dalam satu region, batas negara bukan 44
hambatan yang berarti dalam menanggapi permintaan permintaan **pasar**

. Politik asia tenggara bersifat kontemporer yang mengikuti perkembangan regionalisme baru yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi. (Breslin dan Higgot, 2003). Pada sektor manufaktur negara-negara ASEAN adalah salah satu sektor-sektor industri yang berhasil meningkatkan nilai ekspor (Ravenhill, 1995: 856). Ekspor barang industri sudah menjadi perhatian khusus bagi negara-negara ASEAN misalnya negara-negara seperti indonesia, thailand yang memberikan lonjakan meningkatnya nilai industri khususnya pada sektor manufaktur karena salah satu di negara di atas memiliki sumber bahan mentah yang banyak diperlukan oleh negara- negara industri terkait untuk membuat produk industri yang bisa di ekspor lagi bagi negara-negara yang membutuhkan barang tersebut, hal ini yang mendorong persaingan di negara-negara ASEAN untuk menjadikan barang industrinya bisa memberikan kepuasan bagi setiap negara yang menggunakan barang ekspornya. FDI jepang di indonesia berkembang 4200 pada tahun 1989- 1992, pada tahun 1986-1989 nilai investasi jepang naik di negara philipina 10800 (Munakata,2006:38). Keberlangsungan

regionalisme ekonomi di Asia dimulai oleh ASEAN sebagai motor integrasi ekonomi paling aktif. 4
Inisiasi regionalism ekonomi itu dilakukan dalam kerangka ASEAN secara evolutif, mulai dari pemberlakuan AFTA (ASEAN Free Trade Area), sebuah skema untuk menurunkan dan menghapus tarif perdagangan antarnegara ASEAN

hal ini untuk memberikan batasan agar akan lebih memperkecil nilai setiap barang yang masuk ketika hal ini sudah terjadinya batasan ekspor akan lebih terealisasi dengan baik agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Dengan adanya blok Asia Timur ini, tentu saja, Amerika Serikat merasa kepentingannya di Asia 4
semakin terancam, terutama oleh Jepang dan China . Dalam membangun kapasitas **untuk**

jejaring ekonomi dalam proses regionalisme di asia negara-negara asia lainnya ikut berkontribusi yang ditakutkan terdapat

diplomasi yang menentukan hubungan –hubungan ekonomi dan politi di asia

4

. Permainan politik ini akan mengakibatkan permianan harga suatu barang kebutuhan yang kadang naik dan kadang turun yang dimana hal ini dinamakan kebijakan kamu elit dunia di satu sisi berdampak pada kaaum bawah merasa tertindas dengan murahnya harga industri di dalam negeri hubungan seperti ini yang harus di hindari. Kawasan dengan komposisi penduduk yang lebih besar akan memerlukan kebutuhan yang lebih besar artinya semakin besar jumlahnya penduduknya maka seakin besar keperluan yang dibutuhkan terutama kaitanya dengan perkonomian dunia dimana setiap negara harus siap bersaing demi kepentingan negara kalaulah negara terkendala dengan kebutuhan maka akan terjadi tidak seimbangnnya anatar kebutuhan dan ketersediaan bahan untuk kepentingan negaranya. Pasar juga tidak kalah penting dalam menyediakan kebutuhan untuk masyarkatnya mulai dari teknologi maupun keperluan kebutuhan sehari-hari. Negara di dunia bersaing untuk mendapatkan FDI dan industrinya, termasuk sistem jaringan ekonomi Jerman di Asia. Salah satu negara yang bersaing dengan negara lainnya yaitu Jerman. Oleh karena itu, digambarkan dengan jelas adanya perubahan sistem jaringan ekonomi Jerman. Adanya data perubahan modal yang ditanam jerman ke negara lain, industri yang bergabung didalamnya dari berbagai negara dapat digunakan untuk mengetahui sumber kekuatan sistem jaringan ekonomi Jerman di kawasannya. RANGKUMAN Melihat ekonomi politik melalui pendekatan internasional tentu tidak akan merubah ketergantungan fungsi antara keduanya, yakni politik dan ekonomi. Aktor utama merupakan negara, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional dalam mencapai kepentingan negara baik itu melalui kerjasama maupun persaingan ekonomi global yang pada akhirnya mengantarkan negara dengan dominasi terbesar memiliki kekuatan politik yang lebih unggul di mata dunia. Isu ekonomi politik dalam kawasan sendiri meliputi negara- negara bagian, misalnya kawasan eropa, timur tengah, Asia hingga ke beberapa regional dengan scoup area yang lebih kecil. Isu ekonomi politik dalam kawasan membangkitkan rasa kompetitif dari setiap kawasan internasional untuk menunjukkan pengaruh dan keunggulannya dimata dunia, misalnya kawasan Asia yang memiliki kawasan-kawasan tersendiri dengan keunggulan masing-masing meskipun maish terkesan ditunggangi oleh negara maju dalam pergerakan pencapaian kekuatan politiknya. Keduanya membuktikan bahwa ekonomi sangat berpengaruh pada kekuatan mutlak yang didapatkan suatu negara setelah memiliki dominasi politik, hal tersebut akan berdampak pada perkembangan perekonomian negara yang menciptakan kekuatan ekonomi baru dalam persaingan global dan secara otomatis menarik perhatian negara-negara lain untuk melihat sebesar apa kekuatan politik yang dimiliki negara dengan dominasi ekonomi politik terbesar di kawasan tersebut. Sehingga akan lebih mudah untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya, dan memudahkan negara kawasan mitra untuk mencapai kepentingan kelompok. Pertanyaan Kunci/Tugas Petunjuk: Jawablah semua pertanyaan kunci/tugas di form nomor 2 dengan menggunakan pulpen, setelah itu form no 2 diserahkan ke dosen setelah pertemuan ini selesai. 1. Jelaskan aspek ekonomi politik dalam ukuran nasional dan internasional menurut Yuniarti ? berikan contohnya ! 2. Jelaskan konsep kontemporer dalam politik Asia Tenggara sebagai negara kawasan dalam perkembangan regionalisme ekonomi baru menurut Breslin dan Higgot ? Berikan contohnya ! Formulir No 1

Ringkasan Pemahaman Materi Bab :..... **Nama** 5

NIM Program studi :..... :..... :.....

Tuliskan Pemahaman

Saudara

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sebelum **perkuliahan 2. Formulir** 5
ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda **dianggap tidak hadir** dalam **perkuliahan. Formulir**

No 2 Jawaban Pertanyaan Kunci/Tugas Bab :..... Nama NIM Program studi :..... :..... Jawablah pertanyaan kunci/tugas

Paraf Dosen Catatan 1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen setelah perkuliahan ini berakhir **2.** 8
Formulir ini wajib diisi. Apabila tidak diisi , anda dianggap **tidak**

mengumpulkan tugas. DAFTAR PUSTAKA Breslin and Higgot. 2003. "New Regionalism in Historical Perspective", Asia Europe Journal, Vol. 1 (2) Mei, hlm.167- 182. Crouzet,Francois.2001.A History of the european economy,1000-2000.Virginia : University Press of Virginia Dyson.2005. "Economic Policy Management: Catastrophic Equilibrium, Tipping Points and Crisis Interventions" dalam Simon Green dan William Paterson (eds).2005.Governance in contemporary Germany:The Semi sovereign state revisited Cambridge:Cambridge University Press Felker, Greg B. 2003. Southeast Asian Industrialization and the Changing Global Production System, Third World Quarterly, April. Jones, Walter S. 1993. Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, EkonomiPolitik Internasional, dan Tatanan Dunia. Jakarta. Munakarta,Naoko.2006.Transforming East Asia: The Evolution of Regional Economic Integration.Tokyo:Research Intitute of Economy,Trade and Industry Mansbach, Richard W., and Rafferty,Kristen L. . 2008. Introduction to GlobalPolitics. New York: Routledge. Ravenhill, John. 1995. Economic Cooperation in Southeast Asia: Changing Incentives.Asian Survey, Vol. 35. No.9, September. Scott, Bruce R. 1985. National Strategies: Key to International Competition. Dalam Scott,Bruce dan Lodge,George (ed.).1985. US Competitivenessin the world economy. Boston:Harvard Business School Press. Yuniarti.2013."Pendekatan Ekonomi Dalam Politik Internasional". Interdependence-Jurnal Hubungan Internasional Vol.1 No.1. GLOSARIUM Ekonomi politik : Diidentifikasi keterlibatan aspek produksi, keuangan, hingga perdagangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada kasus-kasus keuangan, pendapatan negara, dan seputar perdagangan. Semua faktor tersebut menunjukkan peran utama manusia dalam ekonomi politik sebagai masyarakat dalam suatu negara yang menjalankan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. ekonomi dan politik : sebuah susunan yang terdiri dari unsur analisis dalam politik dan ekonomi, dimana unsur-unsur tersebut saling memberikan pengaruhnya. Pertumbuhan ekonomi : Jika dilihat dari perkembangan ekonomi politik dalam sejarah peradaban dunia sendiri menunjukkan bahwa manusia menggambarkan suatu sejarah berlawanan dalam tingkatan yang didorong oleh persaingan ekonomi, adanya pembagian tata ruang dan

aksesibilitas ekonomi dan unit-unit produksi yang menyebabkan adanya tingkat persaingan pada saat perang dunia I dan II serta berjalannya imperialisme perdagangan bebas. Pendekatan Ekonomi : upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui sedikit pengorbanan kecil yang dihadapkan pada tuntutan lain dari masyarakat. Pengorbanan dan upaya tersebut dicapai berdasarkan sejauh mana biaya yang harus dikeluarkan menjadi pertimbangan bisnis agar berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan, di sisi lain ialah sejauh mana pula kebijaksanaan publik dalam suatu negara yang demokrasi dapat memberikan ruang untuk dapat mengambil keuntungan keberlangsungan bisnis yang dikembangkan. Teori dependensi :

Teori ini awalnya menjelaskan masalah **keterbelakangan negara-negara bekas jajahan di dunia ketiga dan melihatnya dalam konteks global melalui pendekatan struktural yang** didasarkan **pada** pemikiran dasar tentang **marxis yang** berpatokan **pada materialisme** . Kemudian **teori ini merupakan**

2

hasil dari

keterpurukan pembangunan di dunia ketiga dan **disebabkan oleh faktor internal negara**

2

terkait. ekonomi klasik : kegiatan aktivitas barter

barang dan jasa untuk semata-mata diarahkan demi **kemakmuran** kebendaan **dan** menekan **pada** kemampuan penerapan **yang didasarkan pada ketersediaan tenaga kerja dan sumberdaya alam. Tenaga kerja bernilai sama dengan kapital dan material dasar produksi, sehingga disebut sumberdaya manusia**

14

. Uni Eropa dan ASEAN : kawasan organisasi yang paling menyatakan dengan tegas dan gencar untuk mengintegrasikan ekonomi agar negara2 yang berada di dalam satu region dimana setiap negara yang berada dalam satu region, batas negara bukan hambatan yang berarti dalam menanggapi permintaan pasar. Index A Aburizal Bakrie 95 Adam Smith 2, 3, 37, 58 Amerika Serikat 12, 25, 93, 96, 127, 129, 133 Andrain 66, 74 Arief 50, 74, 105 ASEAN 146 B Biil Clinton 93 borjuis 40 Browet 63, 74 D Damayanti 10, 18, 65, 66, 67, 70, 74 Deliarnov 4, 18, 43, 50 Dependencia x, 18, 24, 33, 38, 41, 45, 50, 63, 75 DPR 21, 87, 91, 92 Dyson 128, 131, 132, 142 E Ebert 100 ekonomi klasik 3, 10, 11, 43, 53, 146 ekonomi modern 7, 8 ekonomi politik iii, v, vi, vii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 28, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 51, 53, 58, 61, 68, 69, 70, 77, 80, 83, 84, 85, 88, 89, 99, 100, 106, 118, 119, 125, 126, 127, 131, 132, 135, 136, 137, 145 eksistensi vii, 10, 11, 13, 127 Engels 2, 3, 14 Erman 78, 83, 100, 105 Eropanisasi 127 F Foreign Direct Investment 130 Frank 40, 41, 42, 43, 50 fundamental 2 G Gamble 105 Giddens 6, 18, 105 Golkar 82, 90, 93 Gondwe 54 Griin 100, 105 H hegemoni 53 Heriyono 7, 8, 9, 10, 14, 18, 26, 33, 36, 50, 86, 87, 88, 89, 105 hutang luar negeri 61, 62 Neo-Marxis 39 I Nordhaus 20, 21, 29, 33 Nurcahyo 18 Ilmu politik 36 IMF 61, 62, 129 O industri 26, 39, 44, 56, 59, 60, 61, oikonomike 2 63, 69, 90, 91, 118, 119, 128, otoriter 42, 54, 66 130, 132, 133, 134 Inggris 2, 20, 28 P Internasional vi, xi, 43, 44, 50, 126, 142,

143 Paul Baran 39 Perancis 20, 28 K perang dunia kedua 2 perdagangan internasional 61, 129 kapitalis 3, 40, 41, 129 policy 2 Kapitalis 23, 25 politics social 89 Kepulauan Bangka Belitung 78, 80 popular vote 96 kretinisme 40 Portugis 20, 28 kuznetz 59 produk domestik bruto 59, 108 L produk domestik regional bruto 59 produksi 3, 5, 6, 9, 10, 37, 39, 43, 44, Lane 2, 3, 11, 12, 18 45, 53, 59, 60, 65, 110, 111, 112, liberalisme 90, 128 114, 128, 130, 145, 146 produktivitas 6, 7, 43 M produsen 21 Marx 3, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 39, 105 R materialisme 39, 146 Max Weber 18, 105 radikal 6, 23, 41 memonopoli 25 Robert M Mclver 4 monopoli 5, 25, 41 Ruslin 9, 18, 23, 33, 39, 41, 42, 43, 50, Mubyarto 22, 25, 29, 33, 90, 91, 106 61, 62, 64, 75 N S negara iii, vi, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, Samuelson 20, 21, 29, 33 14, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, Sandy 78, 79, 80, 82, 83, 106 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, Seymour 37 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, Siregar 42, 50 62, 63, 64, 68, 69, 70, 79, 80, sosialis 5, 37, 41, 129 83, 85, 89, 91, 94, 99, 108, Spanyol 20, 28 109, 110, 115, 126, 127, 128, Staniland 33 129, 130, 131, 132, 133, 134, Sukirno 2, 6, 18 135, 136, 137, 145, 146, 147 Suryadi 22, 33 neoliberalisme 4, 23 T W haksin Sinawarta 96 heotonio 39, 42, 43, 46, 50 Todaro 22, 33, 44, 50 wilayah 24, 26, 38, 58, 78, 81, 92, 93, 95, 111, 128, 129, 132 WTO 61, 129 U UU 25, 93, 94

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek**
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

3

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek**
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

3

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek**
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

3

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek**
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

3

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek**
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

3

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek

Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek Ekonomi Politik** : Antara **Teori dan Praktek** 3
Ekonomi Politik : Antara **Teori dan Praktek**

Ekonomi Politik: Antara Teori dan Praktek Ekonomi Politik: Antara

Teori dan Praktek (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

61

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151)

sources:

1 1,597 words / 6% - Internet
[Pratama, Sandy. "DIMENSI EKONOMI POLITIK DALAM KONFLIK TATA KELOLA PERTAMBANGAN \(Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016\)", 'Universitas Padjadjaran', 2018](#)

2 1,127 words / 4% - Internet from 31-Mar-2019 12:00AM
journal.uin-alauddin.ac.id

3 565 words / 2% - Internet from 17-Nov-2021 12:00AM
bookskart.net

4 233 words / 1% - Internet from 17-Apr-2020 12:00AM
www.scribd.com

5 185 words / 1% - Internet from 02-Jun-2020 12:00AM
www.scribd.com

6 332 words / 1% - Internet from 18-Nov-2021 12:00AM
nanopdf.com

7 163 words / 1% - Internet from 24-Sep-2017 12:00AM
media.neliti.com

8 180 words / 1% - Internet from 20-Dec-2021 12:00AM
digilib.uinsgd.ac.id

9 175 words / 1% - Internet from 28-Jul-2021 12:00AM
stainsarpress.stainkepri.ac.id

10 167 words / 1% - Internet
[Situmorang, J. R. \(James\). "Beberapa Keterkaitan Antara Politik Dan Bisnis", Parahyangan Catholic University, 2009](#)

11 24 words / < 1% match - Internet from 16-May-2020 12:00AM
www.scribd.com

12 18 words / < 1% match - Internet from 30-Mar-2020 12:00AM
www.scribd.com

13 12 words / < 1% match - Internet from 23-Aug-2019 12:00AM
www.scribd.com

14 114 words / < 1% match - Internet from 22-Jul-2018 12:00AM
media.neliti.com

15 25 words / < 1% match - Internet from 04-Jul-2018 12:00AM
media.neliti.com

16 97 words / < 1% match - Internet from 23-Jul-2017 12:00AM
indolisme.blogspot.com

17 95 words / < 1% match - Internet from 21-Mar-2019 12:00AM
kertasmudaindonesia.blogspot.com

18 73 words / < 1% match - Internet from 21-Dec-2019 12:00AM
repository.usu.ac.id

19 10 words / < 1% match - Internet from 16-Nov-2017 12:00AM
repository.usu.ac.id

20 77 words / < 1% match - Internet from 08-Dec-2018 12:00AM
gupea.ub.gu.se

21 77 words / < 1% match - Internet from 13-Dec-2020 12:00AM
who21.wordpress.com

22 74 words / < 1% match - Internet from 30-Nov-2020 12:00AM
saramonica-infomahasiswa.blogspot.com

23 71 words / < 1% match - Internet from 12-Nov-2020 12:00AM
prasasti92.blogspot.com

24 66 words / < 1% match - Internet from 20-Jul-2021 12:00AM
digilib.uinsby.ac.id

25

45 words / < 1% match - Internet from 02-Dec-2020 12:00AM
www.jurnal.id

26

13 words / < 1% match - Internet from 13-Nov-2020 12:00AM
www.jurnal.id

27

44 words / < 1% match - Internet from 17-Nov-2019 12:00AM
lib.ui.ac.id

28

40 words / < 1% match - Internet
[Ritaudin, Muhammad Sidi. "Khazanah Profetika Politik Kajian Etika Politik, Diskursus Kritik dalam Islam dan Pemikiran Islam Politik", Harakindo Publishing, 2013](#)

29

39 words / < 1% match - Internet from 12-Jun-2021 12:00AM
vibdoc.com

30

33 words / < 1% match - Internet from 20-Sep-2020 12:00AM
sinta.ristekbrin.go.id

31

30 words / < 1% match - Internet from 12-Nov-2020 12:00AM
tugas-materi-kuliah.blogspot.com

32

30 words / < 1% match - Internet from 21-Oct-2021 12:00AM
www.harmony.co.id

33

29 words / < 1% match - Crossref
[Meena Rambocas, Dana Hayes Burke. "Determinants of international readiness among small and medium-sized enterprises in Trinidad and Tobago", International Journal of Globalisation and Small Business, 2021](#)

34

29 words / < 1% match - Internet from 13-Dec-2019 12:00AM
aka.ac.id

35

28 words / < 1% match - Internet from 14-Dec-2021 12:00AM
ahmadtrihawaari.blogspot.com

36

28 words / < 1% match - Internet from 12-Nov-2020 12:00AM
www.researchgate.net

37

27 words / < 1% match - Internet from 04-Jul-2021 12:00AM
akpsuplirahim2013.blogspot.com

38

27 words / < 1% match - Internet from 05-Sep-2021 12:00AM
core.ac.uk

39

26 words / < 1% match - Internet from 02-Dec-2020 12:00AM
bangdikoy.wordpress.com

40

26 words / < 1% match - Internet from 11-Dec-2020 12:00AM
rezafirdaus2009.wordpress.com

41

23 words / < 1% match - Internet from 11-Nov-2021 12:00AM
artikel.ubl.ac.id

42

23 words / < 1% match - Internet from 25-Jan-2019 12:00AM
candymiint.blogspot.com

43

21 words / < 1% match - Internet from 12-Jan-2021 12:00AM
usaha321.net

44

20 words / < 1% match - Internet from 18-Jan-2021 12:00AM
hasyimibnuabbas.blogspot.com

45

20 words / < 1% match - Internet from 09-Apr-2008 12:00AM
www.ondernemerschap.nl

46

18 words / < 1% match - Internet from 03-Aug-2021 12:00AM
repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp

47

16 words / < 1% match - Internet from 29-Nov-2020 12:00AM
budi-prayogi.blogspot.com

48

16 words / < 1% match - Internet from 07-Jan-2019 12:00AM
id.123dok.com

49

15 words / < 1% match - Internet from 21-Dec-2021 12:00AM
etd.iain-padangsidempuan.ac.id

50

15 words / < 1% match - Internet from 19-Jun-2021 12:00AM
ferihidayatsahuri-ilalang.blogspot.com

51

15 words / < 1% match - Internet from 10-Nov-2021 12:00AM
ilkomind.blogspot.com

52

14 words / < 1% match - Internet from 03-Feb-2015 12:00AM
mayuliyanasittiwulandari.blogspot.com

53

14 words / < 1% match - Internet
[Sungur, Onur, Dulupçu, Murat Ali. "Türkiye'de İş Geliştirme Merkezlerinde \(İŞGEM\) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı", 2012](#)

54 14 words / < 1% match - Internet from 12-Oct-2021 12:00AM
repository.nwu.ac.za

55 14 words / < 1% match - Internet from 14-Jan-2021 12:00AM
sajesbm.co.za

56 13 words / < 1% match - Internet from 01-Jun-2021 12:00AM
Repository.umy.ac.id

57 13 words / < 1% match - Internet from 08-May-2019 12:00AM
annacsuwardi.blogspot.com

58 13 words / < 1% match - Internet from 09-May-2021 12:00AM
repository.unja.ac.id

59 13 words / < 1% match - Internet from 12-Nov-2020 12:00AM
terkaitilmu.blogspot.com

60 13 words / < 1% match - Internet from 18-Dec-2020 12:00AM
www.slideshare.net

61 12 words / < 1% match - Internet from 08-Apr-2019 12:00AM
id.scribd.com

62 12 words / < 1% match - Internet from 17-May-2019 12:00AM
ml.scribd.com

63 12 words / < 1% match - Internet from 15-Apr-2021 12:00AM
repository.radenfatah.ac.id

64 12 words / < 1% match - Internet from 18-Jun-2011 12:00AM
www.det-danske-ledelsesakademi.dk

65 12 words / < 1% match - Internet from 20-Jun-2018 12:00AM
www.diva-portal.org

66 11 words / < 1% match - Internet from 08-Jun-2016 12:00AM
journal.unnes.ac.id

67 11 words / < 1% match - Internet from 12-Nov-2020 12:00AM
putrahermanto.wordpress.com

68 11 words / < 1% match - Internet from 31-Mar-2021 12:00AM
repositori.usu.ac.id

69 11 words / < 1% match - Internet from 17-Jan-2021 12:00AM
www.braindilogsociology.or.id

70 10 words / < 1% match - Internet from 26-Oct-2020 12:00AM
apol1.wordpress.com

71 10 words / < 1% match - Internet from 12-Nov-2020 12:00AM
doku.pub

72 10 words / < 1% match - Internet from 10-Jan-2020 12:00AM
es.scribd.com

73 10 words / < 1% match - Internet from 23-Jul-2019 12:00AM
journal.unair.ac.id

74 10 words / < 1% match - Internet from 11-Apr-2021 12:00AM
repository.unimal.ac.id

75 10 words / < 1% match - Internet from 10-Apr-2018 12:00AM
viharasukhavatiprajna.blogspot.co.id
